



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERTAHANAN NEGARA
ARSITEKTUR DAN POLA SPASIALNYA**

SKRIPSI

MEDINA AZZAHRA HADAR

**FAKULTAS TEKNIK
DEPARTEMEN ARSITEKTUR
DEPOK
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERTAHANAN NEGARA
ARSITEKTUR DAN POLA SPASIALNYA**

SKRIPSI

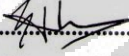
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Arsitektur

**MEDINA AZZAHRA HADAR
0706269275**

**FAKULTAS TEKNIK
DEPARTEMEN ARSITEKTUR
DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Medina AzzahraHadar
NPM : 0706269275
TandaTangan : 
Tanggal : 25 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Medina AzzahraHadar
NPM : 0706269275
Program Studi : Arsitektur
JudulSkripsi : Pertahanan Negara: Arsitektur dan Pola Spasialnya

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Arsitektur pada Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Ir. Triatno Yudo Hardjoko, Ph.D

(.....)

Penguji : Prof. Ir. Gunawan Tjahjono M.Arch., Ph.D

(.....)

Penguji : Ir. Herlily., MUD

(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 25 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Arsitektur Jurusan Arsitektur pada Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua dan adik saya yang telah memberikan bantuan dan dukungan sepanjang hidup saya hingga saat skripsi ini selesai
2. Prof. Ir. Triatno Yudo Hardjoko, Ph. D, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
3. Prof. Ir. Gunawan Tjahjono M.Arch., Ph.D, selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan agar skripsi ini menjadi skripsi arsitektur dan bukannya skripsi geografi ataupun skripsi bidang ilmu lainnya;
4. Ir. Herlily., MUD, selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan agar skripsi ini lebih mudah dibaca orang lain;
5. Library.nu, perpustakaan jurusan Arsitektur FTUI, perpustakaan FTUI dan perpustakaan Pusat UI yang telah menyediakan berbagai sumber literatur;
6. Siwi Ayuning Atmaji sebagai rekan mata kuliah spesial skripsi yang selalu memberikan semangat dan menjadi teman berdiskusi berbagai hal menarik;
7. Novi Dwi Aryani Sri Astuti Widyaningsih dan Siti Nur Jannah untuk semangat dan berbagai pengalaman menarik hingga saat skripsi ini selesai;
8. Angkatan 2007 terutama sesama peserta mata kuliah Perancangan Arsitektur 5 yang telah sama-sama berjuang melewati semester ke-9 ini;
9. Semua mahasiswa arsitektur FTUI yang pernah saya temui dan semua anak teknik FTUI yang pernah berinteraksi dengan saya selama 4,5 tahun perkuliahan, terima kasih untuk semua pengalaman menarik yang telah saya alami;

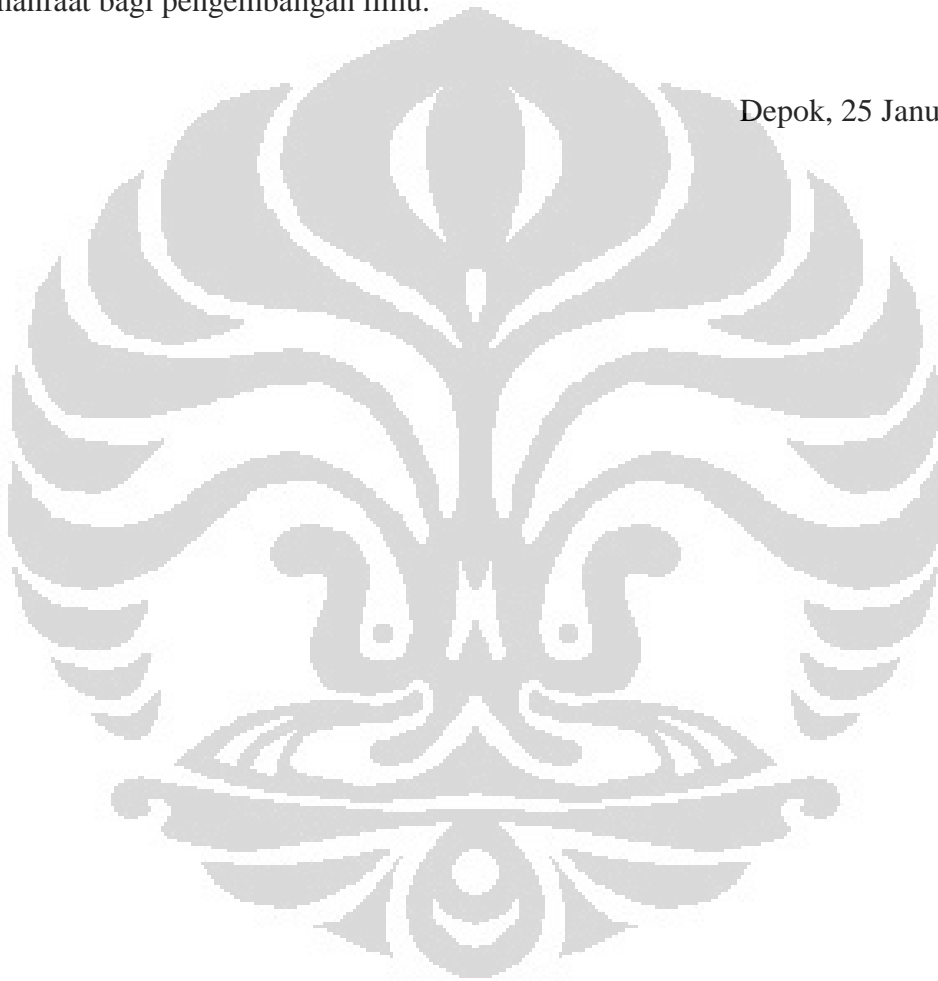
10. Para musisi dan komposer yang dengan karyanya membuat saya dapat tetap terjaga dan bersemangat mengerjakan skripsi;

11. Semua keluarga, kenalan dan orang yang tidak saya kenal yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh besar maupun kecil pada hidup saya hingga saat selesainya skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 25 Januari 2012

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Medina Azzahra Hadar

NPM : 0706269275

Program Studi : Arsitektur

Departemen : Arsitektur

Fakultas : Teknik

Jenis karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PERTAHANAN NEGARA: ARSITEKTUR DAN POLA SPASIALNYA

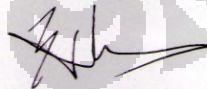
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Januari 2012

Yang menyatakan



(Medina Azzahra Hadar)

ABSTRAK

Nama : Medina Azzahra Hadar
Program Studi : Arsitektur
Judul : Pertahanan Negara: Arsitektur dan Pola Spasialnya

Arsitektur adalah bidang ilmu yang terkesan tidak berkaitan dengan pertahanan negara. Mengetahui pengaruh arsitektur pada pertahanan negara beserta pola spasial yang terbentuk pada pertahanan negara merupakan tujuan dari skripsi ini. Metode yang digunakan adalah melalui studi berbagai referensi untuk melihat pengaruh arsitektur pada pertahanan negara. Tipe Geopolitik menjadi variabel dalam melihat pola spasial pertahanan negara. Berdasarkan pendekatan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sejak zaman dahulu hingga sekarang, pertahanan negara tidak dapat terlepas dari pengaruh salah satu ranah di arsitektur, yaitu *architectura militaris*. Setiap tipe geopolitik memiliki ciri pola spasial tertentu yang terbentuk dari pertahanan negara.

Kata Kunci: *architectura militaris*, pertahanan negara, pola spasial, tipe geopolitik

ABSTRACT

Name : Medina Azzahra Hadar
Study Program: Architecture
Title : State Defence: Architecture and It's Spatial Pattern

At a glance, architecture may not have any correlation with state defence. To know how architecture affect state defence and to find the spatial pattern shaped by state defence are the objectives of this work. Study of various references is the method to know if there's any correlation between state defence and architecture, while, geopolitic type treated as a variable to find the spatial pattern of state defence. It was shown that from the past until now, state defence never detached itself from *architectura militaris* as one domain of architecture. Each Geopolitic type has its own spatial pattern as the result of its state defence.

Keyword: *architectura militaris*, state defence, spatial pattern, geopolitic type

DAFTAR ISI

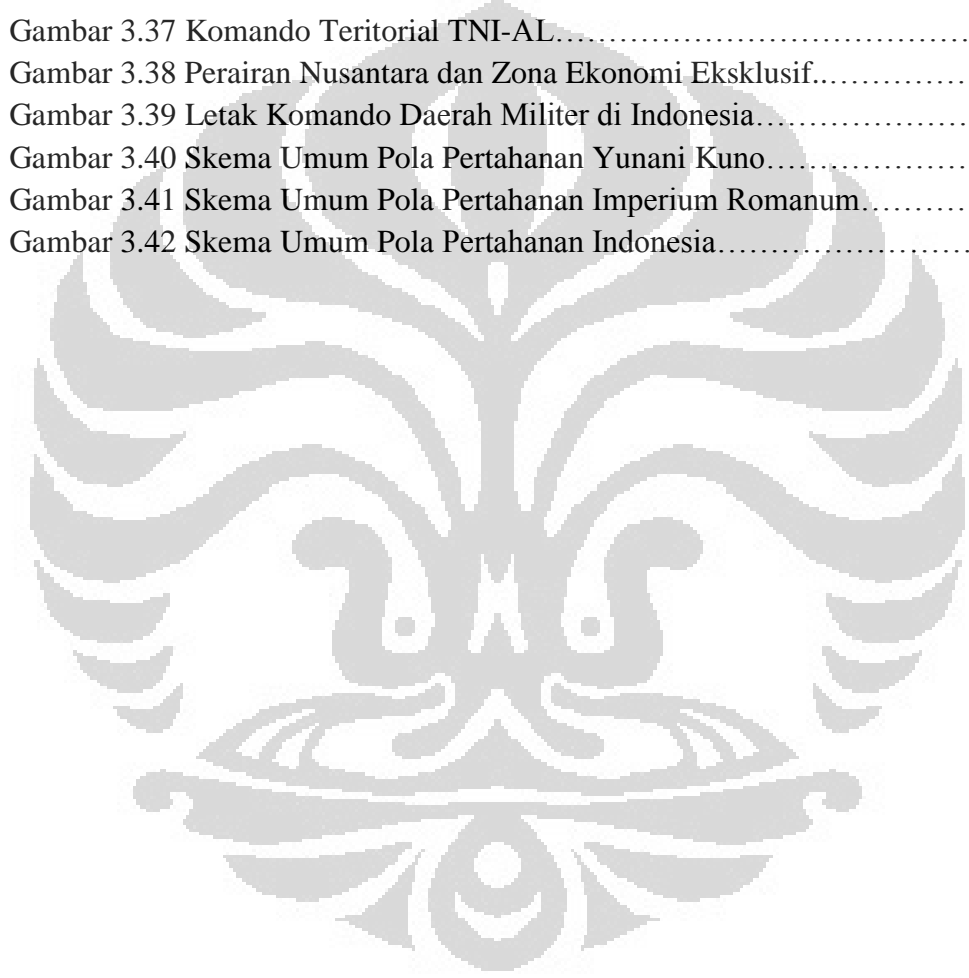
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penulisan	2
1.3 Teknik Penulisan	3
1.6 Manfaat Penulisan	3
1.7 Urutan Penulisan	3
1.8 Kerangka Berpikir	4
2. ARSITEKTUR DAN PERTAHANAN NEGARA	
2.1 <i>Architectura Militaris</i>	6
2.2 Pengelompokan Geopolitik Negara	9
2.2.1 Negara-Kota	11
2.2.2 Negara-Imperialis	13
2.1.3 Negara-Bangsa	15
2.3 Kota Sebagai Pusat Pemerintahan Negara	16
2.3.1 Awal Peradaban Urban	16
2.3.2 Definisi Kota	19
3. POLA SPASIAL PERTAHANAN NEGARA	
3.1 Rasa Aman Ruang dan Kekuasaan	23
3.1.1 Tingkah Laku Manusia	23
3.1.2 Kebutuhan Manusia Sebagai Motif	25
3.1.3 Teritorium	27
3.1.4 Kuasa	29
3.1.5 Rangkuman	34
3.2 Ancaman bagi Negara	34
3.2.1 Ancaman dari Dalam	36
3.2.2 Ancaman dari Luar	37
3.2.3 Rangkuman	38
3.3 Pertahanan Negara	38
3.3.1 Definisi Pertahanan	38
3.3.2 Pengawasan sebagai Bentuk Pertahanan Negara	39

3.3.3 Perkembangan Pertahanan Negara	41
3.3.4 Rangkuman	45
3.4 Arsitektur Pertahanan Negara	46
3.5 Pola Spasial Pertahanan Negara	51
3.5.1 Pola Spasial Pertahanan Negara Yunani Kuno Sebagai Negara-Kota	52
3.5.1.1 Keadaan Geografi Yunani Kuno	52
3.5.1.2 Keadaan Politik Yunani Kuno	54
3.5.1.3 <i>Polis</i> Sebagai Bentuk Negara-Kota Yunani Kuno	56
3.5.1.4 Pola Spasial Pertahanan Yunani Kuno	60
3.5.2 Pola Spasial Pertahanan <i>Imperium Romanum</i> Sebagai Negara-Imperialis	67
3.5.2.1 Menuju <i>Imperium Romanum</i>	67
3.5.2.2 Kondisi Urban-Rural Romawi	70
3.5.2.3 Keadaan Politik <i>Imperium Romanum</i>	72
3.5.2.4 Pola Spasial Pertahanan <i>Imperium Romanum</i>	75
3.5.3 Pola Spasial Pertahanan Indonesia Sebagai Negara-Bangsa	79
3.5.3.1 Keadaan Geografi Indonesia	79
3.5.3.2 Keadaan Politik Indonesia	80
3.5.3.3 Pola Spasial Pertahanan Indonesia	81
3.5.4 Rangkuman	85
4. KESIMPULAN	89
DAFTAR REFERENSI	91

DAFTAR GAMBAR

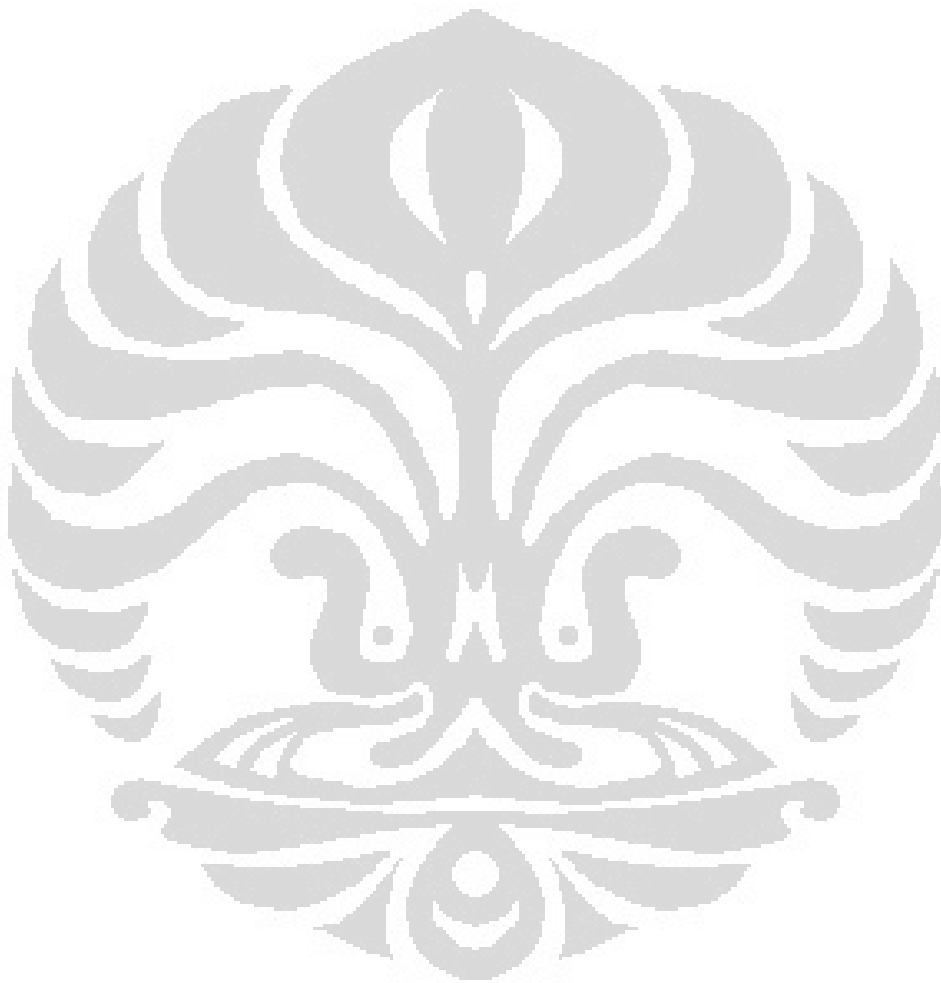
Gambar 2.1. Pengelompokan Negara-Kota di Eropa dan Mediterraneanian.....	12
Gambar 2.2 Skema Waktu Keberadaan Tujuh Peradaban Pertama di Dunia.....	18
Gambar 2.3 Perkiraan Lokasi Kemunculan Peradaban Pertama di Dunia.....	18
Gambar 2.4 Patung Tyche Memakai Mahkota Dinding Kota	21
Gambar 3.1 Model Pengelompokan Tingkah Laku Manusia	23
Gambar 3.2. Tiga Kebutuhan Spasial Manusia.....	26
Gambar 3.3 Skema Ancaman Terhadap Negara.....	36
Gambar 3.4 Gerbang Agora Roma di tahun 1762	36
Gambar 3.5 Gerbang Boubounistra, Athena di Tahun 1819.....	36
Gambar 3.6 Fungsi Teritorial TNI pada Berbagai Level Pemerintahan.....	40
Gambar 3.7 Bastioned Wall di Kota Turin.....	42
Gambar 3.8 Perkembangan Dinding Kota.....	44
Gambar 3.9 Dinding Perbatasan Antara Amerika Serikat dengan Meksiko.....	47
Gambar 3.10 Parade Pasukan di Palace Square di St. Petersburg.....	47
Gambar 3.11 Champ d' Mars di Prancis.....	48
Gambar 3.12 Bunker LW10 di Belgia.....	48
Gambar 3.13 Elemen Arsitektural yang Digunakan Sebagai Elemen Pertahanan di Muka Jalan.....	49
Gambar 3.14 Penataan Federal Triangle di Amerika Serikat dengan Elemen Arsitektur Pertahanan Kota.....	50
Gambar 3.15 Penggunaan Elemen Jalan yang Telah Diperkeras di Federal Triangle.....	50
Gambar 3.16 Denah Bagian Federal Triangle.....	51
Gambar 3.17 Tampak Tipikal dan Potongan Tipikal Federal Triangle.....	51
Gambar 3.18 Peta Negara-Kota di Yunani Kuno Menunjukkan Keadaan Geografi Yunani yang Dipenuhi Pegunungan.....	52
Gambar 3.19 Fresko Karya Ambrogio Lorenzetti Menggambarkan Dinding Kota Memisahkan Area Urban dan Rural.....	53
Gambar 3.20 Acropolis Yunani.....	62
Gambar 3.21 Denah dan Perspektif Acropolis.....	63
Gambar 3.22 Interpretasi A. Zippelius Mengenai Kota Priene yang Dikelilingi Dinding Kota.....	64
Gambar 3.23 Dinding Pertahanan Themistocles di Athens.....	65
Gambar 3.24 Perbandingan Lokasi Athens dan Sparta.....	67
Gambar 3.25 Sisi Koin Perak Didrachem Menggambarkan Legenda Serigala Menyusui Kembar Romulus dan Remus.....	68
Gambar 3.26 Perluasan Kekuasaan Romawi Sebelum Perang Punic.....	69

Gambar 3.27 Daerah Kekuasaan Romawi pada Tahun 1 SM.....	70
Gambar 3.28 Daerah Kekuasaan Romawi pada Tahun 117 M.....	70
Gambar 3.29 Pemisahan Imperium Romanum Menjadi Dua Bagian.....	74
Gambar 3.30 Patung yang Menggambarkan Sistem Tetrarchy.....	75
Gambar 3.31 Hadrian Wall di Pulau Inggris.....	75
Gambar 3.32 Pola Dinding Pertahanan Kota Roma.....	76
Gambar 3.33 Denah Tipikal Castra.....	78
Gambar 3.34 Letak Indonesia dalam Peta Dunia.....	79
Gambar 3.35 Peta Indonesia.....	80
Gambar 3.36 Order of Battle dari TNI-AU.....	82
Gambar 3.37 Komando Teritorial TNI-AL.....	83
Gambar 3.38 Perairan Nusantara dan Zona Ekonomi Eksklusif.....	84
Gambar 3.39 Letak Komando Daerah Militer di Indonesia.....	84
Gambar 3.40 Skema Umum Pola Pertahanan Yunani Kuno.....	86
Gambar 3.41 Skema Umum Pola Pertahanan Imperium Romanum.....	87
Gambar 3.42 Skema Umum Pola Pertahanan Indonesia.....	88



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Slide Presentasi Sidang	95
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara merupakan suatu entitas yang dapat dilihat pola spasialnya. Hal paling sederhana dari pola spasial negara yang ada di dunia adalah garis perbatasan negara pada peta yang menunjukkan wilayah suatu negara tertentu. Tentunya, pada kenyataannya, garis batas ini tidak benar-benar ada. Meskipun pada beberapa kasus garis batas ini nyata dalam bentuk dinding dan pos perbatasan, pada masa kini negara tidak lagi dikelilingi dinding seperti negara di masa lalu.

Arsitektur sebagai ilmu yang meninjau ruang memiliki kaitan dengan pertahanan negara. Arsitektur yang kini dianggap lebih dekat dengan kedamaian sesungguhnya memiliki kaitan dengan masa-masa ketegangan yang dialami manusia seperti perang. Pada zaman dahulu, seseorang yang pada masa kini disebut arsitek memiliki tugas ganda dalam bidang *architectura militaris* dan *architectura civilis*. Hal ini menunjukkan bahwa pertahanan negara dapat ditinjau dari bidang ilmu arsitektur.

Ketiadaan dinding kota seperti masa lalu menimbulkan sebuah pertanyaan, bagaimana bisa negara yang dulunya membutuhkan dinding pertahanan untuk melindungi perangkat negara di dalamnya melindungi dirinya di masa sekarang yang teknologi senjatanya lebih maju dibandingkan zaman dahulu? Ketiadaan dinding kota merupakan salah satu imbas dari perkembangan geopolitik negara, yang dulunya suatu kota adalah negara. Kini, negara terdiri dari puluhan bahkan ratusan kota, sehingga keberadaan dinding di tiap kota tidaklah menjadi pilihan yang tepat untuk mendorong keberlangsungan suatu negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan, seperti apakah pola spasial yang terbentuk dari masing-masing tipe geopolitik tersebut?

Melihat pertahanan negara dari sudut pandang arsitektur tentunya dapat membantu untuk memahami pola spasial yang terbentuk dari masing-masing tipe geopolitik. Mengetahui bagaimana arsitektur diimplementasikan dalam pertahanan negara tentunya dibutuhkan sebelum masuk ke pembahasan pola spasial pertahanan yang membahas pertahanan secara garis besar.

Berbicara mengenai pertahanan negara, tidak dapat dilepaskan dari militer sebagai aparatur negara yang bertanggung jawab untuk menangkal ancaman dari luar. Sehingga, pembahasan pertahanan negara tidak dapat terlepas dari kuasa (*power*). Pembahasan mengenai kuasa dibutuhkan untuk melihat bagaimanakah pengaruh tipe geopolitik tertentu terhadap penggunaan militer untuk melindungi negara dari ancaman luar.

Pada masa kini, tidak dapat disangkal bahwa ancaman (*threat*) dari dalam yang dapat mempengaruhi stabilitas negara semakin sering terjadi di seluruh dunia. Berbagai gerakan seperti gerakan separatis dan terorisme merupakan ancaman dari dalam yang semakin menjadi perhatian dunia setelah peristiwa 11 September di Amerika. Keberadaan ancaman dari dalam membuat pertahanan negara tidak hanya dipusatkan pada garis perbatasan namun juga pada titik-titik penting dalam suatu negara. Pembahasan mengenai ancaman bagi negara merupakan bagian penting untuk melihat pola spasial pertahanan negara.

Dengan membahas tipe geopolitik negara, ancaman bagi negara, kuasa dan implementasi arsitektur dalam pertahanan negara diharapkan pola spasial pertahanan negara dapat terlihat, sehingga dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertahanan negara.

1.2 Rumusan Masalah

Pertanyaan utama dari skripsi ini adalah **seperti apakah pola spasial pertahanan negara berdasarkan tipe geopolitik?** Berdasarkan pertanyaan utama tersebut, muncul pertanyaan lainnya yang dapat membantu menjawab pertanyaan tersebut:

- Bagaimana pengaruh arsitektur pada pertahanan negaraa?
- Bagaimana bentuk pertahanan negara yang telah ada selama ini?
- Apa saja karakteristik dari bentuk pertahanan negara pada tipe geopolitik tertentu?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui pola spasial yang terdapat pada setiap tipe geopolitik negara dan melihat kaitan antara arsitektur, negara,

politik, teritorium, kuasa dan ancaman terhadap negara terhadap pertahanan negara.

1.4 Teknik Penulisan

Skripsi ini dibuat dengan cara mengumpulkan berbagai referensi yang dapat menjawab pertanyaan dari topik skripsi ini baik melalui referensi bacaan maupun media elektronik lainnya.

1.5 Manfaat Penulisan

Skripsi ini memberikan manfaat pada pembaca untuk mengerti lebih dalam bagaimana tipe geopolitik dari suatu negara dapat mempengaruhi pertahanan negara tersebut, dimana dapat dilihat suatu pola spasial yang terbentuk dari masing-masing tipe geopolitik yang dianut suatu negara.

1.6 Urutan Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 yaitu bab 1 berjudul Pendahuluan, Bab 2 berjudul Arsitektur dan Pertahanan Negara, Bab 3 berjudul Pola Spasial Pertahanan Negara dan Bab 4 berjudul Kesimpulan.

Bab 1 berisi latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat untuk memudahkan pembaca untuk menangkap pertanyaan yang coba dijawab melalui tulisan ini. Bab ini juga memuat Tujuan Penulisan, Teknik Penulisan, Manfaat Penulisan, Urutan Penulisan dan Kerangka Pemikiran.

Bab 2 berisi pembahasan teori mengenai *architectura militaris*, tipe geopolitik negara dan teori mengenai kota yang merupakan pusat dari negara. Dua subbab dalam bab ini diharapkan dapat memberikan dasar teori yang dapat memberikan gambaran mengenai hubungan arsitektur dengan pertahanan negara, tipe geopolitik negara yang menjadi sudut pandang tulisan ini dalam melihat pertahanan negara dan memberikan gambaran bahwa pembahasan mengenai negara tidak dapat dilepaskan dari kota karena negara terdiri dari satu atau lebih kota.

Bab 3 berisi pembahasan aspek spasial yang berhubungan dengan pertahanan negara dan analisis pola spasial pada studi kasus dari negara yang

termasuk tipe geopolitik tertentu. Setiap subbab dari bab ini menjawab pertanyaan yang terdapat dari bab ini dipisahkan menjadi empat subbab, dimana dua subbab pertama menjawab hubungan faktor kuasa dan ancaman terhadap negara pada pertahanan negara. Subbab ketiga menjawab bagaimana bentuk pertahanan negara yang telah ada selama ini, sementara subbab keempat dan kelima menjawab pertanyaan besar dari tulisan ini mengenai seperti apa pengaruh arsitektur pada pertahanan negara dan pola spasial pertahanan negara pada tiap tipe geopolitik negara tertentu.

Bab terakhir adalah Bab 4 yang berisi hasil akhir pemikiran penulis dari bab-bab yang telah dibahas. Bab ini menjadi jawaban dari pertanyaan yang diajukan di Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah yang terdapat di Bab 1.

1.7 Kerangka Berpikir

LATAR BELAKANG



TOPIK

Pertahanan Negara: Arsitektur dan Pola Spasialnya



PERTANYAAN

Bagaimana pengaruh arsitektur terhadap pertahanan negara dan bentuk pola spasial pertahanan negara dari negara yang termasuk dalam tipe geopolitik negara tertentu?



TUJUAN PENULISAN

Mengetahui pengaruh arsitektur terhadap pertahanan negara dan mengetahui pola spasial pertahanan negara pada tiap tipe geopolitik negara.



UNIVERSITAS INDONESIA

METODE PEMBAHASAN

Arsitektur dan Pertahanan Negara : Penjelasan mengenai *architectura militaris*, teori tipe geopolitik negara dan teori mengenai kota dan peradaban urban.

Pola Spasial Pertahanan Negara : Deskripsi pengaruh tipe geopolitik negara terhadap pola pertahanan negara beserta deskripsi pengaruh arsitektur dalam pertahanan negara dan deskripsi dari faktor kuasa dan ancaman terhadap negara. Pola spasial pertahanan negara didapat dengan studi kasus negara yang termasuk dalam tiap tipe geopolitik negara.



KESIMPULAN

Diambil dari permasalahan, teori dan analisis permasalahan yang dibahas, sebagai jawaban pertanyaan skripsi.

BAB 2

ARSITEKTUR DAN PERTAHANAN NEGARA

2.1 *Architectura Militaris*

Arsitektur merupakan ilmu yang meninjau ruang. Arsitek masa kini sebagai praktisi arsitektur mengalami perubahan ranah tanggung jawab jika dibandingkan dengan masa lalu. Menurut Neumann (1988) sebagaimana dikutip oleh Trüby (2008, h.32), hingga abad ke 15 arsitek memiliki dua tanggung jawab dalam ranah *architectura militaris* dan *architectura civilis*. *Architectura militaris* adalah ranah yang berkaitan dengan perang dan pertahanan negara. Merancang senjata maupun strategi agresi militer merupakan ranah *architectura militaris* selain tentunya merancang produk arsitektur yang dapat bertahan dari serangan musuh. Sementara, *architectura civilis* merupakan ranah yang berhubungan dengan berbagai produk arsitektur yang berhubungan langsung dengan penduduk, misalnya kuil pemujaan ataupun rumah tinggal.

Pembahasan mengenai *architectura militaris* bertujuan untuk menunjukkan bagaimana dunia arsitektur bukanlah dunia yang jauh dari dunia pertahanan dan militer. Menurut Trüby (2008), hingga awal abad ke 18 kedua bentuk dari arsitektur tersebut dipegang oleh seseorang yang berperan ganda sebagai *master builder* dan *engineer*. Keberadaan *architectura militaris* ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari perang. Arsitektur yang seringkali dikaitkan dengan kedamaian sesungguhnya adalah bagian dari *architectura civilis*. Hal ini mungkin terkesan kontradiktif, karena perang merupakan salah satu penyebab dari hancurnya suatu bangunan, namun tidak dapat disangkal, bahwa keberadaan perang adalah salah satu pembentuk arsitektur. Pernyataan ini sesuai dengan pernyataan Trüby:

“This may well seem initially puzzling. War as the constructor of architecture? Is not war much more the destroyer of the same? Is not architecture fundamentally a peaceful activity? Doesn't it mean well with us – warmth and a roof over our heads? We are not dealing with bellicosity nor are we concerned here with disproving the glad and obvious tidings that there is nothing beneficial about wars. But it refers to the realization that architectonic evolution is inseparable from thrusts of

innovation caused by war, new weapon technology and poststress achievements in codification. War is just as omnipresent in the pre-modern treatises on columns as in the modern standardization of building. It is just as present in the aesthetics of stealth and camouflage as in the always-happy-to-reconstruct terrains of the "Methuselah plot"¹." (2008, h. 21-22)

Pernyataan di atas mempertegas hubungan antara arsitektur dengan perang, yang nantinya akan membawa kita ke *architectura militaris* yang berkaitan erat dengan pertahanan negara.

Pada masa sebelum abad ke 17, *decorum* sebagai standar kepantasan dari elemen arsitektur memperlihatkan bagaimana kaitan erat antara arsitektur dengan perang yang terjalin lewat *architectura militaris*. *Decorum* merupakan istilah yang merujuk pada peringkat kepantasan (*ranking of appropriateness*). Pada budaya retorik di masa lampau, peringkat dari kepantasan disebut sebagai *decorum* dan dibagi menjadi dua, yaitu *elevated style* (Greek: *hypsos*; Latin: *sublimis*) dan *humble style* (Greek: *tapeinos*; Latin: *humilis*). Budaya retorik yang dimaksud disini merujuk pada kebiasaan retorik dari budaya barat. Menurut Mühlmann (2008), sistem retorik menawarkan pengertian kepada struktur organisasi, tempat suatu budaya berada. Mühlmann (2008) menjelaskan bahwa komunikasi memiliki dua jalur, yaitu *objective channel* dan *display channel*. *Objective channel* adalah keadaan dimana informasi berpindah antara penerima dan pemberi, sementara *display channel* adalah keadaan dimana pengamat diluar menangkap informasi. *Objective channel* membutuhkan semantik dan tidak menimbulkan efek ambigu, sehingga biasanya *objective channel* digunakan sebagai bentuk bahasa yang mengacu pada kenyataan, sehingga keakuratan menjadi sesuatu yang mutlak bagi *objective channel*. Sementara, *display channel* bergantung pada cara penyampaiannya, sehingga kepantasan menjadi ciri dari *display channel*. Pembagian komunikasi menjadi dua hal ini dikenal sebagai sistem retorik (Mühlmann, 2008, h. 1-2).

¹ *Methuselah plot* adalah istilah yang digunakan penerjemah untuk merujuk pada kata *Das Methusalemkom-plott* yang digunakan jurnalis Jerman, Frank Schirrmacher, pada bukunya yang berjudul *Die Macht des Alterns*. Buku ini membahas fenomena sosial jurang antar generasi.

Elevated style hanya boleh digunakan pada kondisi yang berkaitan dengan kedaulatan negara, keadaan yang berkaitan dengan perang dan nasib para tentaranya, sementara *humble style* berkaitan dengan ekonomi, juga berbagai hal yang berada dalam lingkup hiburan dan cinta (Mühlmann, 2008, h. 3-4). Pengklasifikasian ini nantinya akan berujung pada peringkat, dimana apa yang dianggap sebagai peringkat atas dan peringkat bawah adalah proses adaptasi dari apa yang dilakukan oleh nenek moyang suatu kebudayaan.

Trüby (2008) mengambil contoh *Imperium Romanum* yang memiliki kaitan erat dengan perang karena merupakan negara-imperialis yang terus-menerus memperluas daerah kekuasaannya. Pada *Imperium Romanum*, *decorum* ditentukan oleh *ornamentum* dari suatu bangunan. *Ornamentum* terbaik terdapat pada bangunan yang memiliki andil besar dalam perang, seperti kuil pemujaan dewa. Dari sini, peringkat *decorum* ditentukan oleh perang. Bangunan mana yang dianggap paling mempengaruhi kemenangan perang, memiliki peringkat tertinggi dibandingkan bangunan lainnya sehingga bangunan tersebut memiliki *ornamentum* terbaik dibandingkan bangunan lain. Pengecualian berlaku pada dinding kota yang tidak memiliki *ornamentum* apapun namun dianggap memiliki peringkat *decorum* teratas, dikarenakan keberadaannya yang melindungi kota beserta segala bangunan yang terdapat di dalamnya. Keberadaan dinding kota lah yang memungkinkan bangunan lain tetap berdiri sehingga pemberian peringkat dari segi keindahan dimungkinkan.

Pengaruh *decorum* mulai berkurang sedikit demi sedikit pada abad ke 17. Kelahiran negara modern pada abad ke 17 yang menandai kedamaian teritorial (*territorial pacification*) dan keindahan sebagai bidang filosofis yang kemudian berdiri sendiri pada abad ke 18 merupakan penyebabnya (Trüby, 2008, h. 31-32). Tapal batas negara yang semula menjadi garis demarkasi antara perang dan damai lama-kelamaan menjadi kehilangan fungsinya dikarenakan keunggulan militer yang dimiliki negara-negara tertentu. Keunggulan ini muncul atas respon dari inovasi balistik, seperti misalnya munculnya artileri. Hal ini menyebabkan apa yang disebut sebagai ‘*war of the engineers*’ pada abad ke 18 dan abad ke 19. Menurut Neumann (1988) masa tersebut memisahkan fungsi *architectura militaris* dari peran seorang arsitek sebagaimana dikutip oleh Trüby:

*“From then on, the most technically advanced engineers had the safeguarding of borders in their sights while the architect mainly had the peaceful interior of the state’s territory in theirs. By 16th century the construction of fortifications had become an area for specialists and by the early 17th century differences can be found between the engineer responsible for *architectura militaris* and the architect entirely devoted to *architectura civilis*.”* (Trüby, 2008, h. 32)

Trüby (2008) menambahkan bahwa hingga awal abad ke 18 kedua bentuk dari arsitektur, yaitu *architectura militaris* dan *architectura civilis* dipegang oleh seseorang yang berperan sebagai *master builder* dan *engineer*.

Ranah *architectura militaris* yang tidak lagi menjadi tanggung jawab arsitek menimbulkan kesan bahwa arsitektur dan perang adalah dua hal yang berlawanan. Namun kenyataannya, arsitektur terbentuk dari kondisi ketegangan seperti perang. Hal ini menyebabkan pertahanan negara bukanlah hal yang terlepas sama sekali dari dunia arsitektur.

2.2 Pengelompokan Geopolitik Negara

Istilah geopolitik pertama kali dikemukakan oleh Rudolf Kjellén di tahun 1899 yang digunakan untuk menunjukkan teritorium dari negara dan aspek geografis dari pemerintahan. Istilah ini biasa digunakan untuk menunjukkan hubungan antara negara, geografi dan militer. Menurut Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary, *geopolitics*, kata benda, memiliki definisi sebagai berikut:

“1: a study of the influence of such factors as geography, economics, and demography on the politics and especially the foreign policy of a state

2: a governmental policy guided by geopolitics

3: a combination of political and geographic factors relating to something (as a state or particular resources).” (1991, h. 513)

Sementara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, geopolitik memiliki makna: *“1 ilmu tt pengaruh faktor geografi thd ketatanegaraan; 2 kebijaksanaan negara atau bangsa sesuai dng posisi geografisnya.”* (1999, h. 311)

Melihat berbagai definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa istilah tipe geopolitik memiliki makna pengelompokan suatu negara berdasarkan faktor geografis dan faktor politik.

Tipe geopolitik berhubungan dengan negara, sehingga perlu dimengerti makna dari negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia negara memiliki makna:

*“1 organisasi di suatu wilayah yg mempunyai kekuasaan tertinggi yg sah dan ditaati oleh rakyat;
2 kelompok sosial yg menduduki wilayah atau daerah tertentu yg diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yg efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.”* (1999, h. 685)

Orum dan Xiangming menerangkan istilah *state* sebagai:

“The term commonly used by European social theorist to refer to the various political agencies and arms that empowered to control and regulate the activities of the population. Typically it include the government, the military and the judiciary. In the work of Karl Max, the state plays a critical role, largely as a means through which the dominant social class, the bourgeoisie, secured its power over the rest of society. While the treaty of Westphalia in 1648 marked the origin of the modern state, the first modern states in Europe did not come into existence until the nineteenth century.” (2003, h. 170-171)

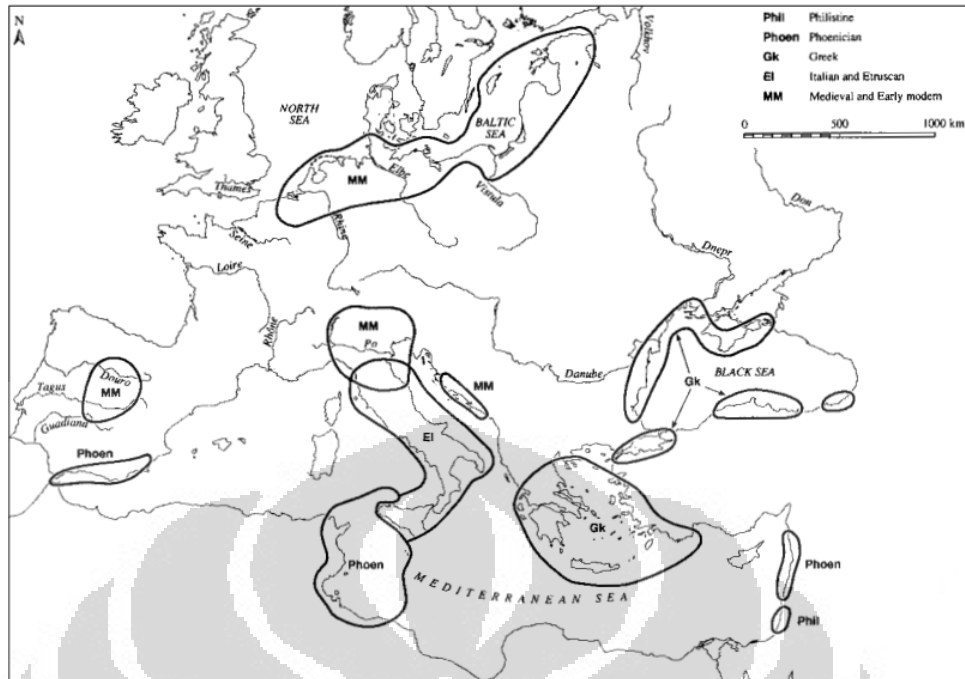
Dari pengertian-pengertian tersebut, maka istilah negara yang digunakan selanjutnya akan merujuk pada suatu entitas politik yang mengendalikan dan mengatur kegiatan di suatu populasi tertentu, yang sekurang-kurangnya memiliki pemerintah (*government*), militer dan penegak hukum.

Tipe geopolitik negara mengelompokkan negara berdasarkan faktor politik dan faktor geografis yang terdapat di sebuah negara. Hal ini memperlihatkan bagaimana dua faktor tersebut sangat berpengaruh bagi negara. Garis-garis tidak beraturan yang memperlihatkan batas suatu negara pada peta menunjukkan bagaimana faktor geografis dan politik dapat dipetakan. Hal ini menjadi penting karena salah satu hal yang menjadikan suatu negara diakui keberadaannya adalah

kedaulatan. Parker (2004) membagi negara menjadi tiga kelompok melalui tipe geopolitik, yaitu negara-kota (*city-state*), negara-imperialis (*empire-state*) dan negara-bangsa (*nation-state*). Menurut Parker (2004) terdapat satu tipe geopolitik lagi yang berisi negara-negara yang tidak termasuk diantara ketiga tipe geopolitik tersebut. Ketiga tipe geopolitik ini muncul seiring zaman dan memiliki ciri masing-masing. Pada masa awal peradaban, tipe geopolitik negara yang muncul adalah negara yang mengadopsi sistem negara-kota dengan berbagai variasinya. Negara-imperialis adalah bentuk geopolitik yang muncul pada masa yang hampir sama dengan sistem negara-kota. Terakhir, di masa sekarang ini, sistem negara-bangsa lah yang kebanyakan membentuk apa yang tergambar di peta masa kini.

2.2.1 Negara-Kota

Negara kota merupakan kota yang memiliki fungsi seperti negara, tidak memiliki ketergantungan dengan kota lainnya atau memiliki kebebasan dalam setiap hal ihwal urusannya. Hal ini menjadikan pada masa sekarang, negara-kota dapat memiliki status negara-kota berdaulat (*sovereign city-state*) maupun negara kota tidak berdaulat (*non sovereign city-state*). Negara-kota pertama pertama kali berdiri dibagian timur Mediterania dan terus menyebar hingga batas timur Laut Hitam dan beberapa bagian dari Timur Tengah. Penyebaran di luar area Mediterania pada abad pertengahan (*middle ages*) dan awal era modern terjadi di sisi timur eropa, sebagaimana yang tergambar dalam gambar 2.1.



Keterangan:

Phil: Philistine; Phoen: Phoenician; Gk: Greek; El: Italian and Etruscan;
MM: Medieval dan *Early Modern*

Gambar 2.1 Pengelompokan Negara-Kota di Eropa dan Mediterranean

Sumber: Geoffrey Parker, *Sovereign City: The City-State Ancient and Modern*, 2004, h. 11

Negara-kota pertama di dunia muncul di Mediterania karena keberadaan kondisi geopolitik yang mendukung. Kaum Philistine dianggap sebagai kaum pertama yang menggunakan sistem negara-kota. Kaum Philistine menempati pesisir timur dari Mediterania dengan kota-kota seperti Gaza, Gath, Ashkelon dan Ashdod yang berlokasi sangat dekat dengan pantai. Kota-kota Philistine kemudian membentuk sejenis federasi yang berbasis gerakan militer untuk melawan musuh bersama, terutama sejak adanya konflik berkepanjangan dengan kaum Israelite. Pada akhir *millennium* pertama sebelum masehi, kota-kota di Philistine sebagai negara-kota pertama di dunia jatuh pada kekuasaan Raja Daud (*King David*) yang memerintah dengan sistem imperialis. Pada masa yang sama, di sebelah utara dari koloni Philistine ditinggali oleh kaum Phoenician yang juga menggunakan sistem negara-kota seperti pada gambar 2.1. Kota-kota yang penting dari kaum Phoenician pada masa itu adalah Acco, Achzib, Tyre, Sidon dan Byblos. Sama seperti Philistine, kota-kota Phoenician juga memiliki sistem federasi militer yang

sama, namun lebih kuat sehingga tidak jatuh dalam kekuasaan Raja Daud maupun Raja Sulaiman (*King Solomon*).

Menurut Parker (2004), Laut Mediterania sangatlah ideal untuk perkembangan teknologi maritim. Selain itu, di kawasan Mediterania kebutuhan akan perkembangan ekonomi mendesak, dikarenakan pada tiap area tertentu, sumber daya alam yang dimiliki terbatas sehingga mendorong terjadinya perdagangan maritim, yang tiap area sebelumnya berjalan sendiri-sendiri berkembang mencapai kemakmuran. Hal ini melahirkan berbagai inovasi untuk mendukung kemakmuran seperti pembangunan kapal, kemampuan navigasi dan manufaktur, yang menandai kemajuan ilmu pengetahuan. Fenomena ini diamati oleh Mumford (1975) yang mengambil kesimpulan bahwa sejak awal peradaban (*civilization*), kota menyediakan lingkungan yang ideal untuk kelahiran inovasi (Parker, 2004, h. 21). Hal ini terbukti, karena pada kenyataannya perkembangan inovasi pada masa itu ternyata sulit untuk dilakukan pada negara yang memiliki teritorium lebih besar dari negara-kota, dikarenakan, kontrol di pusat menghambat munculnya inovasi. Apa yang kaum Phoenician lakukan membuktikan untuk pertama kalinya bahwa keberhasilan ekonomi dengan segala inovasi yang mendukungnya terjadi saat kota menjadi suatu entitas yang berdiri sendiri tanpa adanya campur tangan dari luar (Parker, 2004, h. 21).

Menurut Parker (2004), sistem negara-kota lahir dari pemikiran bahwa perdagangan maritim dapat menjadi jawaban dari masalah kemiskinan dan perdagangan maritim ini membutuhkan sebuah sistem politik yang dapat memastikan hal ini dapat berjalan seefektif mungkin tanpa adanya campur tangan dari luar. Kesadaran ini pada akhirnya membuat suatu negara-kota menjadi cukup kuat untuk mempertahankan kedaulatannya karena inovasi yang timbul membuat semua sumber daya yang ada dapat digunakan dan dikembangkan seoptimal mungkin.

2.2.2 Negara-Imperialis

Negara Imperialis muncul sebagai hasil dari ekspansi teritorium dalam skala besar oleh bangsa atau sekelompok orang tertentu. Ekspansi ini biasanya

terjadi karena pemimpin negara tersebut menginginkan kekuasaan yang lebih besar dan mencapainya dengan cara memanfaatkan rasa tidak puas rakyatnya, mendorong rakyatnya melihat negara lain sebagai mangsa potensial (Parker, 2004, h. 10). Hal ini menjadikan negara-imperialis mengekspansi suatu teritorium dengan jalan kekerasan untuk memaksakan suatu struktur yang dapat mempertahankan kekuasaan mereka. Prinsip negara-imperialis adalah dominasi kelompok tertentu kepada yang lainnya. Dominasi ini digabungkan kedalam struktur politik yang pusatnya adalah kelompok yang mendominasi. Hal ini akan berevolusi menjadi struktur pusat-pinggiran (*core-periphery*) seperti yang ada pada negara-bangsa, hanya saja pada skala yang lebih besar (Parker, 2004, h. 10).

Negara-imperialis yang paling terkenal, sehingga menjadi asal muasal dari nama tipe geopolitik ini adalah *Imperium Romanum* yang sekitar 2000 tahun yang lalu menguasai Eropa dan Mediterania. Pada masa yang hampir bersamaan, Dinasti Han dari China dan Dinasti Mauryan dari India merupakan contoh fenomena dari negara-imperialis. Keturunan dari Dinasti Han dapat menyatukan China hingga 2000 tahun kemudian, dan Dinasti Mauryan, meskipun sebentar, dapat memegang kendali seluruh subbenua India dalam sistem negara-imperialis, suatu kondisi yang menurut Parker sangat jarang terjadi (2004). Menurut Parker (1988) Kekaisaran Rusia merupakan salah satu contoh dari negara-imperialis, yang setelah revolusi tahun 1917, Kekaisaran Rusia jatuh dan digantikan oleh Uni Soviet yang masih memiliki karakteristik geopolitik dari negara-imperialis yang pada masa itu, tidak cocok dengan semangat politik negara-bangsa yang dianut oleh kebanyakan negara di dunia (Parker, 2004, h. 10-11). Kejatuhan Uni Soviet pada awal tahun 1990-an membuat bagian-bagian dari Uni Soviet akhirnya mendeklarasikan dirinya menjadi negara-bangsa yang salah satunya adalah Federasi Rusia. Namun, meskipun Federasi Rusia memiliki karakteristik negara-bangsa yang akan dibahas pada subbab selanjutnya, Federasi Rusia masih terdiri dari penduduk non-Rusia yang menginginkan status independen, terlepas dari Federasi Rusia, hal ini menunjukkan bagaimana Federasi Rusia masih memiliki karakteristik dari negara-imperialis.

2.2.3 Negara-Bangsa

Menurut Horsman dan Marshall (1994), prinsip dasar dari negara-bangsa adalah keberadaan, atau keinginan menuju homogenitas dalam batas negara tersebut. Homogenitas yang dimaksud di sini dapat berupa bahasa, budaya dan sejarah, maupun sekaligus ketiga hal tersebut sehingga sesuai dengan istilah bangsa (Parker, 2004, p.8). Karena kata bangsa (*nation*) berasal dari bahasa latin *natio* yang berarti kelahiran atau asal mula, maka basis etnis yang sama termasuk bentuk dari negara-bangsa. Prinsip dasar ini menjadikan suatu bangsa akan melihat dirinya sebagai suatu entitas yang berbeda dari bangsa lainnya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Blache bahwa keberadaan dari 'kita' didefinisi melalui keberadaan 'mereka' (Parker, 2004, h. 8-9).

Ketika istilah bangsa merujuk pada manusia, maka istilah negara merujuk pada teritorium yang merupakan gabungan dari geografis fisik dan geografis manusia yang menciptakan suatu bentang tertentu yang memiliki karakteristik yang membuatnya disebut sebagai tanah air (*homeland*) yang merupakan ekspresi dari bangsa (Parker, 2004). Petty menganalogikan tanah air dengan tubuh manusia, yang merupakan 'jantung' yang memegang peranan penting dalam berjalannya negara (Parker, 2004, h.3). Sementara, bentang geografis yang berada di sekitar ibukota memiliki berbagai sumber daya yang menopang keberlangsungan negara. Hal ini membentuk struktur pusat-pinggiran (*core-periphery*) seperti pada negara-imperialis, dengan ibukota sebagai pusatnya dan bentang di sekeliling ibukota menjadi pinggiran. Tapal batas akan memisahkan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya dan berfungsi sebagai perlindungan dari serangan luar.

Menurut Parker (2004), idealnya negara-bangsa merupakan suatu entitas yang dapat berkelanjutan dan memiliki struktur internal yang dapat berdiri sendiri, sehingga mereka terpisah dengan negara lainnya secara fisik dan segala hubungan dengan negara tetangga diawasi dan dikendalikan dengan hati-hati. Sistem negara-bangsa berkembang sejak adanya Piagam Westphalia di tahun 1648 dan semakin menggerus kedua sistem geopolitik yang lain. Sistem negara-bangsa tidak seperti negara-kota, yang kepemilikannya dapat dengan mudahnya berpindah karena garis darah atau pernikahan silang antar negara yang berbeda.

Karena terdiri dari berbagai kota, negara-bangsa tentu saja cenderung lebih luas wilayahnya daripada negara-kota, namun seringkali tidak lebih luas dari negara-imperialis. Hal ini memberi wajah baru bagi sistem keamanan dan pertahanan negara, terutama bagi kota-kota yang vital fungsinya dalam suatu negara-bangsa.

2.3 Kota Sebagai Pusat Pemerintahan Negara

Tidak dapat dipungkiri bahwa kota adalah bagian yang penting dari suatu negara, apapun tipe geopolitik dari negara tersebut. Pada sistem negara-kota, kota menjadi pemeran utama yang mana kota tersebut dapat menjalankan fungsinya sebagai suatu negara. Sementara pada sistem negara-imperialis dan negara-bangsa, terdapat satu kota yang menjadi pusat dan berperan vital bagi keberlanjutan negara tersebut, yaitu ibukota negara. Karena negara tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kota, maka perlu dilihat bagaimana awal terbentuknya kota serta awal peradaban urban yang tumbuh di kota.

2.3.1 Awal Peradaban Urban

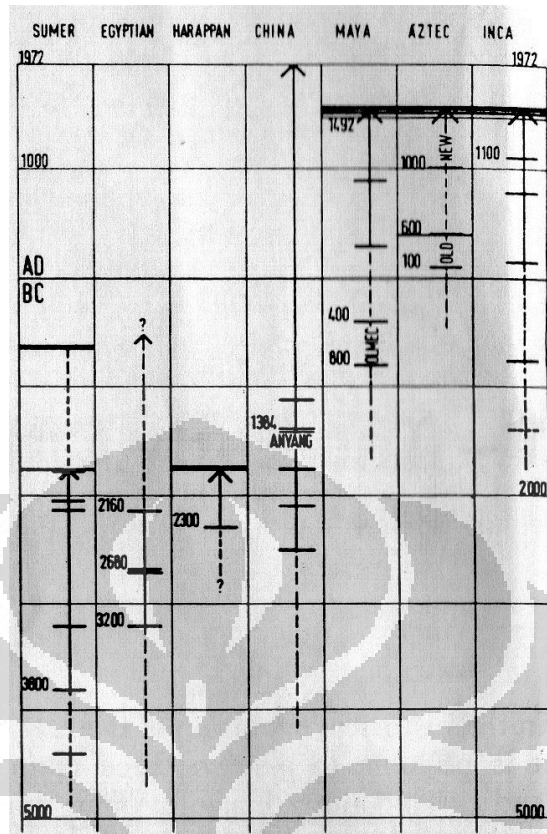
Membahas mengenai bagaimana sejarah sistem pertahanan dan keamanan kota tidak dapat dilepaskan dari sejarah peradaban (*civilization*) urban pertama di dunia dan kota yang menjadi tempat peradaban tersebut berdiri. Hal ini diperlukan untuk dapat menganalisis bagaimana perkembangan keamanan dan pertahanan kota dari sejak peradaban awal hingga masa sekarang. Kata *civilization* berasal dari bahasa latin *civitas* yang berarti kota (*city*). Definisi dari peradaban menurut Kluckhohn dari Morris (1994, h. 5) adalah: “*A society to be called civilized must have two of the following: town of upwards of 5000 people; a written language; and a monumental ceremonial centres.*” Definisi lain dari peradaban disebutkan juga oleh Gelb dalam Morris (1992, h. 5): “*Writing is of such importance that civilization cannot exist without it, and conversely, that writing cannot exist except in a civilization.*” Sementara Mumford (1938) mendefinisikan *civilization* sebagai “*the culture of cities*” (Parker, 2004, h. 18). Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya menulis merupakan titik yang penting dalam munculnya peradaban.

Morris (1994) menyebutkan bahwa perkembangan peradaban urban (*urban civilization*) dapat dilihat menjadi 3 fase utama. Menurut Childe (1964) masing-masing fase ini melingkupi:

“Radical and indeed revolutionary innovations in the economic sphere in the method whereby the most progressive societies secure a livelihood, each followed by such increases in population that, were reliable statistics available, each would be reflected by a conspicuous link in the population graph.” (Morris, 1994, h. 1)

Menurut Morris (1994), fase pertama berada pada zaman Palaeolithic yang berada sekitar 500.000 tahun yang lalu hingga 10.000 BC, fase kedua pada zaman Proto-Neolithic dan fase ketiga pada zaman Neolithic. Ketiga fase ini berlanjut dengan zaman Perunggu (*Bronze Age*) yang terbentuk sekitar 3500 hingga 3000 BC dan bertahan hingga 2000 tahun. Pada akhir periode zaman perunggu inilah, peradaban urban pertama kali muncul. Lokasi-lokasi dan waktu kemunculan peradaban pertama di dunia ini dapat dilihat pada gambar 2.2 dan gambar 2.3, sesuai dengan yang Daniel (1968) jelaskan mengenai keberadaan peradaban yang pertama di dunia:

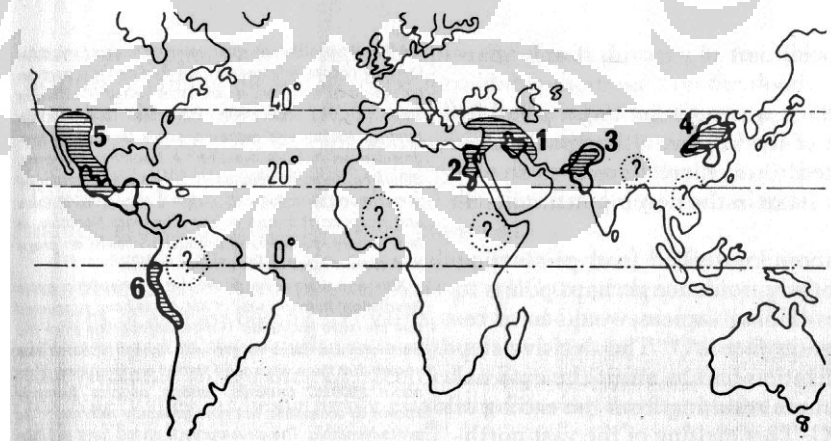
“We now believe that we know from archaeology the whereabouts and the whenabouts of the first civilizations of man- in southern Mesopotamia, in Egypt, in the Indus Valley, in the Yellow River in China, in the Valley of Mexico, in the jungles of Guatemala and Honduras, and highlands of Peru” (Morris, 1994, h. 1)



Gambar 2.2 Skema Waktu Keberadaan Tujuh Peradaban Pertama di Dunia

Sumber: A. E. J. Morris, History of urban form: before the industrial revolutions, 1994,

h.2



Gambar 2. 3 Perkiraan Lokasi Kemunculan Peradaban Pertama di Dunia

Sumber: A. E. J. Morris, History of urban form: before the industrial revolutions, 1994,

h.3

Menurut Morris (1994), Childe menggunakan istilah ‘*Urban Revolution*’

untuk menunjukkan transformasi yang terjadi antara tahun 3.500 SM hingga 3.000 SM dari pedesaan (*folk society village*) pada zaman Neolithic menjadi kota yang pertama. Hal ini membutuhkan definisi dari kota (*city*) agar dapat membedakannya dengan bentuk pedesaan yang telah ada sebelumnya. Sjoberg (1965) menyebutkan bahwa kota merupakan: “*a community of substansial size and population density that shelters a variety of non-agricultural specialists, including a literate elite.*” (Morris, 1994, h. 5)

Menurut Morris (1994), syarat dari *urban revolution* ada dua, pertama adalah produksi berlebih dari makanan yang dapat disimpan serta sumber daya lainnya dan keberadaan dari budaya menulis. Produksi makanan dan sumber daya lainnya yang berlebih dibutuhkan untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, dan tanpa adanya budaya menulis, pencatatan dan pengembangan ilmu pengetahuan tidak mungkin dapat dilakukan. Namun, menurut Morris (1994) pula, terdapat hal lain yang perlu dipertimbangkan yaitu organisasi sosial, dikarenakan organisasi sosial memastikan ketersediaan perbekalan (*supplies*) untuk *urban specialist* dan untuk mengontrol tenaga kerja dalam pekerjaan umum skala besar (*large-scale communal work*) dengan keahlian di bidang teknologi menciptakan inovasi perpindahan material dalam jumlah besar dan perkembangan yang signifikan dalam kualitas alat yang diproduksi.

2.3.2 Definisi Kota

Kota merupakan elemen yang penting dalam pertahanan negara. Pada sistem negara-kota, kota menjadi entitas yang harus dilindungi untuk mempertahankan kedaulatannya. Pada sistem negara-imperialis, kekuasaan kota yang menjadi pusat pemerintahan harus dapat memastikan kota jajahannya tidak memberontak dan melepaskan diri dari kekuasaannya. Pada negara-bangsa, penduduk dari tiap-tiap kota memiliki satu kebangsaan yang sama sehingga tidak seperti negara imperialis, yang terdapat kecendrungan kota-kota ingin melepaskan diri dari kekuasaan negara tersebut. Negara-bangsa juga memiliki satu kota sebagai pusat pemerintahan, sama seperti negara-imperialis.

Melihat kota adalah elemen yang penting dalam negara, maka mengetahui definisi dari kota menjadi hal yang penting. Dalam Webster's Ninth New

Collegiate Dictionary, *city*, kata benda, memiliki arti diantaranya:

“1 a: an inhabited place of greater size, population, or importance than a town or village

b: an incorporated British town usu. Of major size or importance having the status of an Episcopal see

c: the financial district of London

d: a usu. Large or important municipality in the U.S governed under a charter granted by the state

e: an incorporated municipal unit of the highest class in Canada

2: CITY-STATE

3: the people of a city” (1991, h. 243)

Dari pengertian tersebut tentunya yang berlaku umum adalah pengertian no 1.A, sementara pengertian no 2 merujuk kepada istilah *city-state*, yang menurut Webster Ninth Collegiate Dictionary istilah ini pertama kali muncul pada tahun 1893 dan didefinisikan sebagai: *“an autonomous state consisting of a city and its surrounding territory”* (1991, h. 244).

Kata kota dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta *kutha* yang berarti kota. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kota, sebagai kata benda memiliki makna:

“1 dinding (tembok) yang mengelilingi tempat pertahanan;

2 daerah permukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dr berbagai lapisan masyarakat;

3 daerah yg merupakan pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi, kebudayaan, dsb;” (1999, h. 527).

Dari pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa kata kota dalam bahasa Indonesia memiliki asal atau kaitan yang erat dengan dinding pertahanan. Bukanlah suatu kebetulan juga bila kota dan dinding pertahanan memiliki kaitan yang erat dalam berbagai kebudayaan. Dalam bahasa Cina kuno, kata untuk menunjukkan ‘kota’ dan ‘dinding’ sama. *Ch’eng* dapat merujuk kedua pengertian tersebut. Kata *town* dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Teutonic yang bermakna batas atau pagar. Ejaan lama dari bahasa Belanda, *tuin*, berarti pagar, sementara ejaan lama dari bahasa German *zun* berarti benteng. Tyche, dewi dari kota Antioch

digambarkan menggunakan dinding bundar sebagai mahkota (Kostof, 1992).



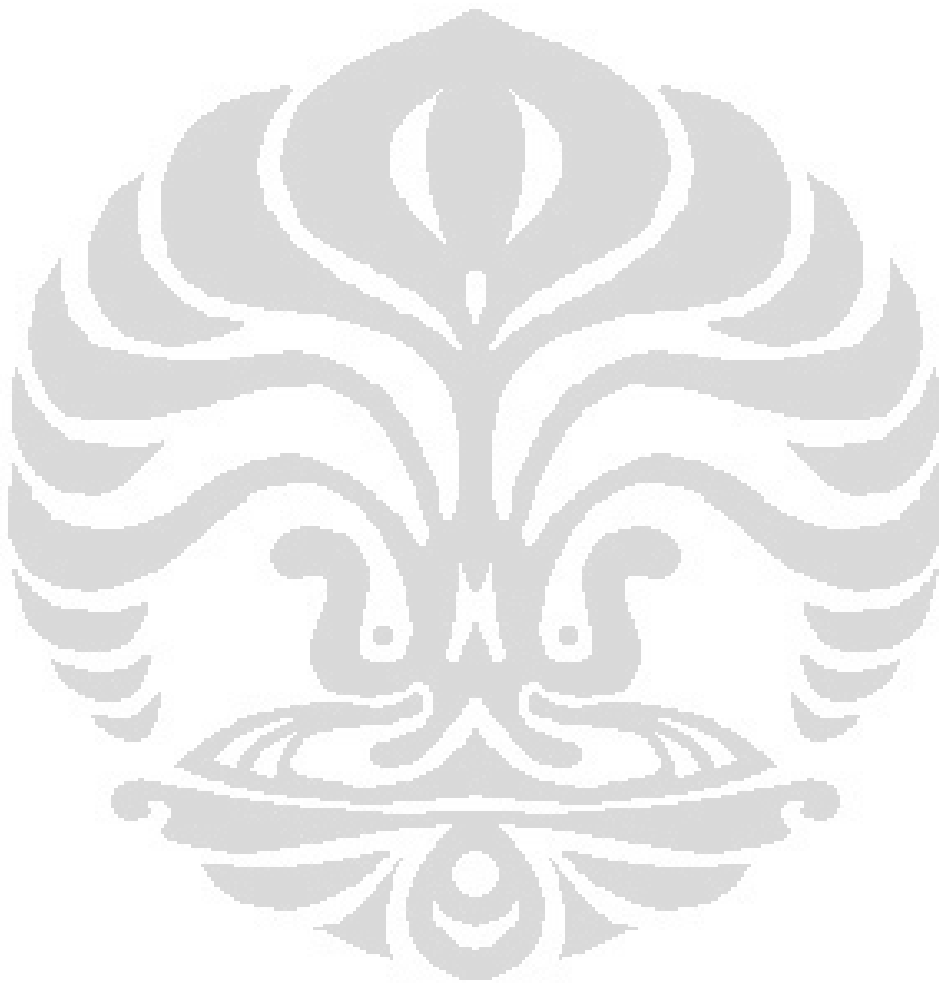
Gambar 2.4 Patung Tyche Memakai Mahkota Dinding Kota

Sumber: Spiro Kostof, *The city assembled: the elements of urban form through history*, 1992, h.11

Mengetahui bagaimana awalnya kota terbentuk dapat membantu kita untuk mengetahui bagaimana pertahanan dari kota. Terdapat berbagai teori mengenai faktor yang menyebabkan munculnya kota. Salah satunya adalah kota muncul dari perkembangan tempat perdagangan seperti apa yang dikatakan oleh Jane Jacobs pada tahun 1969 (Kostof, 1991, h. 31). Teori lainnya misalnya kota muncul sebagai alat dari pertahanan serta kota sebagai tempat suci dari suatu kepercayaan. Teori-teori ini memiliki kekurangannya masing-masing. Misalnya bila kita mengambil contoh kota muncul sebagai alat dari pertahanan, maka akan muncul pertanyaan mengapa kota tidak muncul lebih awal karena masalah pertahanan tentunya sudah menjadi masalah manusia dari sebelum kota muncul. Menurut Kostof, faktor yang menyebabkan munculnya kota telah dirangkum dengan baik pada buku Harold Carter yang berjudul *An Introduction to Urban Historical Geography* yang pada kesimpulannya mengutip Wheatley:

“It is doubtful if a single, autonomous, causative factor will ever be identified in the nexus of social, economic and political transformations which resulted in the emergence of urban forms... whatever structural changes in social organization were included by commerce, warfare or technology, they needed to be validated by some instrument of authority if they were to achieve institutionalized permanence.” (1991, h. 32)

Dapat disimpulkan, bahwa tidak mungkin hanya faktor tunggal yang menyebabkan munculnya kota. Kota dapat terbentuk dari berbagai faktor, misalnya menurut Kostof (1991), kota Arnhem yang muncul karena perdagangan, kota Madurai muncul karena adanya kebutuhan akan pusat ritus, dan kota Calais muncul sebagai benteng militer.



BAB 3

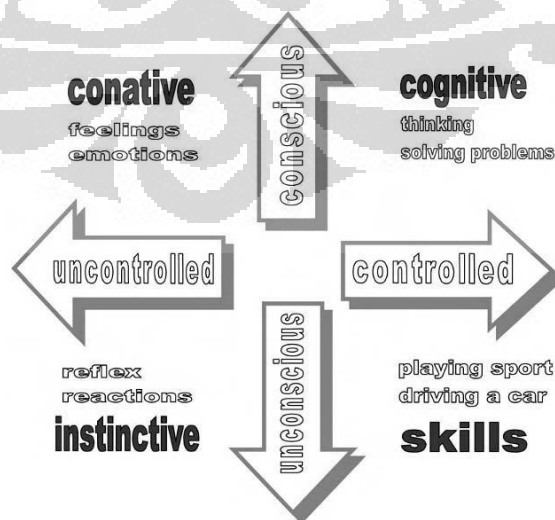
POLA SPASIAL PERTAHANAN NEGARA

3. 1 Rasa Aman Ruang dan Kekuasaan

3. 1. 1 Tingkah Laku Manusia

Manusia adalah makhluk yang memiliki kebutuhan lebih kompleks dari makhluk hidup lainnya. Manusia juga memiliki berbagai faktor yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari bagaimana manusia bertindak terhadap suatu keadaan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan dan faktor yang memotivasi manusia adalah dorongan manusia yang menyebabkannya melakukan sesuatu.

Memahami tingkah laku manusia berarti memahami apa yang menjadi insting dasar dari manusia dan apa yang dipelajari manusia selama hidupnya ataupun selama era manusia hidup di bumi. Hal ini sesuai dengan apa yang menjadi perdebatan dalam ilmu psikologi mengenai hal yang mempengaruhi manusia bertindak, yaitu *nature vs nurture* seperti apa yang disebutkan oleh Lawson (2001, h. 15). Pengelompokan faktor yang menjadi dasar manusia melakukan sesuatu secara sederhana dapat dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan sadar tidaknya manusia saat melakukan tindakannya, dan dengan kontrol manusia itu sendiri atau tidak (Lawson, 2001, h.16). Seperti yang terlihat di gambar 3.1, tingkah laku manusia dapat dibagi menjadi empat kelompok besar, yaitu *conative*, *cognitive*, *instinctive*, dan *skill*.



Gambar 3.1 Model Pengelompokan Tingkah Laku Manusia

Sumber: Bryan Lawson, *The language of space*, 2001, h. 17

Manusia seringkali berada pada keadaan yang sadar akan tingkah lakunya dan dapat mengontrolnya, misalnya saat memikirkan penyelesaian dari suatu masalah. Keadaan seperti ini disebut sebagai *cognitive*. Pada keadaan yang lain manusia sama sekali tidak sadar akan tingkah lakunya dan tidak dapat mengontrolnya, misalnya gerak refleks tangan manusia saat menyentuh teko panas. Keadaan seperti ini disebut sebagai *instinctive*. Keadaan saat manusia sadar namun tidak dapat mengendalikan tingkah lakunya disebut sebagai *conative*. Disinilah emosi manusia berada. Kita sadar akan keberadaan emosi namun seringkali tidak dapat mengontrolnya. Tidak ada manusia yang ingin merasa sedih, namun karena manusia tidak bisa mengontrol emosi agar tidak bisa merasakannya, tidak ada manusia yang bisa lepas dari rasa sedih. Begitu juga sebaliknya pada perasaan bahagia, kita tidak bisa mengontrol agar kita merasa bahagia setiap saat meskipun ingin. Terakhir adalah *skills*, keadaan di saat manusia dapat mengontrol tingkah lakunya namun tidak menyadari keberadaannya. Keadaan ini disebut *skills*, terjadi saat kita melakukan kegiatan sehari-hari atau saat melakukan sesuatu yang terbiasa kita lakukan. Contoh dari kondisi ini misalnya saat kita makan atau melakukan kegiatan olahraga yang sering kita lakukan. Saat masih kecil kita kesulitan untuk belajar makan tanpa menjatuhkan makanan, namun kemudian, makan dapat kita lakukan tanpa harus berpikir keras bagaimana proses yang harus kita lalui dari awal hingga akhir. Hal ini juga terjadi pada saat berolahraga. Seorang pemain basket profesional terlihat terbiasa membawa bola sambil berlari, tidak begitu dengan seorang amatir yang baru mencoba bermain basket.

Pengelompokan tingkah laku manusia ini dapat membantu untuk mengetahui motif yang menyebabkan manusia melakukan sesuatu dalam suatu kondisi tertentu. Karena manusia tidak dapat terlepas dari ruang (*space*), pengelompokan ini dapat membantu menganalisis hubungan tingkah laku manusia terhadap ruang. Hal ini penting, karena berbicara mengenai negara, berarti kita berbicara mengenai teritorium, dan berbicara mengenai teritorium berarti berbicara mengenai motif apa yang ada dibalik sikap manusia yang amat protektif terhadap teritoriumnya.

3. 1. 2 Kebutuhan Manusia sebagai Motif

Kebutuhan manusia akan sesuatu tidak dapat disangkal menjadi motif dibalik tingkah lakunya. Kebutuhan manusia untuk menghindari rasa sakitlah yang menyebabkan manusia secara refleks menjauhkan tangannya saat tidak sengaja tersentuh teko panas. Kebutuhan manusia dalam hal psikis maupun psikologis dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, baik faktor bawaan dari diri manusia tersebut ataupun pengaruh konteks dan kebudayaan tempat seseorang tumbuh. Banyak teori yang menjelaskan mengenai kebutuhan manusia ini, seperti teori piramida kebutuhan manusia yang digagas oleh Maslow (1943).

Kebutuhan manusia merupakan gabungan dari kebutuhan instingtif dan kebutuhan yang dipelajari selama manusia hidup. Kebutuhan instingtif manusia pada dasarnya sama dengan makhluk hidup lainnya, terutama mamalia lainnya yang dalam pengklasifikasian makhluk hidup paling dekat dengan manusia. Kebutuhan yang dipelajari selama manusia hidup lebih kompleks dari kebutuhan sebelumnya. Hal ini dikarenakan umat manusia disetiap jamannya selalu berkembang. Meskipun begitu, perkembangan kebudayaan manusia selalu berdasarkan kebudayaan yang telah ada sebelumnya, sehingga perubahan yang terjadi dalam budaya manusia dapat ditelusuri asal-muasalnya. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana manusia masa kini mulai memiliki kebutuhan akan bentuk komunikasi dan transfer informasi secara *real-time*. Perkembangan berbagai bentuk fasilitas yang menawarkan pertukaran informasi cepat dan *real time* menimbulkan kondisi yang menunjukkan bagaimana ketergantungan akan perangkat pintar semakin besar. Kini manusia lebih senang ketinggalan dompet daripada ketinggalan ponselnya, karena ketinggalan ponsel berarti kehilangan kesempatan untuk mengakses pertukaran informasi. Meskipun begitu, tentunya kebutuhan akan pertukaran informasi bukan baru pertama kali ini terjadi. Surat atau kentongan merupakan salah satu contoh pertukaran informasi yang dilakukan manusia.

Kaitan akan kebutuhan manusia dan ruang dibahas oleh Lawson, yang menunjukkan bagaimana ruang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan keruangan manusia dibagi menjadi tiga, yaitu stimulasi (*stimulation*), keamanan (*security*), dan identitas (*identity*). Hal ini pertama kali dikemukakan oleh Robert

Ardrey (Lawson, 2001).



Gambar 3.2 Tiga Kebutuhan Spasial Manusia
 Sumber: Bryan Lawson, *The language of space*, 2001, h. 19

Manusia membutuhkan stimulasi dalam hidupnya. Kekurangan stimulasi membuat manusia bosan dan tidak bersemangat. Kelebihan stimulasi akan membuat manusia tidak dapat berkonsentrasi.

Kebutuhan akan keamanan menunjukkan bagaimana manusia membutuhkan kestabilan dalam hidupnya. Keamanan memastikan manusia tetap waras tanpa harus selalu khawatir setiap saat. Hukum maupun norma merupakan salah satu produk dari kebutuhan manusia akan keamanan, dimana dengan adanya hukum dan norma, pada kondisi normal manusia merasa aman dengan mengetahui bahwa tindakannya sesuai dengan standar tertentu. Kebutuhan akan rasa aman merupakan peringkat kedua menurut teori Maslow (1943) dan merupakan kebutuhan yang berkaitan erat dengan bertahan hidup (*survival*).

Identitas adalah kebutuhan aktualisasi manusia. Setiap manusia butuh memiliki identitas dan mempertahankannya. Goffman (1959) menjelaskan bahwa manusia hingga di titik tertentu membangun persona (Lawson, 2001, h. 31). Kata persona dalam bahasa Indonesia berasal dari *persona*, bahasa latin yang menunjukkan topeng dalam karakter teater masa lampau dan juga merupakan asal dari kata *person*, bahasa Inggris yang berarti orang.

Di antara ketiga kebutuhan keruangan manusia ini, keamanan bisa dibilang adalah faktor yang paling berkaitan erat dengan militer. Hal ini dikarenakan militer seringkali dikonotasikan sebagai aparat yang bertanggung jawab menjaga keamanan warga sipil pada masa perang. Rasa takut yang merupakan

ekses dari kurangnya atau ketiadaan keamanan merupakan contoh dari *conative*, yaitu kita menyadari keberadaannya namun tidak dapat mengontrol perasaan takut tersebut. Militer merupakan salah satu langkah yang dibuat manusia untuk mengatasi rasa takut tersebut.

3. 1. 3 Teritorium

Secara umum, bagaimana hubungan manusia dengan manusia lainnya mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkah laku manusia dibandingkan hubungan manusia dengan ruang sekitarnya (Lawson, 2001). Namun, secara tidak langsung ruang mempengaruhi bagaimana hubungan manusia dengan manusia lainnya. Hal ini berkesesuaian dengan apa yang dikatakan Barker (1968) mengenai apa yang disebutnya dengan '*behavioral setting*'. Dengan kata ini ia menjelaskan bagaimana tingkah laku manusia dipengaruhi dan bahkan dibatasi oleh '*settings*' yang merupakan gabungan dari lingkungan fisik dan lingkungan sosial (Lawson, 2001, h. 11). Hal ini dideskripsikan dengan sangat baik oleh deskripsi dari tempat (*place*) oleh Aldo Van Eyck: "*Whatever space and time mean, place and occasion mean more. For space in the image of man is place, and time in the image of man is occasion.*" (Lawson, 2001, h. 23). Lawson (2001) sendiri berargumen bahwa faktor terbesar yang mempengaruhi *behavioral setting* adalah privasi dan komunitas. Dengan kata lain, bagaimana persepsi manusia terhadap suatu *setting*, apakah tempat tersebut bersifat privat atau publik lah yang paling mempengaruhi tingkah laku manusia. Tidak heran, mahasiswa arsitektur diajarkan untuk memulai proses perancangan dengan menentukan mana daerah yang akan menampung kegiatan yang bersifat publik, dan mana area yang bersifat privat. Hal lain yang menurut Lawson (2001) juga menjadi faktor berpengaruh pada suatu *setting* adalah ritus (*ritual*), pertunjukan (*display*) dan pengawasan (*surveillance*). Beberapa ruang diperuntukkan untuk ritus tertentu, misalnya pada tempat beribadah. Ruang lainnya bertujuan untuk menunjukkan sesuatu, baik untuk menunjukkan objek seperti pada museum maupun manusia yang menunjukkan diri kita dalam kehidupan bermasyarakat. Pengawasan menjadi faktor yang penting pada ruang seperti penjara atau perpustakaan.

Pembahasan mengenai tiga kebutuhan keruangan manusia dengan

bagaimana ruang mempengaruhi *behavioral setting* akan membantu kita untuk mengerti mengenai konsep teritorium yang berkaitan erat dengan kuasa. Ardrey (1967) menjelaskan teritorium sebagai:

“A Territory is an area of space, whether of water or earth or air, which an animal or group of animals defends as an exclusive preserve. The word is also used to describe the inward compulsion in animate beings to possess and defend such a space. A territorial species of animals, therefore, is one in which all males, and sometimes females too, bear an inherent drive to gain and defend an exclusive property.”

Dari penjelasan Ardrey mengenai teritorium, dapat disimpulkan bahwa teritorium timbul dari dorongan untuk menguasai dan kemudian melindungi area ruang tertentu. Teritorium tidak hanya berlaku pada manusia, namun juga pada spesies lainnya dalam *kingdom animalia*.

Teritorium merupakan sebuah fenomena sosial, yang berkaitan dengan lokasi dari suatu kelompok (*society*) pada ruang (Lawson, 2001). Hal ini dikarenakan teritorium membantu manusia atau binatang lainnya untuk mengatur kelompoknya dalam suatu area tertentu. Sikap teritorial pada binatang hanya terbatas pada kondisi saat ada spesies yang sama dengannya namun berbeda kawanan dengannya melintasi teritoriurnya. Saat hal itu terjadi, maka kawanan atau binatang yang dilanggar teritoriurnya akan mengambil sikap siap bertarung untuk mempertahankan teritoriurnya, meskipun seringkali, pemilik teritorium tersebut hanya perlu menunjukkan kelebihan fisik atau sikap siap menyerang untuk mengusir pelanggar teritorium sehingga pertarungan untuk memperebutkan teritorium sebenarnya jarang terjadi. Berbeda kasusnya bila yang melewati teritoriurnya berasal dari spesies yang berbeda dengannya. Bahkan, bila yang melanggar adalah binatang yang merupakan predator dari spesiesnya, binatang tersebut akan lari meninggalkan teritoriurnya. Hal ini adalah suatu sikap bertahan hidup.

Masalah mengenai teritorium juga dibahas oleh Foucault yang mendeskripsikan teritorium sebagai metafora dari keruangan:

“Territory is no doubt a geographical notion, but it’s first of all juridico-political one: the area controlled by a certain kind of power.

Field is an economic-judicial notion. Displacement: what displaces itself is an army, a squadron, a population. Domain is a juridico-political notion. Soil is a historic-geological notion. Region is a fiscal, administrative, military notion. Horizon is a pictorial, but also a strategic notion.” (Foucault, 1980 h. 68)

Dalam deskripsi tersebut Foucault menjelaskan bahwa teritorium adalah suatu area yang dikendalikan oleh kuasa. Foucault menyebutkan berbagai istilah lainnya yang masih berkaitan dengan teritorium dalam penjelasannya mengenai istilah dalam geografi sebagai metafora keruangan. Yang menarik adalah istilah-istilah tersebut mengandung unsur yang mengarah pada militer, yang merupakan alat negara untuk mengamankan kuasanya pada teritorium tertentu. Misalnya *displacement* yang dikaitkan dengan tentara sebagai salah satu contoh yang dipakai untuk menjelaskan siapa yang memindahkan, atau istilah *region* yang merupakan gagasan yang juga digunakan pada militer. Hubungan metafora keruangan dengan militer dijelaskan lebih lanjut oleh Foucault:

*“The point that needs to be emphasized here is that certain spatial metaphors are equally geographical and strategic, which is only natural since geography grew up in the shadow of the military. A circulation of notions can be observed between geographical and strategic discourses. The region of the geographers is the military region (from *regede*, to command), a province is a conquered territory (from *vincere*) field evokes the battlefield...”* (Foucault, 1980, h. 69)

Dari penjelasan Foucault dapat diambil kesimpulan bahwa metafora keruangan memiliki kaitan yang erat dengan geografi maupun militer. Pembahasan mengenai teritorium akan membawa kita untuk melihat bagaimana kuasa diterapkan dalam ruang.

3. 1. 4 Kuasa

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, kuasa, sebagai kata benda dan kata kerja, memiliki makna:

“(1) *n* kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu); kekuatan;

(2) *n* wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dsb) sesuatu: sekretaris tidak diberi -- untuk menandatangani surat yg penting itu;

(3) *n* pengaruh (gengsi, kesaktian, dsb) yg ada pd seseorang krn jabatannya (martabatnya);

(4) *v* mampu; sanggup: ia tiada -- mencegah perbuatan anaknya;

(5) *n* orang yg disertai wewenang.” (1999, h. 533)

Sementara menurut Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary, *power* sebagai kata benda memiliki definisi:

1 *a* (1) : *ability to act or produce an effect* (2) : *ability to get extra-base hits* (3) : *capacity for being acted upon or undergoing an effect*
b : *legal or official authority, capacity, or right*

2 *a* : *possession of control, authority, or influence over others* **b** : *one having such power; specifically : a sovereign state* **c** : *a controlling group* : ESTABLISHMENT —often used in the phrase *the powers that be*
d *archaic* : *a force of armed men* **e** *chiefly dialect* : *a large number or quantity*

3 *a* : *physical might* **b** : *mental or moral efficacy* **c** : *political control or influence*

4 *plural* : *an order of angels* — see CELESTIAL HIERARCHY

5 *a* : *the number of times as indicated by an exponent that a number occurs as a factor in a product <5 to the third power is 125>; also : the product itself <8 is a power of 2>* **b** : CARDINAL NUMBER **2**

6 *a* : *a source or means of supplying energy; especially : ELECTRICITY* **b** : MOTIVE POWER **c** : *the time rate at which work is done or energy emitted or transferred*

7 : MAGNIFICATION **2b**

8 : ¹SCOPE **3**

9 : *the probability of rejecting the null hypothesis in a statistical test when a particular alternative hypothesis happens to be true.*” (1991, h. 922)

Foucault menjelaskan kuasa dengan tidak melepaskan kuasa dari *knowledge*. Pemahaman yang sebelumnya menyebutkan bahwa *knowledge* tidak dapat diraih

tanpa melepaskan kuasa atau sebaliknya, menurut Foucault harus diluruskan. Pemahaman ini berangkat dari kebiasaan atau cerita-cerita mengenai raja yang setelah tua memutuskan meninggalkan kekuasaannya untuk bertapa demi mendapatkan *knowledge*. Hal ini mengesankan kuasa dan *knowledge* berada di bidang yang berbeda dan seseorang (*body*) harus melepaskan salah satunya untuk mendapatkan dan menguasai yang lainnya. Foucault (1977) menjelaskan bahwa keberadaan kuasa menghasilkan *knowledge*. Hal ini dikarenakan *knowledge* merupakan alat yang sangat berguna dalam mengaplikasikan maupun mempertahankan kuasa.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa teritorium adalah area yang dikendalikan oleh suatu bentuk kuasa. Dari sini, pembahasan mengenai kuasa akan dipersempit untuk menjelaskan bagaimana dan siapa pemilik kuasa dalam suatu teritorium.

Foucault (1980) menggunakan dua istilah untuk menjelaskan perwujudan dari kuasa, yaitu '*body*' yang merujuk pada jiwa dan raga dari seorang manusia dan '*social body*' yang merujuk pada kehidupan dari suatu populasi manusia. Perlu dicermati disini bahwa Foucault tidak menganggap kuasa sebagai suatu institusi, namun kuasa adalah istilah yang merujuk pada hubungan strategis yang kompleks dalam suatu *society*.

Keberadaan istilah *body* dan *social body* yang digunakan Foucault tentunya tidak dapat dilepaskan dari sistem politik yang berlaku pada suatu negara. Menurut Foucault (1980), hingga abad ke-17 *body* dari raja merupakan realitas politik dan merupakan perwujudan dari kuasa. Keberadaan raja menjadi penting untuk kelangsungan negara, sebaliknya, pada abad ke-19 *social body* menjadi hal yang penting pada keberadaan negara. Sehingga, politik hingga abad ke-17 berfokus pada perlindungan kuasa melalui garis darah, sehingga keselamatan dan keberlangsungan penerus tahta kerajaan menjadi hal yang mutlak. Sementara, semenjak abad ke-19 perwujudan *social body* lah yang dilindungi.

Gagasan dari Foucault menunjukkan bagaimana kuasa berada dalam wujud institusi, sehingga siapapun yang mengoperasikannya tidak masalah. Hal inipun menjadikan berjalannya lembaga-lembaga birokrat tidak bergantung pada

siapa yang memerintah.

Hal ini akan mengantar kita kepada konsep ‘pemerintah’ untuk mengerti bagaimana kuasa bekerja. Foucault menjelaskan pengertian pemerintah:

“Government” did not refer only to political structures or to the management of states; rather it designated the way in which the conduct of individuals or of groups might be directed: the government of children, of souls, of communities, of families, of the sick. It did not only cover the legitimately constituted forms of political or economic subjection, but also modes of action, more or less considered and calculated, which were destined to act upon the possibilities of action of other people. To govern, in this sense, is to structure the possible field of action of others. The relationship proper to power would not therefore be sought on the side of violence or of struggle, nor on that of voluntary linking (all of which can, at best, only be the instruments of power), but rather in the area of the singular mode of action, neither warlike nor juridical, which is government.” (Felluga, 2002, chap III)

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa istilah pemerintah tidak hanya merujuk pada struktur politik maupun manajemen negara, namun merujuk juga pada pengaturan berbagai laku.

Negara yang tidak hanya terdiri dari pemerintah, namun juga meliputi berbagai aparatur yang mendukung keberadaannya menguasai suatu teritorium tertentu. Keberadaan negara maupun teritorium yang tidak dapat dilepaskan dari kuasa tentu saja memunculkan suatu masalah untuk memastikan bahwa baik pemerintah maupun teritorium tidak terancam, baik ancaman dari dalam yang meliputi revolusi dari *social body* yang bisa jadi tidak puas dengan perwujudan kuasa dari pemerintah kepadanya, maupun ancaman dari luar yang ingin merebut teritorium maupun menghancurkan pemerintah yang sedang berkuasa. Hal yang pertama mendorong timbulnya keberadaan gagasan *discipline*, sementara gagasan yang terakhir inilah yang terutama mendorong keberadaan militer.

Foucault mengemukakan gagasannya mengenai *discipline*, ia menjelaskan:

“Discipline’ may be identified neither with an institution nor with an apparatus; it is a type of power, a modality for its exercise, comprising

a whole set of instruments, techniques, procedures, levels of application, targets; it is a 'physics' or an 'anatomy' of power, a technology" (Felluga, 2002, chap III).

Dapat disimpulkan bahwa *discipline* merupakan sebuah ‘teknologi’ untuk mewujudkan kuasa yang efektif diberlakukan pada *body* yang dikuasai oleh ‘kuasa’ tersebut. Hal inilah yang menurut Foucault mendorong keberadaan polisi sebagai agen untuk memastikan *discipline* sudah terjaga, seperti apa yang dikemukakan Foucault dalam paragraf berikut:

“In the eighteenth century the organization of police ratifies the generalization of monarchy of Louis XIV and Louis XV, intensely centralized as it was, certainly acted as an initial disciplinary model. As you know the police was invented in Louis XV’s France. (Foucault, 1980 h. 72)”

Keberadaan militer dalam suatu negara untuk menangkal kuasa dari luar maupun merebut kuasa yang dimiliki negara lain telah ada semenjak lama. Bila ditelusuri, awal dari keberadaan militer berasal dari keberadaan serikat prajurit di tiap kota. Yang menarik adalah pernyataan dari Foucault mengenai gerakan revolusi:

“In order to be able to fight a State which is more than just a government, the revolutionary movement must possess equivalent politico-military forces and hence must constitute itself as a party, organized internally in the same way as a State apparatus with the same mechanism of hierarchies and organization of powers. (Foucault, 1980 h. 59)”

Pernyataan ini semakin menguatkan bahwa militer adalah agen yang paling berpengaruh dalam menjaga stabilitas negara, tidak hanya dari ancaman luar, namun juga ancaman dari dalam. Militer dapat meredam ancaman revolusi, dan bahkan, kemungkinan gerakan revolusi untuk dapat menang melawan pemerintah sangat kecil, selama gerakan revolusi tersebut tidak memiliki kekuatan yang sama dengan militer.

Tentunya, perlu untuk diketahui kapan tepatnya militer sebagai alat pertahanan negara muncul untuk melindungi suatu negara. Menurut Weber (1958), hal ini bermula dari kebutuhan untuk melindungi para pedagang di kota,

sehingga terbentuk *warrior's guild*. Namun, militer yang umum dikenal sekarang, yang sebagian besar anggotanya terdiri dari penduduk negara tersebut diperkirakan berawal dari *hoplite* di Sparta yang mewajibkan para penduduknya untuk mengikuti pelatihan militer serta wajib melayani negara dalam program wajib militer untuk mempertahankan kota Sparta. Hal ini memperlihatkan bahwa militer suatu negara, timbul lewat kebutuhan suatu negara, salah satunya adalah kebutuhan politik, sebagaimana kutipan berikut:

“To summarize: from the time of the creation of hoplite discipline the ancient polis was a warrior's guild. Wherever the city carried on an active territorial politics it was inevitably pressed in greater or less degree into a course similar to that of Sparta: the creation of a trained hoplite army out of the citizen.” (Weber, 1958, h. 220)

3.1.5 Rangkuman

Rasa aman, ruang dan kekuasaan adalah hal yang tidak terpisah satu sama lainnya. Rasa aman adalah reaksi *conative* terhadap ruang di sekitarnya. Kebutuhan spasial manusia untuk merasa aman saat berada di ruang tertentu memunculkan reaksi manusia untuk menghilangkan rasa tidak aman, misalnya dengan militer sebagai alat negara menangkal ancaman dari negara lain. Kebutuhan akan rasa aman pada ruang tentunya tidak dapat terlepas dari sifat teritorial manusia. Pada teritorium tertentu dibutuhkan kuasa untuk mempertahankan teritorium tersebut. Berbicara mengenai teritorium dan kuasa tentunya akan sampai pada negara dan pemerintah. Untuk memastikan kuasa dari pemerintah tidak terancam, maka dibutuhkan *discipline* sebagai sistem untuk mencegah ancaman dari dalam dan militer sebagai sistem untuk mencegah ancaman dari luar.

3.2 Ancaman bagi Negara

Sebelum membahas mengenai ancaman (*threat*) bagi negara, maka perlu dimengerti bahwa konsep ancaman memiliki dua makna yang terpisah. Menurut Cohen (1979) makna yang pertama adalah suatu komunikasi atau usaha dari seseorang kepada pihak lain untuk memaksakan suatu *sanction* pada pihak lain.

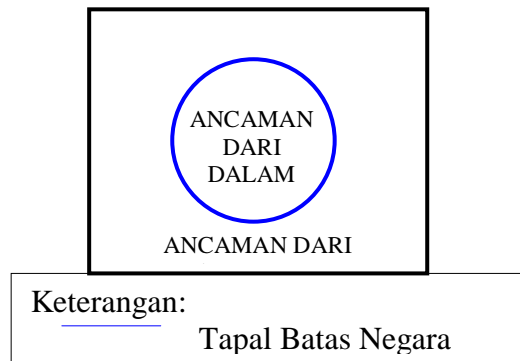
Hak ini lebih mengesankan ancaman terbatas pada sesuatu yang berhubungan dengan perilaku aktif suatu pihak untuk merusak pihak lainnya. Sementara, makna satunya, yang digunakan secara umum dalam hubungan internasional adalah apa yang Baldwin (1971) sebut sebagai '*passive outcome*' dan bukannya sesuatu yang mengindikasikan '*active undertaking*' (Cohen, 1979, h. 4)

Persepsi akan ancaman (*perception of threat*) adalah suatu pencegahan dari pengamat atau pengambil keputusan mengenai bahaya, baik dari segi militer, ekonomi ataupun strategi, yang akan dialami oleh negara (Cohen, 1979). Singer (1958) menjelaskan bagaimana persepsi akan ancaman muncul:

"...arises out of a situation of armed hostility, in which each body of policy-makers assumes that the other entertains aggressive designs; further, each assumes that such designs will be pursued by physical and direct means if estimated gains seem to outweigh estimated losses. Each perceives the other as a threat to its national security, and such perception is a function of both estimated capability and estimated intent. To state the relationship in quasi-mathematical form: Threat-Perception = Estimated Capability x Estimated Intent." (Cohen, 1958, h. 5)

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa persepsi akan ancaman muncul saat pengambil keputusan melihat keberadaan pihak yang memiliki kemampuan dan tujuan yang dapat mengancam keamanan nasional dari negara tersebut.

Pihak yang dapat mengancam keamanan negara tidak terbatas dari pihak yang terdapat di luar tapal batas negara, misalnya negara tetangga, tapi juga dari pihak yang terdapat di dalam tapal batas dari suatu negara. Hal ini sesuai dengan pembahasan sebelumnya tentang kuasa, dimana *discipline* menjadi sistem untuk mencegah ancaman dari dalam dan militer sebagai sistem untuk mencegah ancaman dari luar. Karenanya, dalam pembahasan ini ancaman dibagi menjadi dua berdasarkan ancaman tersebut muncul dari dalam atau luar tapal batas suatu negara.



Gambar 3.3 Skema Ancaman Terhadap Negara

3.2.1 Ancaman dari Dalam

Ancaman dari dalam adalah ancaman yang muncul dari dalam tapal batas suatu negara. Pada masa lalu maupun masa sekarang, keluar masuknya manusia maupun barang ke suatu negara akan melalui suatu mekanisme pengawasan. Hal ini dapat terlihat misalnya pada keberadaan gerbang kota.



Gambar 3.4 Gerbang Agora Roma di tahun 1762

Sumber: Anuja Kanani, *The city assembled by spiro kostof: the city edge* [Review dari buku *The city assembled: the elements of urban form through history*]



Gambar 3.5 Gerbang Boubounistra, Athena di Tahun 1819

Sumber: Anuja Kanani, *The city assembled by spiro kostof: the city edge* [Review dari buku *The city assembled: the elements of urban form through history*]

Pertahanan terhadap ancaman dari dalam terutama berkaitan dari bagaimana rakyat suatu negara memandang pemimpinnya. Hal ini sesuai dengan pandangan Kostof (1992) bahwa dua impuls utama dari suatu distrik yang

berdaulat adalah kebesaran dari pemimpin dan keselamatan pemimpin tersebut. Hal ini terutama berlaku pada masa dahulu dimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada masa itu *body* dari raja menjadi hal yang penting dari keberlangsungan suatu negara. Kebesaran dari pemimpin berhubungan erat dengan kesan yang ditimbulkan oleh pemimpin tersebut, seperti stabilitas, kekayaan, kekuatan, untuk kebaikan bagi rakyatnya maupun sebagai kesan yang ditimbulkan ke perwakilan dari negara lain. Hal ini berkaitan erat dengan banyaknya budaya yang menempatkan raja sebagai wakil dari tuhan atau bahkan tuhan itu sendiri. Sementara, keselamatan pemimpin tidak menjadi persoalan pribadi dari sang pemimpin, namun persoalan dari negara. Hal ini dikarenakan keselamatan dari pemimpin akan memastikan stabilitas dari rezim tersebut maupun memastikan perpindahan kekuasaan yang sesuai dengan tata cara yang berlaku. Ancaman bagi keselamatan pemimpin dapat timbul dari dalam maupun luar, tergantung bagaimana popularitas dari pemimpin tersebut. Di sini dapat disimpulkan bahwa ancaman dari dalam berasal dari penduduk negara itu sendiri. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Alberti (1755) mengenai hal yang membedakan pemimpin yang dicintai rakyatnya dan pemimpin tiran dalam *Ten Books of Architecture* sebagaimana dikutip Kostof (1992, h. 75):

“A good King takes care to have his city strongly fortified in those Parts which are most liable to be assaulted by a foreign Enemy: a Tyrant, having no less Danger to fear from his Subjects than from Strangers, must fortify his City no less against his own People than against Foreigners: and his Fortifications must be so contrived, that upon Occasion he may employ the Assistance of Strangers against his own People, and of one part of his People against the other.”

3.2.2 Ancaman dari Luar

Ancaman dari luar adalah ancaman yang muncul dari luar tapal batas suatu negara. Ancaman dari luar datang bukan dari penduduk negara tersebut, namun dari negara lain. Pada zaman dahulu, perang antara kota adalah hal yang umum terjadi. Perang tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti perselisihan memperebutkan daerah perdagangan, negara imperialis yang berusaha

menaklukan kota lain untuk memperluas daerah kekuasaannya, ataupun alasan lain yang biasanya berkaitan dengan pengambil keputusan di suatu negara.

Ancaman dari luar yang berusaha melumpuhkan suatu negara tentunya harus dapat berhubungan langsung dengan negara yang ingin dilumpuhkannya. Hubungan yang dimaksud disini dapat berupa hubungan ekonomi, politik maupun hubungan secara fisik misalnya penyerangan ke suatu negara.

Ancaman dari luar berhubungan dengan pertahanan negara, dikarenakan kebanyakan usaha pertahanan negara adalah usaha untuk mencegah hilangnya kedaulatan dari negara tersebut. Ancaman dari luar inilah yang nantinya dapat kita lihat implementasinya dalam pertahanan negara pada subbab berikutnya.

3.2.3 Rangkuman

Pengertian ancaman secara umum ada dua, yaitu komunikasi atau usaha dari seseorang kepada pihak lain untuk memaksakan suatu *sanction* pada pihak lain. Hal ini dianggap sebagai '*active undertaking*' ataupun segala sikap yang memiliki '*passive outcome*' namun tetap membahayakan kondisi dari suatu negara. Persepsi akan ancaman adalah suatu pencegahan dari pengamat atau pengambil keputusan mengenai bahaya, baik dari segi militer, ekonomi ataupun strategi, yang akan dialami oleh negara dan muncul saat pengambil keputusan melihat keberadaan pihak yang memiliki kemampuan dan tujuan yang dapat mengancam keamanan nasional dari negara tersebut. Ancaman dibedakan menjadi ancaman dari dalam penduduk suatu negara, yang berada dalam tapal batas negara tersebut melakukan hal yang membahayakan keamanan negara karena tidak puas akan pemimpin negara tersebut. Ancaman dari luar berasal dari luar tapal batas suatu negara dimana faktor yang mendasarinya dapat berupa perselisihan antara dua negara maupun perebutan teritorium dari negara lain.

3.3 Pertahanan Negara

3.3.1 Definisi Pertahanan

Pertahanan (*defense*) dan keamanan (*security*) adalah dua istilah yang berbeda. Hal ini sesuai dengan apa yang ditulis Anggoro (2002):

“... harus dibedakan dengan jelas antara ‘pertahanan’ (*defense*) dan ‘keamanan’ (*security*). Segenap aparat pemerintah (kabinet) bertanggung jawab untuk keamanan; sedangkan militer bertanggung jawab untuk merumuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan operasi dan taktik pertahanan. Harus didefinisikan dalam konteks vulnerabilitas terhadap internal maupun eksternal yang mengancam maupun memiliki potensi untuk memperlemah struktur (teritorial dan institusional) negara dan *government regime*. Komponen lain baik ekonomi, ekologi, atau yang lain, hanya menjadi bagian integral dari keamanan jika mereka menjadi cukup akut dan terkristalisasi menjadi dimensi politik dan mengancam tapal batas, institusi negara maupun pemerintah.”

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa keamanan, pertahanan, pemerintah dan militer tidak dapat dipisahkan, satu sama lain saling berkaitan, sehingga dapat disimpulkan bahwa militer tidak dapat dilepaskan dari unsur politik. Dengan kata lain, berbagai usaha menyangkut pertahanan negara tidak dapat dilepaskan dari intervensi keadaan politik dan militer suatu negara.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ancaman terhadap keamanan maupun pertahanan negara dapat datang dari dalam maupun luar. Komponen yang harus diperhatikan adalah dimensi politik, dimana komponen seperti ekonomi maupun ekologi dapat menjadi bagian integral dari keamanan apabila terkristalisasi menjadi dimensi politik. Di sini dapat dilihat bahwa politik menjadi salah satu faktor terpenting dalam keamanan negara.

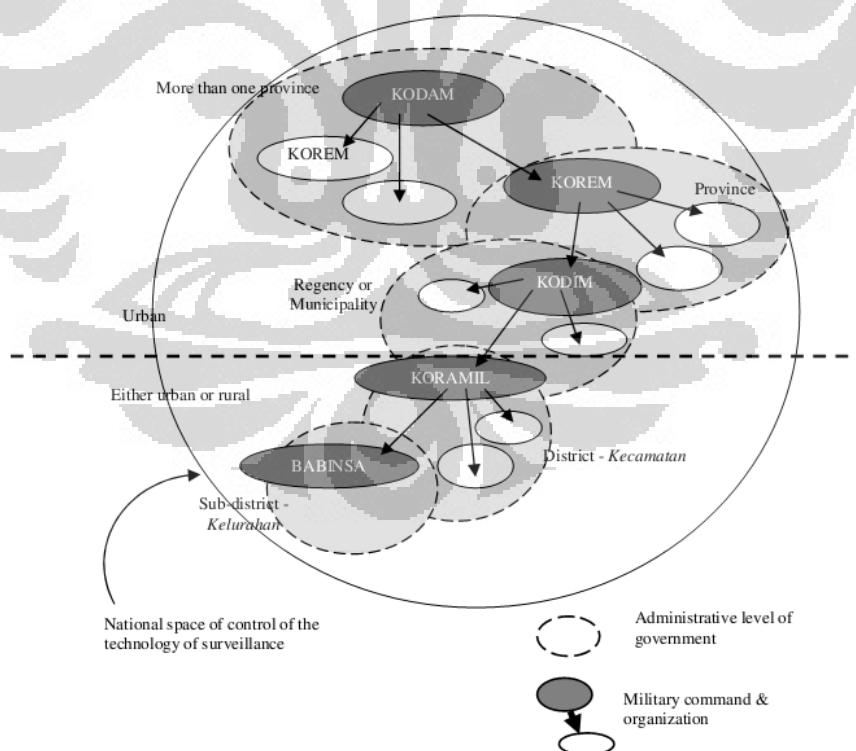
3.3.2 Pengawasan sebagai Bentuk Pertahanan Negara

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ancaman kepada negara tidak hanya berasal dari luar, namun terdapat juga ancaman dari dalam. Untuk memastikan rakyatnya melakukan hal yang tidak mengancam stabilitas negara, maka pemerintah melakukan suatu mekanisme pengawasan (*surveillance*).

Pengawasan menurut Foucault (1977) adalah mekanisme dari *discipline*. Foucault memberi contoh mengenai kota yang terserang wabah penyakit, dimana kota tersebut kemudian ditutup untuk mencegah penyebaran wabah. Setiap rumah dikunci oleh aparat dari luar, dan setiap jalan diawasi untuk memastikan tidak ada

penduduk yang berkeliaran di jalan. Hal ini memperlihatkan pengawasan yang berdasarkan suatu sistem, dengan laporan dari pelaku pengawasan ke atasannya, hingga laporan ini sampai pada pemimpin negara tersebut. Mekanisme pengawasan ini terjadi misalnya di gerbang kota, untuk mengawasi orang yang memasuki suatu kota. Kemudian, polisi yang sudah dibahas sebelumnya yang merupakan alat dari *discipline*, memastikan masyarakat di distrik tertentu dalam suatu negara bersikap sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Di Indonesia, pada zaman pemerintahan Soeharto, alat dari *discipline* ini diterapkan melalui dwi fungsi TNI dengan fungsi teritorial militer, mulai dari level provinsi melalui Komando Daerah Militer (KODAM), Komando Resort Militer (KOREM), Komando Distrik Militer (KODIM), Komando Rayon Militer (KORAMIL) hingga Bintara Pembinaan Desa (BABINSA) yang berada pada tingkat desa (Harjoko, 2003). Keberadaan fungsi teritorial militer seperti pada masa pemerintahan Soeharto terbukti efektif untuk menciptakan stabilitas pada rezim Orde Baru yang dapat bertahan hingga 32 tahun.



Gambar 3.6 Fungsi Teritorial TNI pada Berbagai Level Pemerintahan

Sumber: Triatno Yudo Harjoko, *Urban kampung: its genesis and transformation into metropolis, with particular reference to penggilingan in jakarta*, 2003, h. 112

Discipline pada negara kini tidak hanya didapatkan dari keberadaan polisi yang berpatroli pada daerah tertentu, namun dilaksanakan juga oleh berbagai perangkat pintar. *Surveillance camera* merupakan salah satu contohnya, yang pada negara-negara berkembang tidak hanya ditempatkan pada gedung, namun juga ditempatkan pada daerah-daerah publik untuk memastikan keamanan suatu kawasan. Keberadaan satelit juga menjadi titik penting dalam ‘teknologi’ *discipline*, karena dengan keberadaan satelit segala kegiatan manusia dapat diawasi. Berbagai ‘teknologi’ *discipline* dari masa ke masa ini sebenarnya sesuai dengan prinsip dasar *panopticon* yang menempatkan pihak yang diawasi dalam alam bawah sadarnya selalu merasa diawasi setiap gerak-geriknya, sesuai dengan yang Foucault katakan: “*Hence the major effect of the Panopticon: to induce in the inmate a state of conscious and permanent visibility that assures the automatic functioning of power.*” (1977, h. 201)

3.3.3 Perkembangan Pertahanan Negara

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pertahanan negara tidak dapat dilepaskan dari militer. Menurut Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary (1991), *military* adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan prajurit, senjata atau perang. Sehingga, keberadaan dinding pertahanan yang menjadi latar belakang masalah dari tulisan ini memiliki kaitan erat dengan militer.

Keberadaan perang seringkali dikaitkan dengan kedamaian (*peace*), dimana diharapkan setelah perang selesai maka perdamaian akan terwujud, sehingga rasa takut dapat digantikan dengan rasa aman. Istilah perang (*war*) yang dimaksud disini bukanlah keadaan konflik yang terjadi antara satu negara atau negara lain, tapi suatu kondisi konflik yang terjadi antara sekelompok manusia yang satu dengan sekelompok manusia yang lain.

Berbicara mengenai militer berarti berbicara mengenai perang dan sejarahnya. Perang tidak dapat dilepaskan dari teknologi perang. Hal ini dikarenakan bentuk *military architecture* selalu beradaptasi dengan teknologi perang yang terus berkembang. Istilah *military architecture* di sini digunakan untuk mendefinisikan segala intervensi unsur militer dalam ruang yang berkaitan dengan pertahanan (*defense*) atau keamanan (*security*). Istilah perang (*war*) yang

dimaksud disini bukan hanya keadaan konflik yang terjadi antara satu negara atau negara lain, tapi suatu kondisi konflik yang terjadi antara sekelompok manusia yang satu dengan sekelompok manusia yang lain.

Masa awal perang adalah masa infanteri sebagai kekuatan utama berperang. Selain manusia, hewan seperti kuda gajah ataupun unta yang ditunggangi atau untuk menarik kereta perang (*chariot*) menjadi salah satu teknologi awal dalam perang. Senjata yang digunakan masih berkisar antara panah, pedang, tombak hingga ketapel untuk melumpuhkan musuh. Ketika perang untuk melumpuhkan suatu kota meletus, tujuan dari penyerang adalah untuk memasuki kota dan membuka pintu gerbang sehingga pasukan yang lainnya dapat masuk dan melumpuhkan pemimpin kota tersebut. Pada masa-masa ini dinding kota dibuat tinggi untuk mencegah pasukan musuh memanjat dengan menggunakan tangga, gerbang kota pun dibuat amat kokoh sehingga tidak dapat didobrak paksa oleh musuh. Parit pun dibuat disekeliling dinding kota untuk mempersulit masuknya musuh. Wajah *architectura militaris* berubah di abad ke 15 saat teknologi peledak ditemukan. Dinding kota menjadi lebih tebal dan rendah, hal ini dikarenakan tujuan penyerang bukanlah untuk memasuki kota dengan cara memanjat, namun dengan menembusnya dengan daya hancur meriam. Pada masa ini sistem fortifikasi baru terbentuk yaitu *trace italianne* yang bergantung pada *multiangular bastion*.



Gambar 3.7 *Bastioned Wall* di Kota Turin

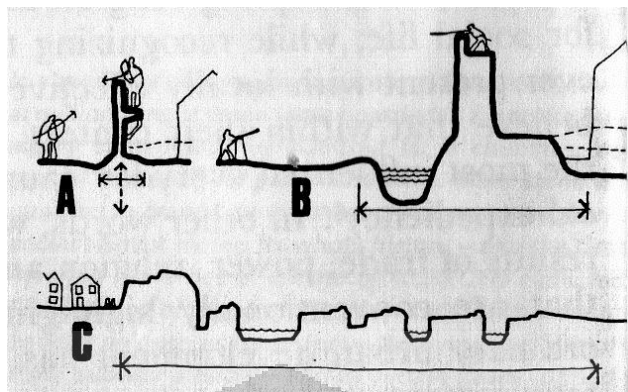
Sumber: Spiro Kostof, *The city assembled: the elements of urban form through history*, 1992, h.18

Perkembangan teknologi senjata berpengaruh pada bentuk pertahanan negara dan dapat dilihat dari sudut pandang spasial. Perkembangan senjata secara

umum berkembang pada dua dimensi, yaitu dimensi jarak serang dan daya hancur. Dimensi jarak serang adalah sejauh mana senjata tersebut dapat mencapai sasaran yang dituju. Perkembangan senjata mulai dari penggunaan pedang, kampak, panah, tombak, pistol, meriam dan rudal adalah perkembangan nyata dari peningkatan jarak serang. Senjata yang sebelumnya berfungsi sebagai perpanjangan dari bagian tubuh, sehingga manusia tidak hanya bergantung dengan anggota tubuhnya, misalnya dengan menguasai kemampuan bela diri, akhirnya mengalami perkembangan yang membuat manusia dapat menjauhkan dirinya sambil melakukan serangan, sehingga secara tidak langsung mengurangi kemungkinan terkena serangan musuh. Sementara, perkembangan dimensi daya hancur adalah sejauh mana senjata tersebut memiliki efek rusak pada sasarannya dalam satu kali serangan. Hal ini dapat dilihat misalnya dari perbandingan panah, pistol, meriam dan rudal. Contoh ini juga dapat memberikan gambaran bagaimana perkembangan senjata selalu berusaha untuk meningkatkan dimensi jarak serang dan dimensi daya hancur sekaligus.

Analisis di atas apabila dikaitkan dengan perkembangan pertahanan negara akan memiliki kesesuaian dengan apa yang dikatakan Morris (1994), bahwa kebutuhan bertahan dari ancaman serangan dari luar membuat perkembangan pertahanan mengalami perkembangan, namun memiliki prinsip yang sama, yaitu penciptaan jarak dari yang menyerang dan yang diserang, dimana Ia mengelompokkan perkembangan dinding kota menjadi tiga fase seperti yang dapat dilihat pada gambar 3.8. Perlu diingat bahwa apa yang dijelaskan Morris ini terbatas pada keberadaan dinding pertahanan. A adalah fase pertama dari dinding kota, berupa dinding atau *palisade* yang memiliki dimensi horizontal sangat terbatas. Perkembangan selanjutnya seperti yang digambarkan B, dinding kota yang tinggi dan dibatasi oleh parit, pada masa ini senjata api sudah mulai muncul dan bentuk ini menjadi bentuk awal pertahanan dari pasukan artileri. Terakhir adalah fase C dimana fase ini menjadi fase akhir dari pertahanan terhadap pasukan artileri. Pada gambar 3.8 terlihat jelas bahwa perkembangan pertahanan ini berbanding lurus dengan semakin besarnya jarak yang memisahkan pihak penyerang dan pihak yang diserang dan semakin tebalnya dinding pertahanan tersebut. Hal ini dikarenakan perkembangan senjata yang semakin besar daya

hancurnya.



Gambar 3.8 Perkembangan Dinding Kota

Sumber: A. E. J. Morris, *History of urban form: before the industrial revolutions*, 1994

Perkembangan pertahanan juga menyesuaikan dengan teknologi non-senjata yang berkembang. Perkembangan teknologi yang sangat merubah wajah perang adalah penemuan pesawat terbang serta teknologi radar (*radio detection and ranging*). Dengan pesawat terbang tidak ada tempat yang tidak dapat dijangkau, tidak ada dinding yang dapat menghalangi masuknya pasukan, rudal maupun bom. Teknologi radar membuat hampir tidak ada materi yang tidak dapat diketahui keberadaannya (kecuali pada kasus khusus seperti pesawat terbang dengan teknologi *stealth*). Keberadaan satelit meskipun tidak berfungsi aktif sebagai senjata, memberikan pengaruh yang sangat besar dalam pertahanan negara. Dengan keberadaan satelit, tidak ada bagian dari permukaan bumi yang dapat disembunyikan. Bahkan, kini dengan teknologi *Google Earth* semua orang dapat mengakses gambar yang dihasilkan satelit.

Perkembangan teknologi nuklir dan senjata kimia dan senjata biologis pun menjadi faktor yang sangat mempengaruhi keamanan dan pertahanan di era modern ini. Meskipun senjata kimia dan senjata biologis tidak dapat menghancurkan infrastruktur yang ada, namun daya hancurnya pada manusia sangat besar. Senjata nuklir seperti bom atom di Hiroshima dan Nagasaki memperlihatkan bagaimana pengaruhnya pada manusia dalam radius sekian kilometer di luar daya ledak bom atom. Keberadaan senjata kimia dan biologis ini bahkan membuat beberapa bangunan memasukkan sistem yang dapat mencegah senjata biologis menyebar lebih jauh bila gedung tersebut terpapar senjata

biologis.

Penemuan teknologi seperti pesawat, radar dan satelit mungkin awalnya tidak dimaksudkan untuk tujuan militer, namun pada perkembangannya teknologi-teknologi ini menentukan bagaimana arah pertahanan negara nantinya. Hal ini membuktikan bahwa tidak hanya perkembangan teknologi senjata yang mempengaruhi pertahanan negara, namun perkembangan teknologi lah yang menentukan arah pertahanan negara kedepannya.

3.3.4 Rangkuman

Pertahanan dan keamanan adalah dua istilah yang berbeda, dimana segenap aparat pemerintah (kabinet) bertanggung jawab untuk keamanan sedangkan militer bertanggung jawab untuk merumuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan operasi dan taktik pertahanan. Keamanan, pertahanan, pemerintah dan militer tidak dapat dipisahkan. Militer tidak dapat dilepaskan dari unsur politik. Untuk memastikan rakyatnya melakukan hal yang tidak mengancam stabilitas negara, maka pemerintah melakukan suatu mekanisme pengawasan (*surveillance*). Teknologi pengawasan yang terus berkembang memiliki prinsip dasar yang sama dengan *panopticon* yang menempatkan pihak yang diawasi dalam alam bawah sadarnya selalu merasa diawasi setiap gerak-geriknya. Perkembangan teknologi senjata berpengaruh pada bentuk pertahanan negara dan dapat dilihat dari sudut pandang spasial. Perkembangan senjata secara umum berkembang pada dua dimensi, yaitu dimensi jarak serang dan daya hancur. Dimensi jarak serang adalah sejauh mana senjata tersebut dapat mencapai sasaran yang dituju. Sementara, perkembangan dimensi daya hancur adalah sejauh mana senjata tersebut memiliki efek rusak pada sasarannya dalam satu kali serangan. Perkembangan teknologi non-senjata juga mempengaruhi pertahanan negara karena secara tidak langsung berhubungan dengan bagaimana pertahanan negara harus diimplementasikan. Pada akhirnya, perkembangan-perkembangan ini berpengaruh pada bagaimana kita melihat pertahanan negara secara spasial, melalui perkembangan dari munculnya dinding pertahanan, hingga hampir tidak adanya dinding pertahanan di masa sekarang ini yang dapat berfungsi menangkal ancaman dari luar seperti di masa lalu.

3.4 Arsitektur Pertahanan Negara

Peran arsitektur dalam pertahanan negara tidaklah memiliki porsi yang kecil. Dalam subbab ini, pengelompokan arsitektur yang berkaitan dengan pertahanan negara dibagi menjadi batas pinggiran, ruang terbuka, jalan, bangunan dan elemen arsitektural.

Tapal batas mengalami perkembangan semenjak zaman dahulu. Tapal batas yang semula berupa kondisi demografi suatu kawasan misalnya gunung atau sungai berkembang menjadi dinding pertahanan maupun pos atau tugu yang menandakan tapal batas suatu negara. Seringkali negara-kota pada zaman dahulu dibangun pada kawasan yang kondisi demografinya menguntungkan pertahanan misalnya di atas bukit. Kota Roma adalah salah satu contohnya karena dibangun pada kawasan yang berbukit-bukit hingga dijuluki '*the city of seven hills*'. Seiring perkembangan zaman, keberadaan dinding pertahanan dirasa perlu untuk menangkal ancaman dari luar sekaligus mengatur keluar masuknya barang maupun manusia pada suatu kota. Secara umum, dinding pertahanan berfungsi sebagai batas yang mencegah ancaman dari luar masuk ke dalam dan memberikan persepsi akan apa yang disebut 'di dalam' dan 'di luar'. Meskipun pada zaman modern keberadaan dinding pertahanan yang mengelilingi seluruh pinggiran negara seperti yang terdapat pada negara-kota di zaman dahulu sudah tidak ada, keberadaan dinding sebagai bentuk pertahanan negara masih ada pada masa sekarang ini. Pada masa apapun, dinding pertahanan selalu memiliki fungsi yang menciptakan keadaan 'di dalam' maupun 'di luar'. Finoki (2008) memberi contoh pagar perbatasan yang terletak di tapal batas Amerika Serikat dan Meksiko memiliki efek 'di dalam' dan 'di luar' bagi kedua negara tersebut. Menurutnya, dinding selalu memiliki efek mencegah yang di luar masuk dan mencegah yang di dalam keluar. Meskipun fungsi utama dari pagar perbatasan Amerika Serikat-Meksiko adalah untuk mencegah imigran gelap dari Meksiko masuk ke Amerika Serikat, konsekuensi lainnya adalah membuat para calon imigran tersebut tetap berada di dalam Meksiko. Sebaliknya, bagi imigran gelap yang sudah berada di Amerika Serikat tidak dapat keluar dari Amerika Serikat karena keberadaan regulasi yang dapat menjerat imigran gelap bila ketahuan. Hal ini membuat para imigran gelap merasa terperangkap di dalam Amerika Serikat.



Gambar 3.9 Dinding Perbatasan Antara Amerika Serikat dengan Meksiko

Sumber: <http://www.allamericanpatriots.com/photos/us-mexico-border-fence-tijuana>, 24.01.2012

Ruang terbuka memiliki berbagai fungsi. Fungsi paling umum bagi ruang terbuka pada beberapa kebudayaan adalah tempat berkumpul dan berinteraksi antar masyarakat. Meskipun begitu, terdapat beberapa ruang terbuka yang ditujukan sebagai sarana pertahanan negara, terutama untuk menangkal ancaman dari dalam seperti *place d'armes*. Menurut Kostof (1992), dalam sejarah, mempertontonkan pasukan memiliki dua tujuan yaitu untuk meyakinkan penduduknya bahwa pertahanan negara selalu siaga dan menyurutkan niat penduduk yang ingin melawan kekuasaan pemerintah.



Gambar 3.10 Parade Pasukan di Palace Square di St. Petersburg

Sumber: <http://www.arthermitage.org/Prints/Parade-of-the-Guards-Units-on-Palace-Square.html>, 24.01.2012

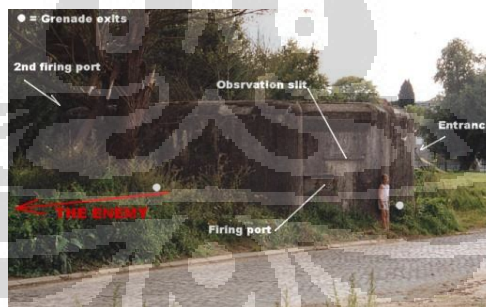
Jalan merupakan infrastruktur yang penting bagi pertahanan negara. Hal itu disebabkan kemudahan perpindahan pasukan maupun kebutuhan logistik merupakan hal yang vital dalam pertahanan negara. Vitalnya jalan pada masa pertahanan dibutuhkan dapat dilihat pada peristiwa dibangunnya Jalan Anyer-Panarukan di Indonesia dengan tenaga pekerja rodi untuk mempersingkat masa pembangunan jalan tersebut. Menurut Kostof (1992), jalan dapat berfungsi sebagai tempat pemerintah menunjukkan kekuasaannya.



Gambar 3.11 Champ d' Mars di Prancis

Sumber: <http://blondietravelblog.com/visiting-paris-for-free/olympus-digital-camera-267/>,
24.01.2012

Bangunan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari arsitektur. Bangunan sebagai bagian dari pertahanan negara memiliki berbagai macam variasi seperti misalnya pangkalan militer, benteng atau *bunker*. Bangunan-bangunan ini ada yang memiliki fungsi di masa damai dan masa perang ataupun hanya berfungsi di salah satu masa. Bunker yang dapat dilihat pada gambar 3.11 merupakan salah satu contoh dari bangunan yang hanya digunakan pada salah satu masa yaitu masa perang.

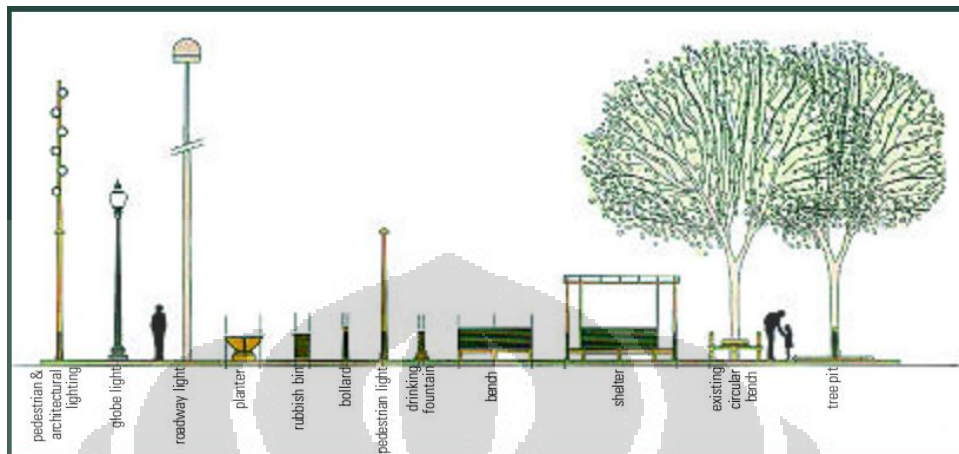


Gambar 3.12 Bunker LW10 di Belgia

Sumber: http://niehorster.orbat.com/021_belgium/forts/forts-part_a.htm, 24.01.2012

Elemen arsitektural memiliki berbagai variasi. Pada masa kini, penggunaan berbagai elemen arsitektural seperti elemen jalan yang diperkeras maupun pemasangan kamera pengawas di berbagai titik telah menjadi standar dari pedoman perancangan kawasan urban, terutama pada area-area yang terdapat di ibukota negara. Elemen arsitektural ini selain memenuhi fungsi dasarnya seperti

lampu jalan sebagai penerangan, merupakan upaya pencegahan dari ancaman yang datang dari dalam seperti bom mobil yang ditenggarai dilakukan oleh teroris di berbagai kota besar di belahan dunia.



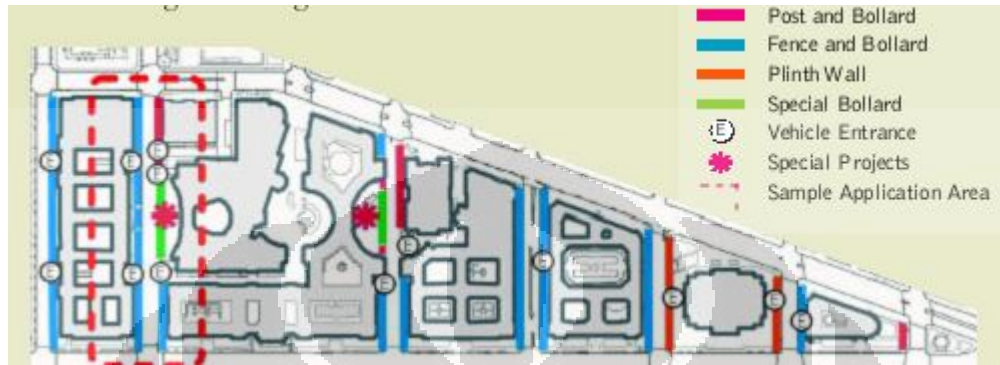
Gambar 3.13 Elemen Arsitektural yang Digunakan Sebagai Elemen Pertahanan di Muka Jalan

Sumber: National Capital Authority, *Urban design guidelines for perimeter security in national capital*, 2003, h. 8

Pertahanan negara tidak dapat dilepaskan dari pertahanan kota penting tempat roda pemerintahan berjalan seperti ibukota negara. Rasa takut akan ancaman bagi keberlangsungan negara terjadi pada kota-kota besar yang vital bagi stabilitas negara. Ancaman terorisme menjadi momok bagi hampir semua negara di seluruh dunia, terutama semenjak kejadian 11 September. Stabilitas negara tentunya akan berpengaruh bagi ekonomi yang tidak dapat disangkal menjadi roda penggerak suatu negara. Usaha berbagai negara untuk menciptakan stabilitas ini dapat dilihat dari berbagai panduan perencanaan kota. Misalnya Amerika Serikat dengan *The National Capital Urban Design and Security Plan* yang dibuat National Capital Planning Commission atau Australia dengan *Urban Design Guidelines for Perimeter Security in National Capital* yang dikeluarkan oleh National Capital Authority. *The National Capital Urban Security Design* berisi berbagai pedoman yang memperlihatkan bagaimana cara mencegah dan menangani ancaman melalui perancangan dan penataan berbagai elemen arsitektural di kota.

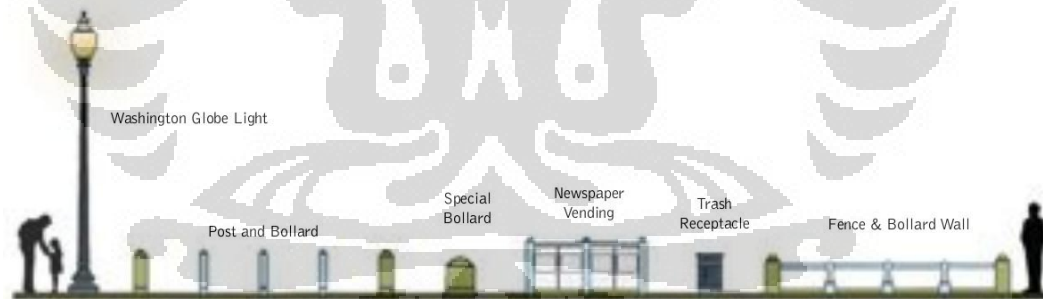
Pedoman yang dibuat untuk pertahanan maupun keamanan dari suatu kota memiliki persamaan seperti penggunaan elemen jalan yang diperkeras sebagai pencegahan bom mobil maupun penataan ruang luar yang menjauhkan

bagian pinggiran (*perimeter*) bangunan dari jalan maupun jalur pejalan kaki. Gambar 3.14 hingga 3.17 memperlihatkan pedoman yang dikeluarkan National Capital Planning Commission untuk daerah Federal Triangle di Amerika Serikat.



Gambar 3.14 Penataan Federal Triangle di Amerika Serikat dengan Elemen Arsitektural Pertahanan Kota

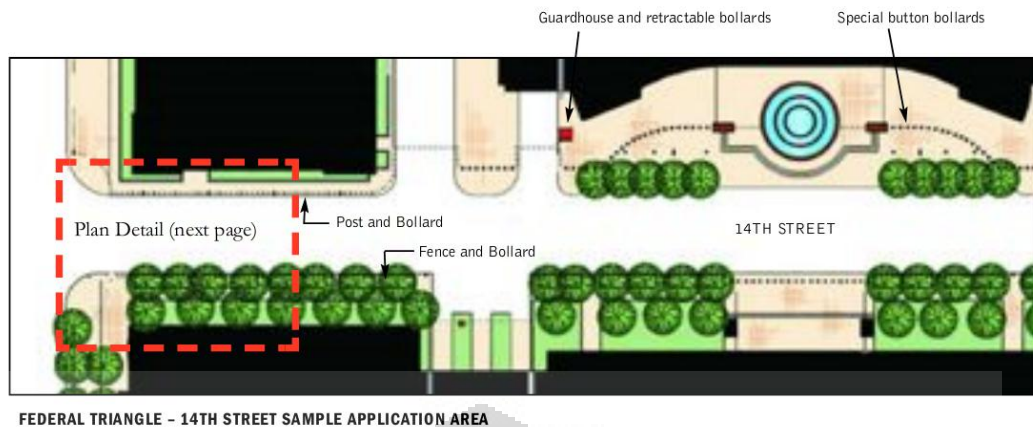
Sumber: National Capital Planning Commission, *The national capital urban design and security plan*, 2002, h. 22



FEDERAL TRIANGLE - HARDENED STREETScape ELEMENTS

Gambar 3.15 Penggunaan Elemen Jalan yang Telah Diperkeras Di Federal Triangle

Sumber: National Capital Planning Commission, *The national capital urban design and security plan*, 2002, h. 23



FEDERAL TRIANGLE - 14TH STREET SAMPLE APPLICATION AREA

Gambar 3.16 Denah Bagian Federal Triangle

Sumber: National Capital Planning Commission, *The national capital urban design and security plan*, 2002, h. 23



Gambar 3.17 Tampak Tipikal dan Potongan Tipikal Federal Triangle

Sumber: National Capital Planning Commission, *The national capital urban design and security plan*, 2002, h. 24

3.5 Pola Spasial Pertahanan Negara

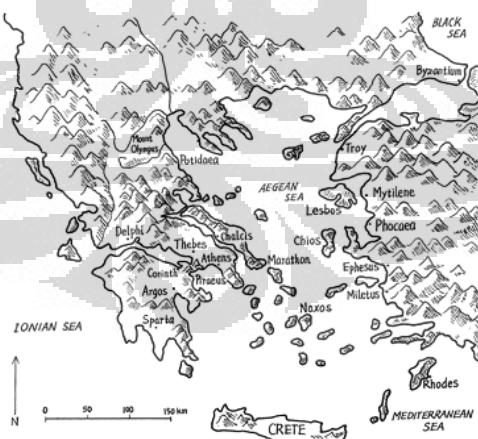
Untuk mengetahui bagaimana pola pertahanan negara yang memiliki keadaan geopolitik yang berbeda-beda maka subbab ini akan membahas contoh dari negara yang menganut geopolitik tertentu. Untuk tipe geopolitik negara-kota, pembahasan mengenai pertahanan berfokus pada kota-kota yang terdapat di Yunani Kuno sebelum memasuki era Hellenistic. Pembahasan tipe geopolitik negara-imperialis akan membahas *Imperium Romanum*, yaitu Romawi pada masa pemerintahan kekaisaran. Sementara pembahasan negara-bangsa akan membahas negara Indonesia. Pengambilan ketiga negara ini memperhatikan beberapa karakteristik yang serupa dari ketiganya. Ketiga negara ini sama-sama terdiri dari daratan, perairan maupun pulau. Ketiganya juga negara dengan ukuran yang

besar, dimana Yunani Kuno terdiri dari ratusan *polis*, *Imperium Romanum* terbentang dari pulau Inggris, semenanjung Mediterania dan sebagian kecil Afrika bagian utara, sementara Indonesia yang memiliki luas wilayah 1.904.569 km² merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.

3.5.1 Pola Spasial Pertahanan Yunani Kuno Sebagai Negara-Kota

3.5.1.1 Keadaan Geografi Yunani Kuno

Yunani Kuno tidaklah terdiri dari satu negara seperti Yunani sekarang ini, namun terdiri dari berbagai negara-negara kecil yang setiap kota (*polis*) merupakan sebuah negara yang termasuk dalam tipe geopolitik negara-kota. Yunani Kuno menggunakan istilah *polis* untuk menunjukkan negara-kota yang terdapat di Yunani kuno. Negara-kota berkembang di Yunani kuno antara tahun 1100 SM – 800 SM. Masing-masing kota memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang bervariasi, dimana kota terkecil hanya sebesar beberapa kilometer dengan jumlah penduduk mulai dari 10.000 jiwa hingga 250.000 jiwa, dimana Athens pada tahun 600 SM memiliki penduduk 35.000 jiwa dan 400 SM berkembang hingga 250.000 jiwa. Keadaan topografi Yunani dipenuhi berbagai kondisi alam seperti bukit, gunung dan sungai yang secara alami menjadi tapal batas dari tiap negara-kota yang ada.



Gambar 3.18 Peta Negara-Kota di Yunani Kuno Menunjukkan Keadaan Geografi Yunani yang Dipenuhi Pegunungan

Sumber: <http://www1.curriculum.edu.au/ddunits/units/ls1fq2acts.htm>, 20.12.2011

Keadaan Yunani Kuno yang memiliki ratusan kota yang berdaulat yang disebut dengan *polis* merupakan akibat dari keadaan topografi Yunani yang

memiliki banyak bukit, gunung serta sungai. Hal ini menjadi salah satu penyebab dari banyaknya kota-kota berdaulat yang berdiri sendiri-sendiri dan tidak termasuk dalam suatu imperialis tertentu. Keadaan topografi ini menentukan bagaimana pandangan Yunani Kuno terhadap teritorium, dimana tiap negara yang ada terdiri dari pusat kegiatan urban (*chora*) yang dikelilingi oleh pinggiran kota dan desa-desa disekitarnya (*asty*) yang bergerak dalam bidang pertanian.



Gambar 3.19 Fresko Karya Ambrogio Lorenzetti Menggambarkan Dinding Kota Memisahkan Area Urban dan *Rural*

Sumber: Spiro Kostof, *The city assembled: the elements of urban form through history*, 1992, h. 17

Iklm adalah salah satu faktor yang menentukan kegiatan keseharian Yunani Kuno (Morris, 1994). Iklim di Yunani mendorong timbulnya demokrasi. Rata-rata Penduduk Yunani tidaklah pernah besar jumlahnya, hanya sekitar tiga kasus yang memiliki penduduk lebih dari 20.000 jiwa, yaitu Athena (negara-kota yang berada pada dataran Attica, dan bukanlah kota tipikal di Yunani), Syracuse dan Acragas yang keduanya berada di pulau Sicily. Kebanyakan *polis* di Yunani Kuno memiliki penduduk yang tidak lebih dari 5.000 jiwa, hal ini memungkinkan semua penduduk untuk berkumpul di satu tempat sepanjang tahun, sehingga memungkinkan *self-government* yang dibawa Yunani. Iklim yang ada mendukung pertanian untuk berkembang.

Morris mengutip pendapat Kitto (1951) dalam *The Greeks* untuk menjelaskan bagaimana keadaan geografi Yunani mempengaruhi pola pikir dan pandangan penduduk Yunani terhadap kota nantinya, sehingga menurutnya kondisi masyarakat Yunani Kuno tidak pernah menjadi eksklusif pada kehidupan urban dan menjauhi kehidupan *rural*:

“Town and country were closely knit- except in those remoter parts like Arcadia and western Greece, which had no towns at all. City life, where it developed, was always conscious of its background of country, mountains and sea, and country life knew the usage of the city. This encouraged a sane and balanced outlook; classical Greece did not know at all the resigned immobility of the steppe-mind, and very little the short sighted follies of the urban mob” (1994, h. 35)

Hal yang sama juga disebutkan oleh Wycherley sehingga Morris mengutip pernyataan Wycherley untuk memperkuat pandangannya: *“The life of the Greek city state was founded upon agriculture and remained dependent on it; city state and city were not necessarily the same even though the former was most visibly embodied in the latter.”* (1994, h. 36)

3.5.1.2 Keadaan Politik Yunani Kuno

Setiap negara-kota di Yunani kuno memiliki sistem pemerintahannya sendiri karena tiap negara-kota berkembang secara terpisah. Yunani Kuno memiliki enam jenis pemerintahan pada negara-kota, yaitu monarki, aristokrasi, oligarki, tirani, demokrasi, dan anarki. Pada mulanya, kebanyakan negara-kota memiliki sistem pemerintahan monarki yang diperintah oleh raja. Monarki berasal dari bahasa Yunani *mono* yang berarti satu dan *arkho* yang berarti kepala utama paling berkuasa. Sistem monarki ini bergantung pada hubungan darah untuk menentukan siapa raja berikutnya. Meskipun raja memiliki kekuasaan tunggal, pada kenyataannya raja seringkali dibantu oleh para aristokrat yang terdiri dari kalangan bangsawan maupun pemilik tanah. Sistem pemerintahan aristokrasi adalah jenis pemerintahan yang banyak digunakan negara-kota di Yunani pada 800 SM. Pemegang kekuasaan adalah para pemilik tanah yang kekuasaannya dapat diwariskan pada anak-anaknya. Aristokrasi berasal dari bahasa Yunani *aristos*, yang berarti terbaik dan *kratos* yang berarti kekuatan. Oligarki merupakan pemerintahan dimana pemilik kekuasaan dimiliki oleh sekelompok kecil orang. Kelompok ini dapat terdiri dari orang yang memiliki latar belakang aristokrat, militer maupun orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pemerintahan. Oligarki berasal dari bahasa Yunani *oligos*, yang

berarti sedikit. Pada masa-masa tertentu, Yunani diperintah oleh tirani. Tirani adalah sebutan saat seseorang memiliki kekuasaan tunggal dan menjadi pemegang kekuasaan tunggal, sehingga semua keputusan mengenai hal ihwal negara diputuskan oleh satu orang. Tirani, berasal dari bahasa Yunani *turannos*, yang berarti pemimpin yang kejam. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang semua orang memiliki hak untuk bersuara. Athens, setelah mengalami berbagai jenis pemerintahan, akhirnya bersistem demokrasi pada tahun 500 SM, setelah sedikit demi sedikit para penduduknya memiliki hak untuk berbicara. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuatan. Di saat kekuasaan akan negara dari seseorang atau sekelompok orang jatuh, terkadang terdapat kondisi kekuasaan tersebut kosong. Kondisi ini disebut anarki, berasal dari bahasa Yunani *anarkhos* yang berarti tanpa pemimpin.

Pada awalnya, *polis* yang bersistem monarki diperintah oleh *the basileus*. Meskipun pada awalnya memiliki kekuasaan yang absolut, lama-kelamaan kekuasaan monarki ini melemah sehingga berakhir pada tahun 683 SM dan digantikan oleh *aristocratia*. *Aristocratia* terdiri dari keluarga-keluarga yang memiliki pengaruh penting di *polis*, yang kebanyakan merupakan tuan tanah (*landowner*). Pemegang kekuasaan tertinggi adalah *the archons* yang terpilih dari *aristocratia* dan gelar kepala negara adalah *archon basileus*. Dewan penasihat adalah *Areopagus*, dimana nama tersebut berasal dari bukit tempat sidang negara dilangsungkan. Dewan ini terdiri dari keluarga bangsawan. Seiring dengan semakin berpengaruhnya para pedagang, mereka pun masuk ke dalam sistem pemerintahan. Solon (640 SM-560 SM) yang menjadi *archon* pada tahun 594 SM membuat perubahan-perubahan seperti membangun *ecclesia*, majelis baru yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat, juga dewan *Boule* yang lebih kecil menjadi pengurus dari keseharian kota. Tujuan Solon adalah tercapainya *eunomia*, keseimbangan antar berbagai kelas dalam *society* di Yunani. Tujuan ini diteruskan oleh penerusnya, seperti Cleisthenes yang berhasil menambah tingkat partisipasi rakyat dengan memperbanyak kursi dewan. Puncaknya adalah saat Pericles (495-429 SM), dengan terjadinya '*democratic revolution*' pada tahun 461 SM membuat *ecclesia* menjadi pusat pemerintahan dan membatasi kekuasaan dari *boule* dan pada saat yang sama peran kalangan bangsawan *aeropagus* dikurangi sebatas

fungsi seremonial. Dalam *Politics*, Aristotle mempertanyakan seperti apakah seharusnya kedaulatan dalam *polis*, dan menurut dirinya, jawaban mengenai tempat terbaik dari kedaulatan *polis* adalah di dalam rakyat, seperti dikutip dalam Parker: “*The majority ought to be sovereign . . . For it is possible that the many, no one of whom taken singly is a good man, may yet taken all together be better than the few, not individually but collectively.*” (2004, h. 35)

Sistem demokrasi yang akhirnya diberlakukan oleh sebagian besar *polis* di Yunani Kuno dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar Yunani Kuno dalam bidang politik. Hingga sekarang, sistem politik demokrasi dianggap sebagai salah satu sistem politik yang lebih melibatkan rakyat dari suatu negara pada urusan negara dibandingkan dengan sistem lainnya. Penggunaan sistem demokrasi di *polis*, nantinya akan berpengaruh pada pola pertahanan Yunani Kuno dan akan dijelaskan di subbab berikutnya.

3.5.1.3 Polis Sebagai Bentuk Negara-Kota Yunani Kuno

Awal sejarah Yunani yang sering disebut Masa Gelap Yunani (*Dark Age of Ancient Greece*) berawal dari orang Yunani yang bermukim di sekitar pantai Yunani, mereka tergantung dengan laut Aegean untuk berdagang, hal ini sama dengan rumpun Phoenician yang karena letaknya dekat dengan laut Mediterania.

Komunitas berbeda yang terdapat di Yunani adalah Aegean, Achaeen dan Pelasgian. Peradaban Aegean dengan pusatnya di Crete seringkali disebut Minoan dimana kebudayaan mereka mendominasi Yunani kuno pada sekitar tahun 2500 SM. Namun, karena adanya gunung meletus pada tahun 1400 SM yang menghancurkan pulau Thera, kemudian Minoan hancur dan budaya mereka kemudian diadaptasi oleh Mycenaean, yang merupakan bagian dari Achaeen dengan pusatnya Mycenae.

Pemukiman Yunani kemudian berubah menjadi negara-kota (*polis*). Kebanyakan *region* dipimpin oleh dewan dan raja, dimana kebanyakan raja bersikap tiran kepada penduduknya. Hal ini menyebabkan pemberontakan. Meskipun Yunani sangat menghormati konsep demokrasi, pada kenyataannya hanya sebentar saja Yunani mengalami masa demokrasi, yaitu dimasa antara perpindahan pemerintahan yang tidak stabil.

Pada tahun 490 SM, terjadi perang Persian setelah Yunani diserang oleh bangsa Persia yang dipimpin oleh Darius *the Great of Thrace*. Yunani berhasil menangkalkan serangan tersebut di Marathon atas pimpinan Miltiades, namun saat Persia kembali menyerang pada tahun 480 SM di bawah pimpinan Xerxes, kota Athens pun jatuh dan hancur. Pada perang selanjutnya akhirnya Yunani dapat menang melawan Persia di Salamis setelah mengalahkan pasukan laut Persia.

Pada tahun 461 SM, terjadi perang Peloponnesian yang terjadi antara Athenians dan Spartans. Kota Athens yang memiliki pemerintahan demokratis diserang oleh pemerintahan aristokrat Sparta yang menganggap hal ini sebagai ancaman. Perang ini dimenangkan oleh Athens, kemudian mereka menandatangani perjanjian damai dengan Persia dan mengadakan gencatan senjata dengan Sparta. Athens akhirnya jatuh setelah kalah pada perang Peloponnesian kedua dan pemerintahannya diambil alih oleh *the Thirty Tyrants*, kelompok aristokrat dari Spartan.

Pada 359 SM, Philip II menjadi raja dari Macedon. Thebes, Athens dan Sparta menjadi tiga kekuatan yang mengancam. Akhirnya Philip II berhasil mengambil alih seluruh semenanjung Yunani. Pada tahun 336 SM, Alexander *the Great* naik tahta setelah Philip II dibunuh. Di bawah pemerintahan Alexander *The Great*, Mesir dan kekaisaran Persia dapat diambil alih. Pada masa Alexander *The Great* inilah Yunani memasuki masa peradaban Hellenistic, yang menurut Parker (2004), *polis* mulai mengalami kemundurannya pada masa ini. Setelah kematiannya pada tahun 323 SM, kekaisarannya dibagi menjadi tiga region utama, yaitu Ptolemaic Egypt, Antigonid Macedonia, dan Seleucid Syria dan masa setelah kematiannya dikenal sebagai Hellenistic. Pada masa ini, tiap *region* bermusuhan dan berusaha saling menjatuhkan, akhirnya pada tahun 197 SM menjadi tahun kejatuhan Yunani setelah dikalahkan oleh Romawi di Kynoskephalai.

“It seems incredible”, wrote Thomas Callander, ‘that in what seems a moment in time, in a tiny corner of Europe, occupied by less than five million landmen and islanders endowed with scanty natural resources, there should have been created a culture, a commerce, a social order and a polity . . . renowned beyond all others as the most original

and brilliant” (Parker, 2004, h. 28)

Kata-kata di atas dapat menggambarkan bagaimana peradaban Hellenic merupakan salah satu pemuka dari negara yang menggunakan sistem negara-kota. Peradaban ini mengalami perkembangan baik dalam hal pengetahuan, seni, arsitektur dan ditandai dengan perdagangan laut, dilindungi oleh pasukan maritim dan diatur secara politik didasari apa yang dikenal dengan *polis*, negara-kota. Meskipun Yunani kuno mengalami berbagai jenis pemerintahan, Yunani mulai menggunakan sistem *polis* pada abad ke delapan SM. *Polis* tidak hanya menunjukkan satu bentuk dari negara-kota, namun memiliki berbagai variasi dimana *polis* yang diberlakukan di Athens adalah yang paling terkenal. Istilah *polis* di Yunani tidak menunjukkan kota, namun menunjukkan area urban. Menurut Parker (2004) hal ini muncul dari pencampuran komunitas *rural* dengan proses yang dikenal sebagai *synoikismos*. Parker mengutip kata-kata Thucydides untuk menjelaskan proses ini:

“In the days of Cecrops and the first kings . . . Athens was divided into communes, having their own town-halls and magistrates. Except in case of alarm the whole people did not assemble in council under the king, but administered their own affairs, and advised together in their several townships . . . But when Theseus came to the throne, he, being a powerful as well as a wise ruler, among other improvements in the administration of the country . . . united all the inhabitants of Attica in the present city. They continued to live in their own lands, but he compelled them to resort to Athens as their metropolis . . . A great city thus arose which was handed down by Theseus to his descendants, and from his day to this the Athenians have regularly celebrated the national festival of the Synoikia, or union of the communes, in honour of the Goddess Athene.” (Parker, 2004, h. 32)

Proses *synoikismos* menimbulkan rasa kebersamaan dan tujuan bersama dari para penduduknya.

Arti secara harfiah dari kata *polis* adalah benteng, dan asal mulanya adalah pertahanan. Kata *polis* ini juga menjadi asal dari kata politik. Hal ini tidaklah aneh jika melihat bagaimana Yunani Kuno menjadi salah satu peradaban

dengan politik yang berkembang. Di sekitar benteng, acropolis atau ‘kota yang tinggi’ dibangun dan dengan masa damai di sekitarnya acropolis mulai memperluas keluar dari bukit pertahanan. Pada pusat acropolis kota yang berdasarkan perdagangan dan industri berdiri, dan menjadi pusat pemerintahan. Meskipun begitu, pada awalnya, acropolis merupakan kota yang memiliki hak religius dari *polis*. Dianggap sebagai tempat suci kuil dewa atau dewi pelindung kota. *Polis* merujuk pada negara dan wilayahnya dengan rata-rata besarnya sebesar negara Inggris (Parker, 2004). Bagian urban dari *polis* disebut *asty* sementara bagian disekitarnya disebut *chora*. Keduanya membentuk sistem urban-rural; dimana kota menjadi pusat pertanian dan industri, sementara kawasan di sekitarnya memproduksi barang pertanian dan material mentah. Karena sejak awal Yunani mengimpor padi-padian, lahan pertanian disekitar kota ditanami tanaman seperti anggur dan zaitun yang bernilai jual tinggi. Buah, sayur, dan hasil peeteranakan yang dihasilkan di *chora* dapat mencukupi lebih dari kebutuhan sehari-hari *asty* sehingga dapat diekspor. *Polis* adalah entitas berdaulat yang memegang kendali penuh akan masalahnya. Setelah proses awal dari *synoikismos*, *asty* dan *chora* akan menjadi unit terpadu yang menciptakan entitas yang dianggap memiliki bentuk optimal pemerintahan (Parker, 2004).

Menurut Aristotle, *polis* tercipta untuk kehidupan yang baik, dimana keberadaan negara adalah untuk kebaikan dari penduduknya, sementara pada tipe lain dari negara, penduduk ada untuk kebaikan negara. Hal ini dikarenakan ukuran *polis* yang tidak terlalu besar membuat para penduduk dapat terlibat pada kepentingan negara sehingga rasa kepemilikan penduduk akan negaranya menjadi besar.

Yunani Kuno terkenal dengan istilah *polis* yang digunakan untuk menunjukkan kota. Kitto (1951) menjelaskan istilah *polis* sebagai berikut:

“Polis is the greek word which we translate as city state; it is a bad translation, because the normal polis was not much like a city and was very much more than a state ... since we have not got the thing the Greeks called the polis, we do not possess an equivalent word.” (Morris, 1994, h. 35)

Disini Kitto mencoba menjelaskan untuk menghindari istilah negara-kota sebagai

kata padanan *polis*, karena kata *polis* berarti lebih dari sekedar negara-kota, kebanyakan negara-kota di dunia tidak dapat disepadankan dengan konsep *polis* yang terdapat di Yunani. Penggunaan kata kota Yunani di sini akan digunakan untuk menunjukkan pusat kegiatan urban dari negara-kota yang terdapat di Yunani

Tentunya negara membutuhkan pertahanan yang merupakan tugas dari pasukan bersenjata. Pasukan merupakan *hoplites*, dimana anggotanya berasal dari warga negara dengan baju zirah berat yang dimaksudkan sebagai dinding pertahanan bergerak. Sementara, angkatan laut melindungi dari serangan yang berasal dari laut dan melindungi perdagangan maritim yang merupakan sumber pendapatan dari *polis*.

3.5.1.4 Pola Spasial Pertahanan Yunani Kuno

Seperti penghuni pantai Mediterania lainnya, Yunani bermigrasi dari bagian timur Eropa ke bagian selatan melalui beberapa gelombang pada *millenium* kedua sebelum masehi, yaitu Achaeen Dorian dan Ionian, yang akhirnya para penduduk Yunani bermukim di sekitar laut Aegean di bagian utara dari pusat kebudayaan Minoan. Tempat ini menjadi tanah dari Yunani, *Hellas* yang disebut oleh Romawi sebagai *Graecia* (Parker, 2004). Yunani Achaeen dengan Mycenae sebagai kota terpenting yang terletak di sebelah utara Peloponnesus banyak dipengaruhi oleh peradaban Minoan. Dorian juga berpindah ke Peloponnesus dan dari sana bermigrasi melintasi Aegean ke pantai barat Anatolia, dimana disana adalah tempat peradaban Hellenic pertama diperkirakan muncul. Keistimewaan yang paling menonjol dari Ionian adalah negara-kota, dimana diantara yang paling penting adalah Miletus, Ephesus dan Halicarnassus.

Meskipun asal mula Yunani berbeda dengan Phoenician yang sempat dijelaskan di bab sebelumnya, Yunani juga berpindah ke tempat yang memiliki karakteristik yang sama dengan yang Phoenician tinggali. Keadaan iklim dan geomorfologi yang terdapat di hampir seluruh tanah di Mediterani menyebabkan Yunani memiliki keterbatasan untuk bercocok tanam maupun kekayaan alam. Sesuai dengan apa yang Herodotus sebutkan “*Hellas and poverty have always been foster-sisters*” (Parker, 2004, h. 29.). Sama seperti apa yang Phoenician

lakukan, Yunani pun melakukan perdagangan maritim. Dari sini, Yunani dapat mencukupi kebutuhannya dengan berbagai produk dari daerah lain yang lebih besar dan jauh. Terletak di timur laut laut Mediterania, Yunani terpisah dari aktivitas imperialis yang terdapat di bagian timur hingga tenggara dari Laut Mediterania, dimana Philistine dan Phoenician terdapat. Namun, sama seperti kedua rumpun tersebut, sejak awal perkembangannya, Yunani menggunakan sistem negara-kota.

Ketika pulau dan jazirah di sekitar pantai Aegean menyediakan pertahanan bagi Yunani yang belum lama terbentuk ini, lokasi dari kota-kota Ionian memberikan mereka akses ke orang Anatolia, sehingga menghasilkan peradaban pantai dan daratan terjalin. Salah satu yang terpenting adalah Lydian dari Asia Kecil sebelah barat yang membangun hubungan dekat dengan kota-kota Ionian di sebelah barat mereka. Ibukota Lydian, Sardis, terletak di sungai Hermus, sekitar 50 Km dari Miletus. Hubungan antara kedua kota ini sangat bermanfaat satu sama lainnya, tidak seperti hubungan antara kota pantai dan daratan yang terdapat di sebelah timur Mediterania yang tidak dapat terlepas dari konflik. Ionian mempelajari bagaimana mengerjakan metal, gerabah dan melukis. Yang paling signifikan adalah adaptasi penggunaan koin yang akan menjadi hal penting dalam perkembangan perdagangan Yunani. Perang Troya yang terjadi merupakan efek dari persaingan antara penduduk di sebelah timur dan sebelah barat laut Aegean dan memperebutkan kontrol dari Hellespontus yang merupakan lokasi penting perdagangan Yunani dengan daerah di Laut Hitam.

Kekalahan Lydian pada kekaisaran Persia menimbulkan perubahan besar pada pusat dari Yunani Kuno. Lydian dan Yunani menjadi bagian dari Kekaisaran Persia. Dan garis bujur membagi Aegean antara kota Yunani di semenanjung yang tidak menjadi bagian dari Persia dan kota Ionian yang menjadi daerah taklukan Persia. Hal ini membuat pusat dari peradaban Hellenic berpindah ke sebelah barat, dimana kota-kota menjadi pusat industri dan perdagangan dan tetap menjadi negara-kota yang berdiri sendiri. Namun, karena kota-kota ini memberikan bantuan bagi kota Ionian yang ditaklukkan menyebabkan Persia memutuskan untuk menaklukkan kota-kota Yunani ini. Namun, kemenangan Yunani atas Persia di Salamis pada 480 SM menyudahi ancaman dari Persia. Athens menang

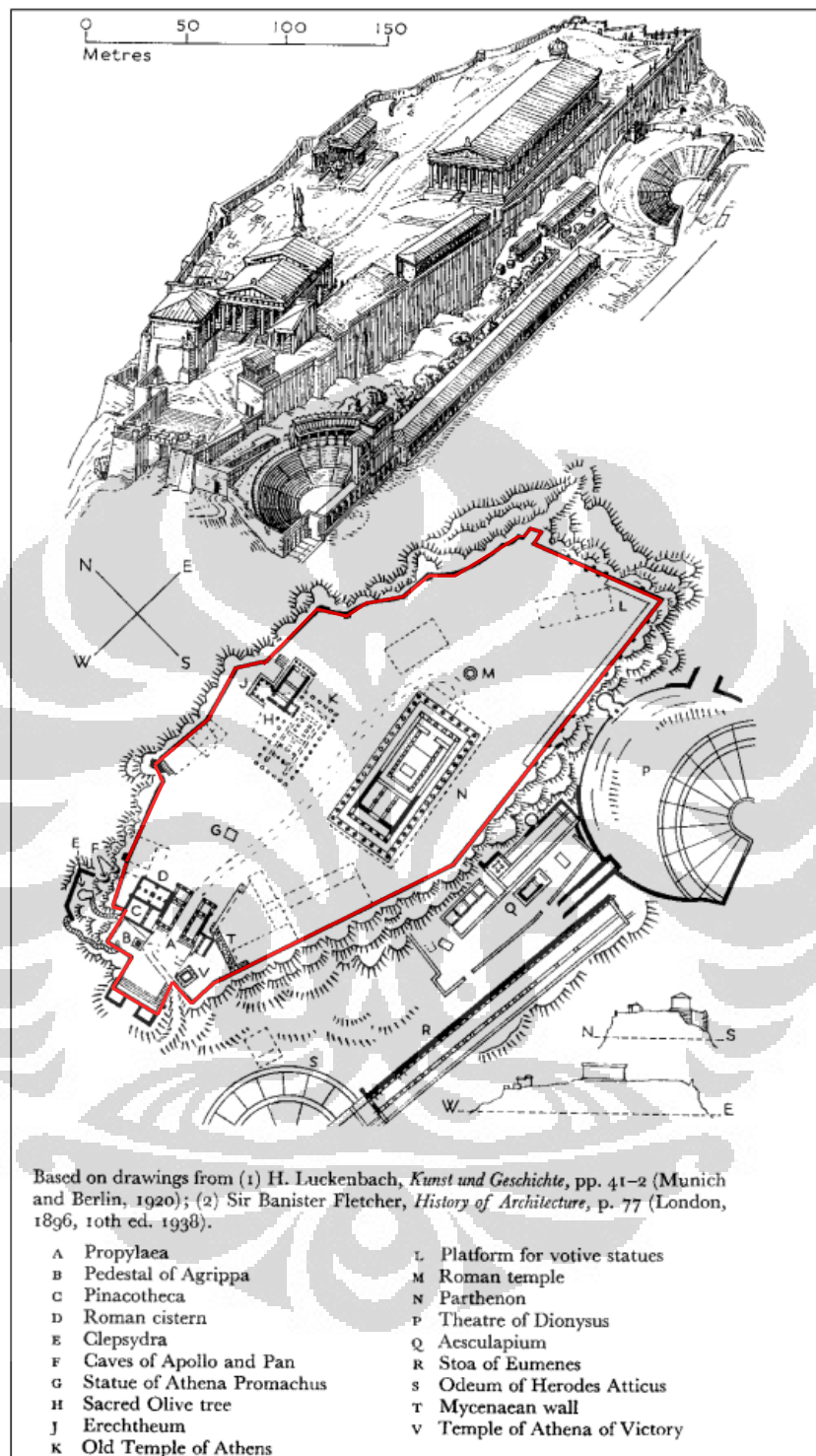
setelah mendapat petunjuk dari dewi Athena untuk menggunakan strategi ‘dinding kayu’ (*Wooden Wall*), yaitu kapal-kapal yang merupakan hal yang natural bagi mereka. Sehingga hingga seterusnya, pulau dan semenanjung Yunani terus dilindungi oleh ‘dinding kayu’. Kesuksesan Yunani berlanjut hingga bergerak ke sebelah selatan Mediterania hingga pantai Mesir dan mendirikan lima kota Pentapolis. Kemudian pergerakan ke barat hingga bagian selatan Itali dan Sicily juga menumbuhkan beberapa koloni. Keseluruhan area ini akhirnya disebut oleh Romawi sebagai *Magna Graecia* yang penting sebagai pusat peradaban Hellenic.

Menurut Morris (1994) elemen dasar dari rencana kota Yunani adalah acropolis, dinding pertahanan kota, agora, distrik pemukiman, area budaya dan kesenangan, daerah religius (bila terpisah dari acropolis), pelabuhan dan distrik industri. Acropolis merupakan istilah yang menunjukkan puncak bukit pertahanan pada banyak kota di masa awal Yunani dan merupakan ibukota yang difortifikasi pada masa berikutnya. Pada perkembangannya acropolis mengalami perubahan tergantung dari kondisi topografinya. Acropolis menjadi pusat religius di Athens, karena letak acropolisnya yang berada di puncak bukit yang terdapat di dataran. Sementara di Miletus, acropolis justru ditinggalkan, karena lokasinya yang didekat laut menyebabkan kotanya terbatas hanya dapat berkembang di satu arah saja. Selama kota tetap ukurannya dan acropolis menjadi pusatnya, tidak ada kebutuhan untuk membangun dinding pertahanan kota. Ketika diserang, penduduk Yunani akan melarikan diri ke acropolis hingga akhirnya acropolis jatuh atau menyerah dan tidak menyerang lagi. Hal ini dikarenakan acropolis dikelilingi oleh dinding pertahanan karena terdapat berbagai bangunan penting, terutama kuil.



Gambar 3.20 Acropolis Yunani

Sumber: Geoffrey Parker, *Sovereign city: the city-state ancient and modern*, 2004, h. 33



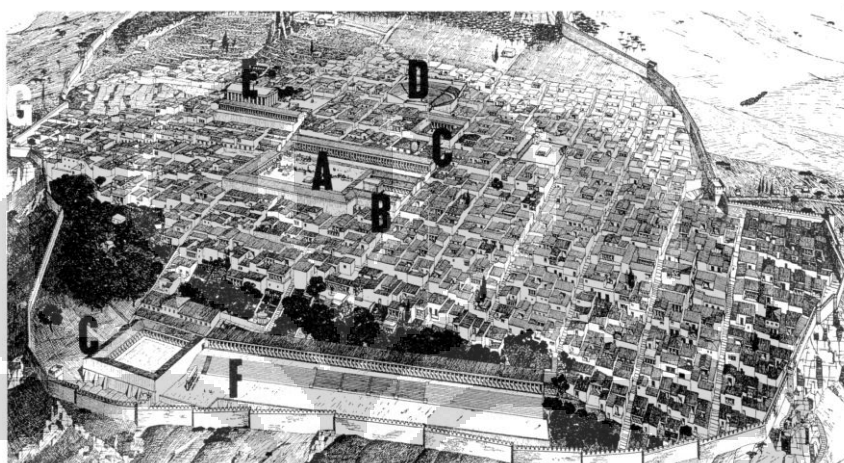
Keterangan:

— Dinding Acropolis

Gambar 3.21 Denah dan Perspektif Acropolis

Sumber: Geoffrey Parker, *Sovereign city: the city-state ancient and modern*, 2004, h. 37, telah diolah kembali

Sekitar abad ke lima, akhirnya nilai dari apa yang berada di luar acropolis akhirnya membuat dinding kota dibangun. *Society* Yunani yang demokratis merasa bahwa dinding perlindungan yang dibangun hanya disekitar acropolis tidak sesuai dengan semangat demokrasi, dan pertahanan seharusnya diberlakukan untuk melindungi seluruh rakyat. Aristotle juga yang menyebutkan bahwa acropolis sesuai untuk oligarki dan monarki dan titik dasar untuk demokrasi (Morris, 1994).



Keterangan:

A: Agora; B: Kuil Zeus; C: Gymnasium; D: Tidak Dijelaskan dalam Sumber; E: Kuil Athena; F: Stadium; G: Gerbang Utama Kota

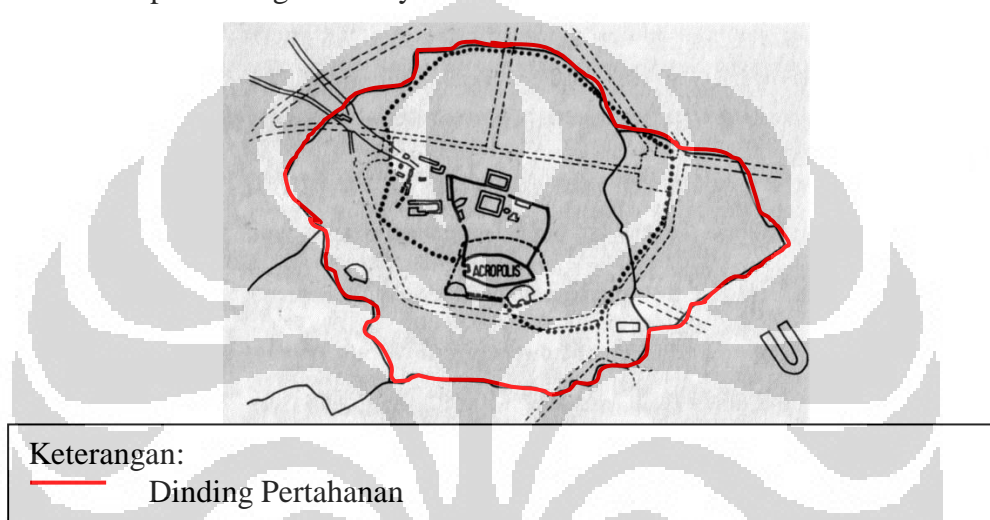
Gambar 3.22 Interpretasi A. Zippelius Mengenai Kota Priene yang Dikelilingi Dinding Kota

Sumber: A. E. J. Morris, *History of urban form: before the industrial revolutions*, 1994, h.45

Tidak semua kota di Yunani mengalami proses fortifikasi. Kebanyakan kota memiliki dinding yang secara longgar tersebar di antara area urban yang terencana maupun tidak terencana dengan mengambil keuntungan pada daerahnya. Menurut Morris (1994) penyebab dinding yang fleksibel dari dinding kota di Yunani dikarenakan pada masa setelah Yunani kuno, hal yang menentukan urban form adalah keseimbangan populasi di bagian urban dan *rural* dari negara-kota dan peraturan pembatasan populasi dengan mendirikan kota baru.

Athens adalah negara maritim. Meskipun *asty* dari Athens terletak jauh lebih ke dalam, namun terhubung dekat dengan laut melalui pelabuhan. Sedari awal perdagangan menjadi titik tumpu dan dilindungi oleh armada laut besar di

Aegean dan oleh *Great Walls* (Parker, 2004). Pembangunan kedua hal tersebut dimulai saat administrasi dari Cimon dan menghubungkan Athens dengan Piraeus untuk memastikan kota tidak dapat dilumpuhkan. Melalui Piraeus mengalir barang dan pedagang dari seluruh dunia dan hal ini menyebabkan Athens terpengaruh di banyak hal. Hal yang perlu diperhatikan adalah Athens menghargai kebebasan dan perbedaan serta partisipasi dari penduduknya di pemerintahan. Athens memiliki dinding Themistocles yang mengelilingi kotanya untuk memastikan perlindungan kotanya.



Gambar 3.23 Dinding Pertahanan Themistocles di Athens

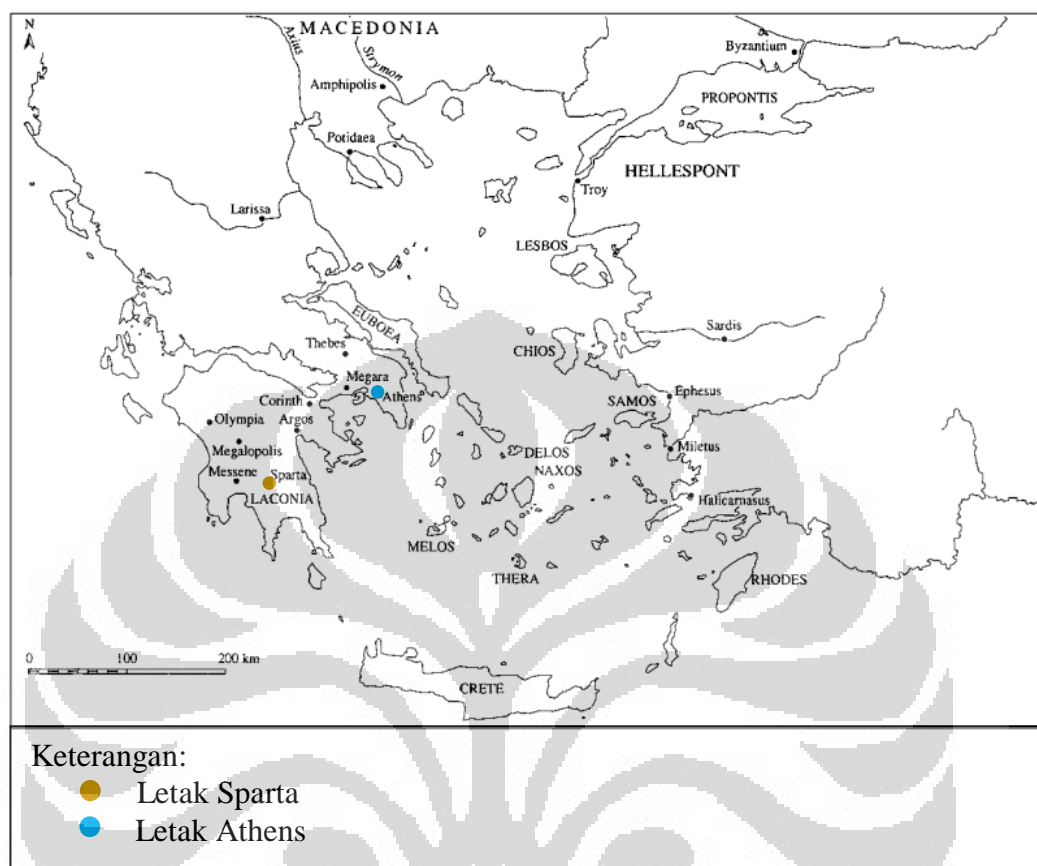
Sumber: A. E. J. Morris, *History of urban form: before the industrial revolutions*, 1994, h.50, telah diolah kembali

Bentuk lain dari *polis* di masa Hellenic dapat dilihat dari kota Sparta. Sparta sebagai negara di daratan yang terletak di pedalaman Laconia, sekitar 30 km dari pelabuhan terdekat lebih berpikiran tertutup dan berusaha mencapai kemakmuran ekonomi dan pertahanan dengan mendominasi wilayah Peloponnesus, dimana kontrol ini didapatkan melalui angkatan bersenjata yang besar dan efisien sebagai instrumen pengurusan negara dan pengaturan penduduknya. Seperti Athens, Sparta terbentuk melalui proses *synoikismos* yang menyatukan beberapa desa di lembah Eurotas di Peloponnesus disekitar bukit seperti Acropolis di Athens. Sparta meluaskan wilayahnya hingga daratan subur di Laconia yang dilindung oleh pegunungan di barat dan timur. Awalnya Sparta diperintah dengan sistem monarki, namun sekitar abad ke-8 SM terdapat *constitutional settlement, the Great Rhetra*, yang semakin mengurangi kekuasaan

monarki, dengan memperluas basis pemerintahan dan membawa para aristokrat dan kelas yang lebih bawah. Penduduk memiliki kewajiban dan hak, yang salah satunya adalah menjadi bagian dari pelayanan. Messenians menjadi hamba sahaya dari Spartans yang menyebabkan penduduk Sparta memiliki banyak waktu untuk memikirkan politik dan pertahanan. *Citizen body* dari Sparta menjadi bentuk dari aristokrasi memerintah teritorial dan populasi yang besar. Akhirnya, *the Great Rhetra* mengumumkan pemisahan kekuasaan di pemerintahan diantara *paella*, *gerousia* dan *monarki*. *Apella* dipilih oleh *citizen body*, *gerousia* terdiri dari aristokrasi dengan kepala negaranya adalah dua raja. Lokus kekuasaan terdapat di *gerousia* sehingga akhirnya Sparta memiliki sistem oligarki hingga kehilangan keberadaannya sebagai *polis*. Karakteristik yang tidak mudah berubah ini juga terlihat dari *society* yang disiplin dan terkontrol dan semua penduduk wajib memiliki kesetiaan mutlak kepada negara. Kebebasan yang dimiliki setiap penduduk terbatas, salah satunya dapat tercermin dari keberadaan *hoplites*, yang berasal dari kewajiban para pemuda untuk masuk ke angkatan bersenjata dalam waktu yang tidak sebentar dan menandakan bahwa *society* ini sangat erat dengan militer. Tidak seperti kota lainnya di Yunani, Sparta tidak memiliki dinding, hal ini dikarenakan *hoplites* adalah pertahanannya dan ekspansi teritorialnya di seluruh Peloponessus kecuali dibagian kecil Corinth memastikan keamanan dari Sparta. Daratan yang luas di semenanjung ini menjadi sumber penting Sparta untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari berupa makanan dan berbagai sumber daya alam lainnya. Hal ini menyebabkan Sparta terlibat lebih sedikit daripada negara-kota lainnya dalam hal perdagangan karena dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

Perbedaan letak geografis antara Sparta dan Athens ditunjukkan oleh gambar 3.24. Perbedaan geografis antara Athens dan Sparta inilah yang mendasari perbedaan sistem politik antara keduanya. Hal ini membuat Aristotle mempertanyakan apakah istilah *polis* dapat digunakan untuk menunjukkan negara-kota secara umum dan mempertimbangkan bahwa keberadaan dari *politeia*, konstitusi adalah kriteria terpenting dari keberadaannya. Menurut Parker (2004), Athens dan Sparta dapat dilihat sebagai dua bentuk negara berbeda yang berbasis dari kekuatan laut dan kekuatan daratan. Basis kekuatan laut dan darat

iniilah yang membuat secara politik perbedaan antara keduanya timbul dan membuat pertahanan negara antara keduanya bergantung pada hal yang berbeda.



Gambar 3.24 Perbandingan Lokasi Athens dan Sparta

Sumber: Geoffrey Parker, *Sovereign city: the city-state ancient and modern*, 2004, h. 30, telah diolah kembali

3.5.2 Pola Spasial Pertahanan *Imperium Romanum* Sebagai Negara-Imperialis

3.5.2.1 Menuju *Imperium Romanum*

Seperti telah disebutkan sebelumnya, *Imperium Romanum* adalah salah satu negara-imperialis paling terkenal di dunia, hal ini dikarenakan daerah kekuasaannya yang besar, hingga mencapai Inggris dan Afrika Utara. Meskipun terkenal sebagai salah satu negara-imperialis paling berpengaruh di dunia, *Imperium Romanum* bermula dari Roma yang sebelumnya merupakan negara-kota dan bertransformasi hingga menjadi negara-imperialis.

Tahun berdirinya kota Roma dipercaya sebagai tahun 753 SM. Hal ini berdasarkan legenda pendiri Roma, yaitu anak kembar bernama Romulus dan

Remus, putra dari Rhea Silvia yang menjadi korban dari perebutan kekuasaan dan dibuang ke sungai menggunakan keranjang. Kemudian kedua kembar ini dibesarkan oleh serigala hingga akhirnya mereka menemukan kota Roma di puncak bukit Palatine dan Romulus menjadi raja yang pertama.



Gambar 3.25 Sisi Koin Perak *Didrachem* Menggambarkan Legenda Serigala Menyusui Kembar Romulus dan Remus

Sumber: http://www.vroma.org/images/raia_images/lupa_coin.jpg, 20.12.2011

Sejarah Roma dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase diperintah oleh Raja, 753 SM - 510 SM; fase Republik, 509 SM - 27 SM; dan fase Imperial 27 SM - 330 M (Morris, 1994). Kota Roma diyakini awalnya adalah daerah pertanian yang diolah oleh suku Latin dan berada di bawah kekuasaan dinasti Tarquins yang merupakan rumpun Etruscans. Saat raja terakhirnya, yaitu Tarquinius jatuh karena revolusi, *res publica* pun muncul, yang tidak akan ada lagi raja dan pemerintah baru muncul dari garis oligarki. *Res publica* merupakan bahasa Latin yang berarti urusan publik, dan merupakan asal kata dari republik. *Res* berarti sesuatu yang nyata, sementara *publica* bermakna hal yang berkaitan dengan negara atau publik.

Pada masa republik, Roma sering mengalami konflik dan peperangan dengan rumpun Etruscans yang lain, sehingga akhirnya membuat aliansi pertahanan dengan suku Latin yang lain, *Latin League*. Setelah berbagai kemenangan yang terjadi, Roma akhirnya mengontrol aliansi pertahanan tersebut dan aliansi ini digantikan oleh *Roman State of Italia* yang terdiri dari seluruh semenanjung dari Straits of Messina hingga sungai Rubicon.

Transformasi Romawi menjadi negara-imperialis dimulai sejak perang *Punic* dengan negara-kota Carthage. Saat kemenangan pertama dicapai, *chora* Romawi yang saat itu masih berupa negara-kota bertambah luas hingga akhirnya setelah beberapa dekade, Romawi dapat menguasai sisi barat Mediterania dan mulai bergerak mendominasi timur.

Tahun 31 SM dianggap sebagai awal dari masa *Imperium Romanum*. Pada tahun ini Octavian memerintah Romawi setelah berakhirnya perang perebutan kekuasaan dengan Marcus Antonius (Mark Antony) dan Marcus Lepidus yang terjadi setelah Julius Caesar sebagai *Dictator*² sebelumnya meninggal. Setelah menang melawan Marcus Antonius yang bersekutu dengan Cleopatra VII dari Mesir, Octavian disambut oleh rakyat Romawi karena telah membawa kemenangan besar dan Octavian dianggap dapat mengembalikan sistem republik yang sebelumnya hilang karena Julius Caesar yang mendeklarasikan dirinya sebagai *Dictator* seumur hidup. Senat memberikan Octavian gelar *Augustus* dengan kekuasaan sebagai kepala negara dan komandan militer tertinggi. Berkebalikan dengan harapan kembalinya republik sebagai sistem pemerintah Roma, pemberian kekuasaan ini malah membuat kekuasaan senat semakin kecil hingga fungsi Senat hanya sekedar seremonial. Hal ini menjadi tanda berakhirnya era republik di Romawi dan awal dari *Imperium Romanum*. Perluasan Roma hingga menjadi *Imperium Romanum* dapat dilihat pada gambar 3.26 hingga 3.28.



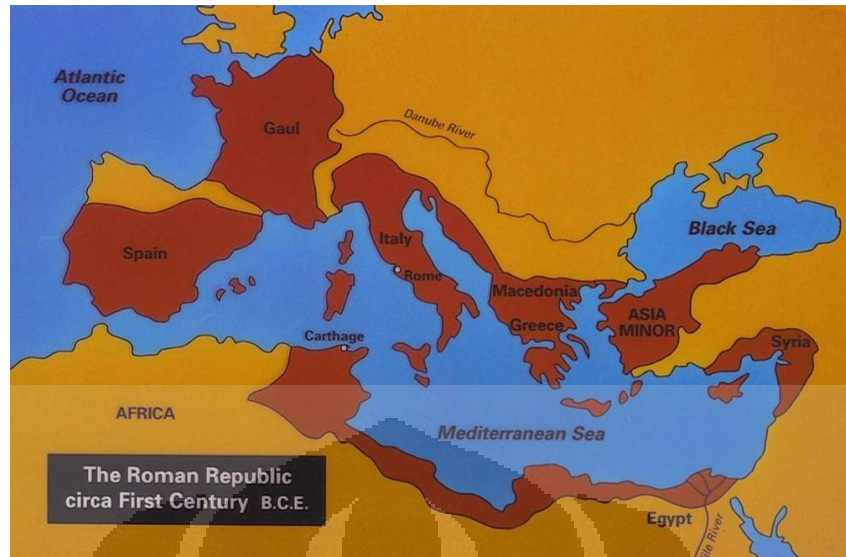
Gambar 3.26 Perluasan Kekuasaan Romawi Sebelum Perang Punic

Sumber:

<http://www.mitchellteachers.org/WorldHistory/AncientRome/UnderstandingthePunicWars.html>,

20.12.2011 12.04 WIB

² *Dictator* adalah gelar luar biasa yang diberikan pada masa darurat militer di Romawi. Pemilik gelar ini memiliki kekuasaan absolut selama 6 bulan. Setelah 6 bulan gelar tersebut harus dikembalikan kepada senat.



Gambar 3.27 Daerah Kekuasaan Romawi pada Tahun 1 SM

Sumber:

<http://www.mitchellteachers.org/WorldHistory/AncientRome/DebatingWhetherMilitaryExpansionHelpedorHurtRome.html>, 20.12.2011 12.10 WIB



Gambar 3.28 Daerah Kekuasaan Romawi pada Tahun 117 M

Sumber: <http://library.thinkquest.org/10805/romanmap.html>, 20.12.2011

3.5.2.2 Kondisi Urban-Rural Romawi

Susunan oligarki Romawi berisi para pemilik tanah yang memiliki keterikatan kuat dengan tanah miliknya yang berada pada daerah *rural*. Karena harta mereka berasal dari tanah yang dimilikinya, para pemilik tanah lebih

memilih untuk menghabiskan waktunya di daerah *rural* daripada di kota. Hal ini menjadikan Roma memiliki fenomena *rural* yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka. Cincinnatus, sebagai salah satu pahlawan Roma merupakan gambaran ideal rakyat Romawi mengenai pemimpin yang sederhana dan dapat mengemban tugas dengan baik. Cincinnatus adalah seorang petani. Dia pergi meninggalkan tanahnya untuk berperang demi Roma yang saat itu sedang terancam, kemudian mendapatkan gelar *Dictator* dari senat. Akhir dari kisah ini adalah, setelah menyelesaikan masa baktinya, Cincinnatus mundur dan kembali mengolah tanah. Kisah ini menggambarkan bagaimana orang Romawi memiliki keterikatan yang kuat dengan tradisi agraris dan militer. Selain kisah kepahlawanan nyata yang menjadi inspirasi warga Romawi, legenda Romawi pun tidak terlepas dari aspek agraris dan militer. Hal ini dapat dilihat pada legenda berdirinya kota Roma, dimana Rhea Silvia, ibu dari Romulus dan Remus, adalah anak dari Mars, dewa perang yang sering dihubungkan dengan pertanian.

Berbeda dengan *Athenian Empire* di Yunani yang merupakan *thalassocracy*³ dengan menyatukan kota-negara yang memiliki perdagangan maritim, *Imperium Romanum* mengenalkan konsep teritorial sebagai pendekatannya sebagai negara-imperialis. Awalnya, kota Roma berada di daerah perbatasan yang terletak di antara Etruscan dan Itali. Keadaan geopolitik seperti itu, menurut Parker (1988) sangat wajar sebagai tempat tumbuhnya budaya kemiliteran dan agresi teritorial. Hal ini dikarenakan keadaan geopolitik di daerah yang berada pada area perbatasan dari negara lain yang memiliki budaya yang berbeda, sarat bahaya dan ketidakpastian kehidupan ekonomi dan politik. Rumpun Itali dikenal sebagai petani pengolah lahan, hal ini menyebabkan secara psikologis, perhatian mereka untuk melindungi teritorium menjadi besar. Sehingga, untuk mendapatkan dukungan dari rumpun Itali lain untuk melawan musuh bersama, Roma harus bersikap keras, yang berujung pada berbagai pemberontakan. Selain itu, Roma memiliki musuh di utara dan selatan, hal ini menyebabkan aspek militer Roma berkembang karena Roma harus melindungi

³ *Thalassocracy* adalah istilah yang menunjukkan kebesaran dalam hal kelautan. Istilah *thalassocracy* berasal dari bahasa Yunani *thalassa* yang berarti laut dan *kratia* yang berarti kekuatan.

dirinya dari kedua musuh ini. Gabungan dari budaya-budaya ini membuat Roma menjadi kota yang menghargai teritorium sebagai bentuk kekuasaan.

Gabungan antara karakteristik urban dan *rural* yang dimiliki oleh Romawi ini adalah kondisi unik yang akhirnya turut berperan membawa perubahan Romawi dari *urbs* menjadi *imperium*. Menurut Parker (2004), hal yang membedakan Romawi dari negara-imperialis yang lain adalah pada pola penaklukan. Pada umumnya pola penaklukan yang digunakan negara-imperialis lain adalah mengambil alih kekuasaan dari suatu kota untuk menjadi bagian dari teritorial negara-imperialis tersebut. Sementara, pola yang digunakan Romawi adalah teritorial hingga menyerap pinggir kota karena fenomena *rural* yang dimilikinya.

Romawi menggunakan dua cara untuk mengontrol teritorium yang mereka kuasai. Pertama, dengan cara membangun koloni militer di area strategis. Yang kedua, dengan cara menawarkan kewarganegaraan Romawi pada penduduk yang dapat menguasai bahasa latin dan bersedia mematuhi hukum Romawi. Sebagai balasannya, pemerintah Romawi akan membangun jalan dan infrastruktur lainnya. Sebagai negara-kota, Roma memiliki senat sebagai sistem pemerintahan oligarki dimana anggotanya berasal dari kalangan bangsawan. Di kemudian hari, kelas sosial yang lebih rendah, *plebs* juga diikutsertakan dalam pemerintahan yang disebut sebagai *Tribunate*.

Romawi yang awalnya hanya berniat untuk menjaga kedaulatannya karena daerahnya yang dikelilingi musuh, akhirnya lama-kelamaan menghilangkan kedaulatan negara lainnya. Hal ini adalah karakteristik dari negara perbatasan yang kuat

3.5.2.3 Keadaan Politik *Imperium Romanum*

Menurut Parker (2004), transformasi Romawi menjadi *Imperium Romanum* didasari oleh keyakinan Romawi akan dua hal, yang pertama adalah pemikiran bahwa untuk mencapai keamanan negara yang sebenar-benarnya, tidak cukup sampai mengalahkan musuh, namun hingga pemusnahan musuh. Sejak awal, Roma adalah negara yang berada di perbatasan negara lain, sehingga ancaman dari negara lain amatlah besar. Hal ini membuat Romawi belajar bahwa

cara untuk menghadapi ancaman tersebut adalah dengan kekerasan. Tanah perbatasan (*frontier*) Romawi membutuhkan pasukan dan hal ini meningkatkan ciri militerisasi dari Romawi. Kedua, adalah kesadaran yang timbul bahwa perdagangan adalah hal yang lebih dapat membawa kemakmuran ketimbang bergantung pada pertanian. Hal ini membuat Romawi harus ikut serta dalam kancan perdagangan di Mediterania. Hal ini berimbas pada perubahan pola pikir para penguasa oligarki yang awalnya berpikir tanah adalah kekuatan, akhirnya berpikir bahwa perdagangan adalah kekuatan. Perang *Punic* melawan rumpun Phoenicia yang merupakan pedagang maritim, membuat Roma telah menyingkirkan saingan-saingannya. Meskipun begitu, pada akhirnya Romawi menjadi penakluk dibandingkan sekedar ikut serta dalam arus perdagangan maritim, yang akhirnya menumbuhkan keyakinan bahwa keamanan dalam bidang ekonomi bergantung dari dominasi dan pemusnahan saingan. Roma yang muncul di daratan Latium, bagian urban dari Romawi menumbuhkan perdagangan dan rural Romawi menumbuhkan militerisme. Kedua hal ini semakin besar setelah perang *Punic* membuat Romawi menguasai *Mare Nostrum*⁴ (Parker, 2004).

*Urbs Romana*⁵ yang sebelumnya adalah negara-kota akhirnya menjadi pusat kekuasaan dari daerah taklukannya. *Imperium* sendiri adalah kewenangan yang diberikan senat kepada hakim, pejabat tinggi di Romawi, yang mendapatkan tugas dan harus melapor kembali kepada senat di Roma. Transformasi nyata dari negara-kota ke negara-imperialis dimulai dari kondisi di daerah taklukan, *provinciae*. Dengan kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh kaisar Romawi, kekuasaan bukan lagi berada di Roma yang Senat sebagai aparat dari republik berada, tapi di tempat manapun Kaisar berada. Bahkan, seringkali Kaisar Roma tidak berada di Roma yang merupakan ibukota dari *Imperium Romanum*, hingga akhirnya pada zaman pemerintah Constantine, Roma benar-benar ditinggalkan karena tidak lagi menjadi ibukota.

Roma yang sangat besar daerah kekuasaannya menjadi sulit untuk mengontrol *provinciae* dibawahnya. Saat *Imperium Romanum* mengeluarkan titah,

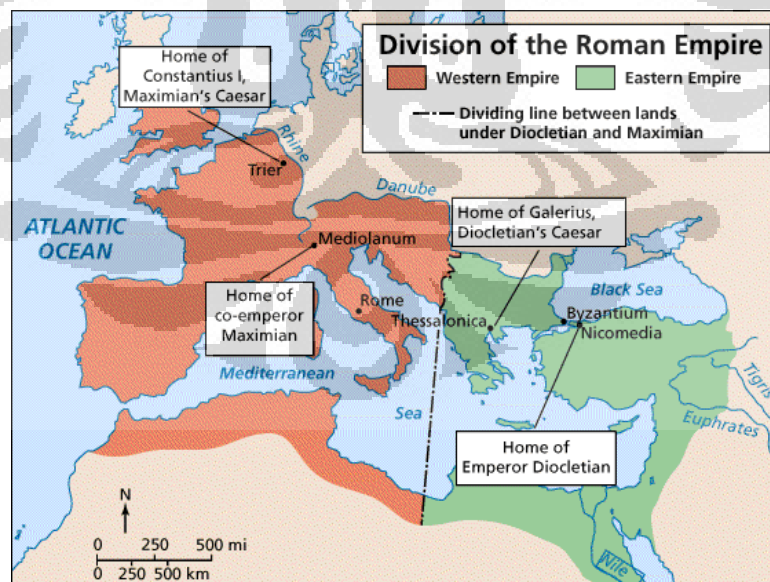
⁴ *Mare Nostrum* merupakan sebutan Romawi bagi Laut Mediterania

⁵ *Urbs Romana* merupakan sebutan Romawi bagi kota Roma

hal ini tidak selalu sampai atau dituruti oleh semua *provinciae* dibawahnya. Hal ini sesuai dengan apa yang Rosseau katakan di tahun 1946:

”the social bond is enfeebled by extension; in general a small state is proportionally stronger than a great one . . . adminis-tration becomes more oppressive in proportion to its increasing distance . . . A body too large for its own constitu-tion . . . perishes under the weight”. (Parker, 2004, h. 226)

Akhirnya, pada masa pemerintahan Kaisar Diocletian memisahkan *Imperium Romanum* menjadi dua, dan memperkenalkan sistem pemerintahan *Tetrarchy* dengan masing-masing bagiannya dipimpin oleh seorang Kaisar dan seorang *Caesar* (Kaisar Muda). Kaisar Diolectian memerintah Bagian Timur dengan ibukota Nicomedia (kini Izmit), dan Galerius sebagai caesar dengan ibukota Thessalonica (kini Thessaloniki). Sementara *Imperium Romanum* bagian barat dipimpin oleh kaisar Maximian di Mediolanum (kini Milan) dan Constantius I adalah Caesar yang memimpin dari Trier. *Imperium Romanum* bagian Barat ini bertahan hingga tahun 476 M, sementara *Imperium Romanum* bagian Timur, yang lebih dikenal sebagai *Byzantine Empire* bertahan hingga tahun 1453 M setelah ditaklukan oleh Mohammed II dari Turki.



Gambar 3.29 Pemisahan *Imperium Romanum* Menjadi Dua Bagian

Sumber: <http://www.personal.psu.edu/asn198/Final%20Project/romanempire.html>, 20.12.2011

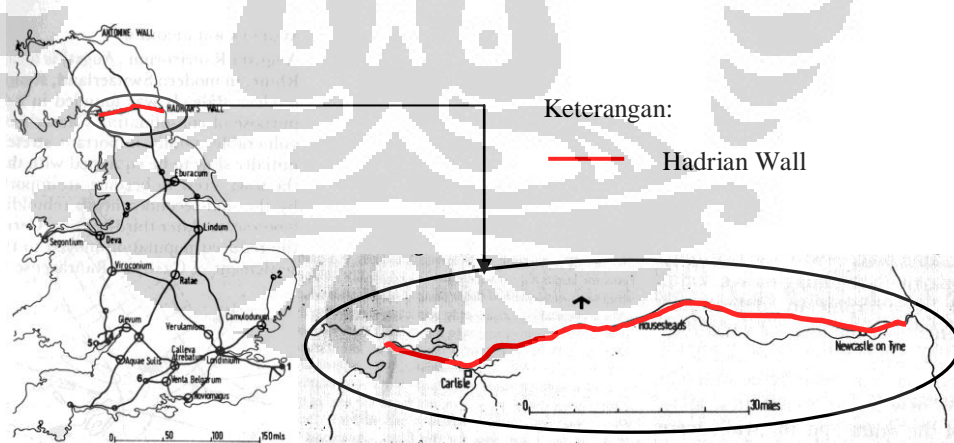
15.17 WIB



Gambar 3.30 Patung yang Menggambarkan Sistem *Tetrarchy*
 Sumber: <http://www.personal.psu.edu> , 20.12.2012

3.5.2.4 Pola Spasial Pertahanan *Imperium Romanum*

Perlu diingat bahwa pola pertahanan dari *Imperium Romanum* memperhatikan konsep mendasar dari negara-imperialis, yaitu perluasan kekuasaan yang menyebabkan hampir tidak adanya tapal batas yang pasti. Terdapat pengecualian mengenai keberadaan tapal batas ini pada *Imperium Romanum* misalnya keberadaan *Hadrian Wall* di Inggris yang dibangun untuk mencegah serangan suku barbar dari Skotlandia, sesuai dengan yang dikatakan Pohl (2001).

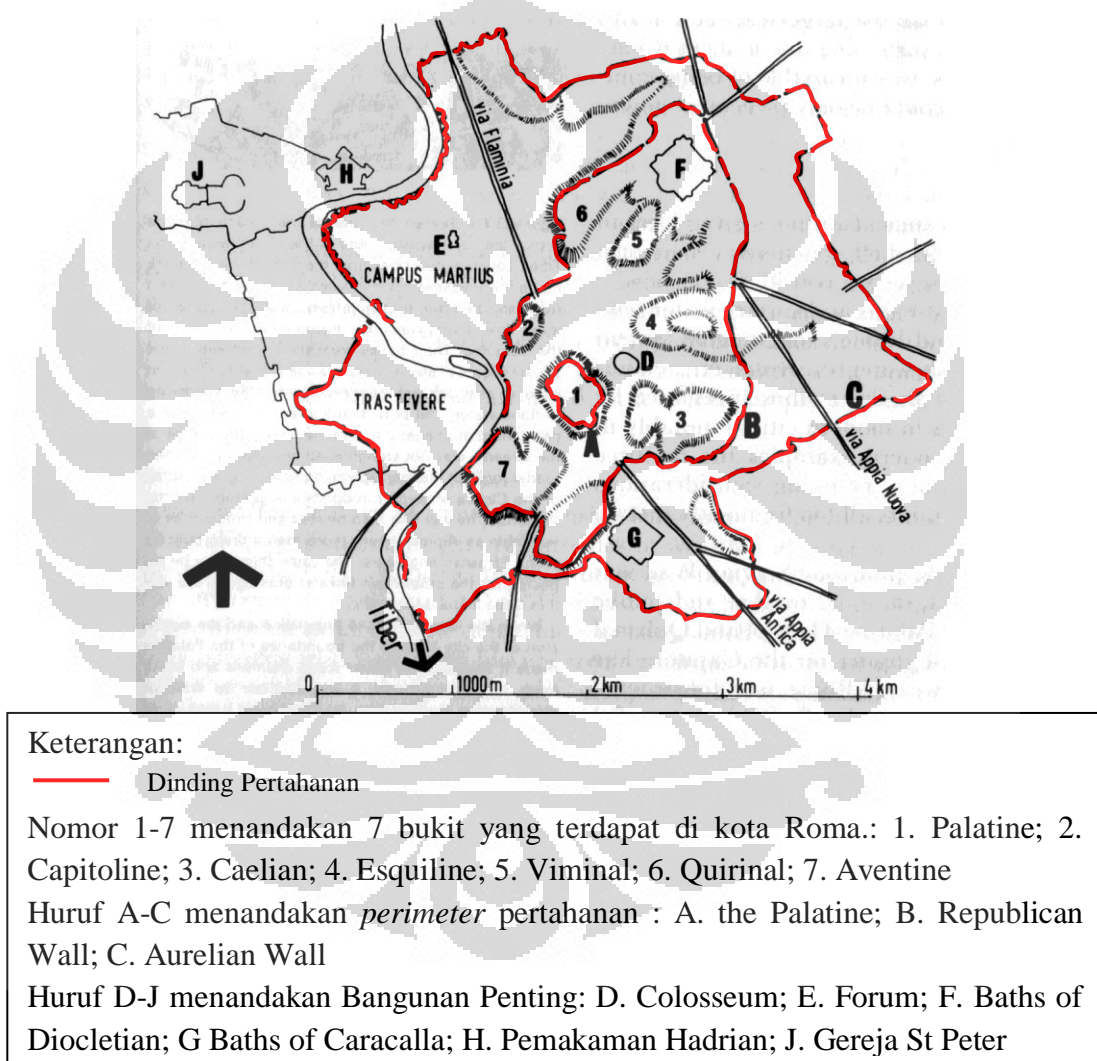


Gambar 3.31 *Hadrian Wall* di Pulau Inggris

Sumber: A. E. J. Morris, *History of urban form: before the industrial revolutions*, 1994, telah diolah kembali, h. 82, h. 88

Negara-imperialis tentunya memiliki kaitan erat dengan tapal batas, namun apa yang ditunjukkan oleh *Imperium Romanum* adalah negara dapat saja tidak memiliki batas. Ideologi Romawi bahwa mereka menguasai seluruh *orbis*

*terranum*⁶ tentunya mendasari ekspansi Romawi (Pohl, Walter & Wood, Ian & Reimitz, Helmut (2001). Hal ini sesuai dengan apa yang ditulis penyair Ovid seperti apa yang dikutip oleh Pohl (2001): “*To other people land may be given with a fixed limit. But for the City of Rome, its space is the same as that of the World.*” Bisa dibayangkan, *Imperium Romanum* sebagai perluasan dari kota Roma, tidak akan berhenti sebelum seluruh dunia dikuasai, *spatium urbis est idem spatium orbis*. Ideologi ini menyebabkan hampir Roma saja, yang menjadi ibukota dari *Imperium Romanum* yang difortifikasi.



Gambar 3.32 Pola Dinding Pertahanan Kota Roma

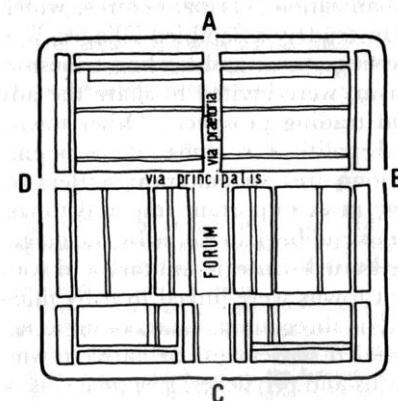
Sumber: A. E. J. Morris, *History of urban form: before the industrial revolutions*, 1994, telah diolah kembali, h. 59

⁶ Istilah *orbis terranum* merupakan sebutan Romawi untuk menjelaskan daerah kekuasaan *Imperium Romanum*.

Keterbatasan *Imperium Romanum* untuk menyokong keberadaan militernya menjadi masalah. Hal ini terutama terkait dengan biaya yang harus ditanggung untuk pengadaan pertahanan tersebut. Hambatan pertama timbul dari keterbatasan dalam hal ekonomi, dimana pajak yang diterima tidaklah mencukupi pembiayaan militer karena keberadaan militer menjadi salah satu pengeluaran terbesar *Imperium Romanum*, dan yang kedua adalah keterbatasan pembiayaan yang terkait aspek politik, dengan pembiayaan pertahanan negara ditanggung oleh pemerintah dikarenakan keengganan para pemilik tanah untuk ikut berkontribusi dalam pembiayaan pertahanan (Pohl, 2001). Pembiayaan pertahanan menjadi beban bagi ekonomi *Imperium Romanum* karena jumlahnya yang besar. Selain pembayaran upah para tentara, pengadaan gandum sebagai logistik dari tentara, pengadaan senjata dan baju perang, pengurusan binatang seperti kuda beserta makanan dan tempat tinggalnya semua ditanggung oleh negara.

Untuk menjaga kekuasannya yang semakin meluas, Romawi membangun ribuan *fortified legionary camps* yang disebut sebagai *castra*, yang ada sebagai pusat aktivitas militer lokal untuk sementara (Morris, 1994). Perkemahan tersebut harus beroperasi pada tempo waktu yang sesingkat-singkatnya dan mengikuti aturan baku *castrametation*. *Castrametation* adalah kegiatan penataan letak perkemahan militer Romawi dan merupakan bagian penting dari *legionary standing orders*. Penataan letak berdasarkan *gridiron*, dalam perimeter pertahanan berbentuk kotak yang sudah ditentukan sebelumnya. Meskipun *castra* dimaksudkan sebagai sesuatu yang temporer, banyak yang kemudian menjadi basis dari kota yang permanen. Morris (1994, h. 57) mengutip penjelasan dari Haywood pada Ancient Rome untuk menjelaskan mengenai *castra*:

“Polybius, a Greek statesman and historian of the second century BC, who spent many years among the Romans, left a careful account of the camps in his discussion of the Roman army. Every camp was constructed according to the same master plan; although natural features were sometimes made a part of it, ordinarily it was pitched on reasonably flat land and constituted a fort without rivers or cliffs to aid in its defense. It was square; each side was 2,150 feet long and had a gate.”



Keterangan:

A – D adalah pintu gerbang *castra*

Gambar 3.33 Denah Tipikal *Castra*

Sumber: A. E. J. Morris, *History of urban form: before the industrial revolutions*, 1994, h.57

Romawi sadar bahwa mempertahankan kekuasaan dengan kekuatan militer pada daerah yang baru ditaklukkan dapat berujung pada perang gerilya yang menghambat kinerja *legions* untuk memperluas dan mempertahankan tapal batas kekaisaran. Menurut Collingwood cara mencapainya adalah dengan menyamakan Romanization dengan *urbanization* (Morris, 1994, h. 58). Pusat *tribal* yang awalnya seperti gabungan beberapa desa dibangun menjadi kota sebagai bagian kekaisaran Romawi. Tiap-tiap kota dihubungkan dengan jalan yang berfungsi sebagai strategi militer maupun untuk perdagangan. Menurut Salmon (1969) terdapat tiga jenis kota pada masa *Imperium Romanum*, yaitu *coloniae*, *municipia* dan *civitates* (Morris, 1994, h. 58). *Coloniae* adalah pemukiman maupun kota yang bersekutu dengan *Imperium Romanum* dengan status penuh sebagai bagian dari *Imperium Romanum* dan memiliki hak istimewa. *Municipia*, biasanya adalah pusat *tribal* yang penting yang diambil alih dengan *formal chartered status*, namun hanya memiliki kewarganegaraan parsial bagi penduduknya. Terakhir *civitates* yang merupakan pusat administratif dan perdagangan untuk distrik kesukuan yang menahan di bentuk Romanized (Morris, 1994, h. 58). Perbedaan status dari tiap kota tidak mempengaruhi *urban form* dari tiap kota karena urbanisasi dari *Imperium Romanum* berpegang pada struktur *gridieon*, dimana topografi dari tiap kota hanya mempengaruhi detail dari tata letak dan perimeter kota (Morris, 1994, h.58).

Menurut Smith (1967) fungsi dari perkemahan Romawi lebih ke arah menyerang daripada bertahan, mereka adalah gudang perbekalan dan markas besar dari pasukan yang bergantung pada pergerakan (Morris, 1994, h. 58). Hal ini menjadikan akses adalah faktor penting yang menjadi perhatian.

3.5.3 Pola Spasial Pertahanan Indonesia Sebagai Negara-Bangsa

3.5.3.1 Keadaan Geografi Indonesia

Indonesia adalah negara kepulauan dengan pulau-pulau utama seperti Jawa, Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, dan Irian Jaya. Indonesia memiliki 17.508 pulau dengan wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia (Portal nasional RI, 2000). Sebagai negara kepulauan di Asia Tenggara, Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dengan Jakarta yang terletak di pulau Jawa sebagai ibukota negara. Menurut Global Recording Network (2008), Indonesia dengan luas 1.904.569 km² merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia seringkali disebut juga dengan istilah Nusantara, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah ini memiliki makna: “sebutan (nama) bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia”. Menurut Portal Nasional RI (2010), istilah ini timbul karena letak Indonesia yang berada di antara dua benua, dan dua samudrasehingga disebut sebagai Nusantara (Kepulauan Antara).

Indonesia memiliki populasi sekitar 242 juta jiwa pada tahun 2008 dan menduduki peringkat ke empat dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat untuk negara berjumlah penduduk paling banyak di dunia, dengan penduduk Muslim terbesar di dunia (Portal Nasional RI, 2010).



Gambar 3.34 Letak Indonesia dalam Peta Dunia

Sumber: <http://indonesia.go.id/in/sekilas-indonesia/geografi-indonesia.html> , 29.12.2011



Gambar 3.35 Peta Indonesia

Sumber: <http://m.globalrecordings.net/id/country/ID>, 23.12.2011

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tantangan untuk melindungi negaranya baik dari ancaman luar maupun ancaman dari dalam. Hal ini dikarenakan Indonesia tidak hanya melindungi daratan namun juga perairan di Indonesia. Sebagai negara yang besar tentunya Indonesia memiliki kesulitan yang lebih besar untuk mempertahankan diri dari ancaman dari dalam karena pengaruh pusat akan semakin sulit untuk mencapai daerah yang mendekati tapal batas.

3.5.3.2 Keadaan Politik Indonesia

Indonesia adalah negara-bangsa yang terbentuk pada proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, setelah sebelumnya Indonesia sempat menjadi daerah jajahan Belanda, Inggris dan Jepang. Sebelum menjadi negara-bangsa dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika seperti sekarang ini, Indonesia terdiri dari berbagai negara-kota maupun negara-imperialis yang pada umumnya memiliki bentuk pemerintahan monarki.

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bentuk negara Indonesia beberapa kali mengalami perubahan, yaitu bentuk negara Federal, Kesatuan atau sistem pemerintahan yang parlementer, Semi-Presidensial, dan Presidensial (Portal Nasional RI, 2010). Kini, bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini dapat dilihat bagaimana Indonesia seringkali disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bentuk Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pernyataan ini secara tegas tertuang di UUD 45 pasal 1, dan ditegaskan oleh pidato Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Agustus 2007 bahwa bentuk paling tepat dari Indonesia adalah NKRI dengan empat pilar utama yang menjadi nilai dan konsensus dasar yang selama ini menopang tegaknya Republik Indonesia adalah: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

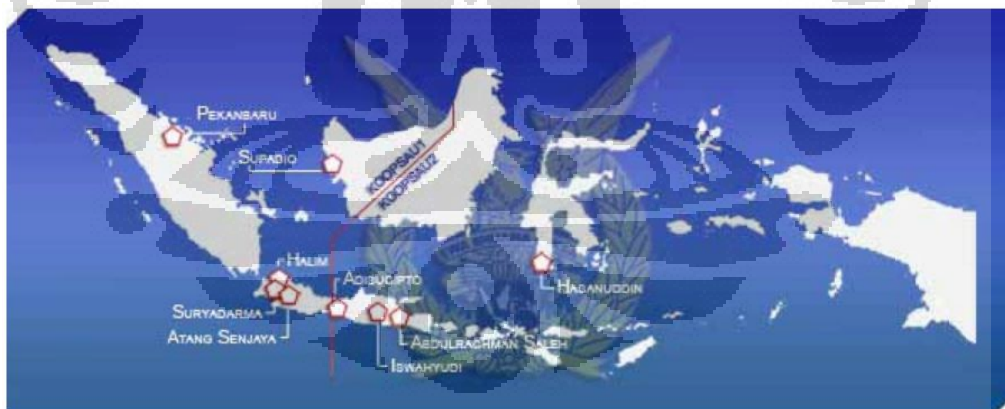
Menurut Portal Nasional RI (2010) saat ini Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis dengan berdasarkan sistem politik Trias Politika dengan adanya kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari dua badan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki 550 anggota dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang memiliki 128 anggota. Kekuasaan legislatif yang bersistem bikameral ini dimulai sejak amandemen UUD 1945 pada tahun 2004. Kekuasaan Lembaga eksekutif berpusat pada presiden, wakil presiden, dan kabinet, dimana kabinet di Indonesia adalah Kabinet Presidensial sehingga para menteri bertanggung jawab kepada presiden dan tidak mewakili partai politik yang ada di parlemen. Sementara, kekuasaan lembaga Yudikatif sejak amandemen UUD 1945 ada pada Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi.

3.5.3.3 Pola Spasial Pertahanan Indonesia

Hal pertama yang perlu diingat saat membahas Indonesia adalah Indonesia merupakan negara modern dimana perkembangan teknologi sudah sangat maju. Hal mendasar yang membedakan Indonesia dengan Yunani kuno dan *Imperium Romanum* yang telah dibahas sebelumnya adalah keberadaan satu lagi dimensi wilayah yang harus dipertahankan, yang mungkin tidak pernah terlintas pada pikiran manusia di masa Yunani kuno maupun *Imperium Romanum*, yaitu mempertahankan wilayah udara. Contoh nyata dari pentingnya pertahanan wilayah udara adalah kejadian runtuhnya menara kembar WTC 11 September 2001 yang disebabkan tabrakan pesawat terbang. Kejadian yang ditenggarai sebagai serangan teroris tersebut memperlihatkan bagaimana pentingnya bagi suatu negara untuk dapat mengendalikan lalu lintas udara, agar dapat terhindar ancaman dari luar yang masuk dan menyerang lewat udara. Pertahanan Indonesia

merupakan tugas dari Tentara Nasional Republik Indonesia yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Tentara Nasional Republik Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Republik Indonesia Angkatan Laut dan Tentara Nasional Republik Indonesia Angkatan Udara.

Pertahanan udara menjadi hal yang mutlak di zaman modern ini, itulah mengapa, pertahanan udara menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Indonesia, dimana tugas ini adalah tanggung jawab Komando Pertahanan Udara Nasional (KOHANUDNAS). Namun, pertahanan udara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI AU, dalam pelaksanaannya, pertahanan udara ini juga tercapai lewat koordinasi dengan unit-unit lain, misalnya unit TNI AD seperti Artileri Pertahanan Udara (ARHANUD) yang bertugas mendeteksi kekuatan udara lawan dan menghancurkannya dari darat. Menurut Pennings (2011), selain TNI AU, TNI AD dan TNI AL juga memiliki pasukan penerbangan, yaitu Dinas Penerbangan TNI AL (DISNERBAL) dan Dinas Penerbangan Angkatan Darat (DINAS PENERBAD). Markas Besar (*Order of Battle*) TNI AU terdapat di beberapa titik pulau-pulau besar di Indonesia kecuali Papua. Di pulau Jawa sendiri, terdapat sekitar enam titik, sementara di pulau Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi, hanya terdiri dari masing-masing satu titik seperti yang tergambar pada gambar 3.36.

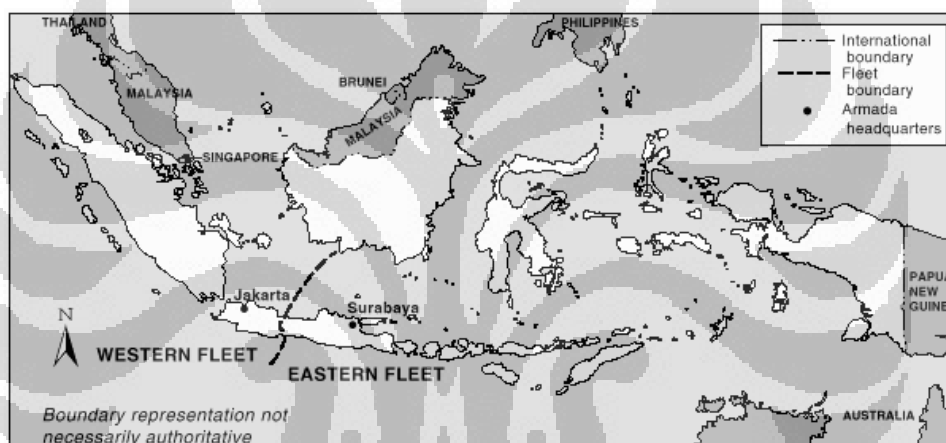


Gambar 3.36 *Order of Battle* dari TNI-AU

Sumber: <http://www.tni-au.mil.id>, 23.12.2011

Secara umum, pertahanan laut Indonesia merupakan tanggung jawab TNI-AL, yang sebelumnya bernama Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI). Pertahanan laut Indonesia merupakan hal yang penting melihat Indonesia yang merupakan negara kepulauan membuat ancaman dari luar kemungkinan besar

masuk melalui jalur laut. TNI-AL memiliki markas besar di Jakarta dan Surabaya, dengan pemisahan komando teritorial armada laut menjadi armada barat (*western fleet*) dan armada timur (*eastern fleet*) semenjak tahun 1985 (Pike, 2000). Seperti pada gambar 3.37, kita dapat melihat bahwa komando teritorial TNI-AL dipisahkan menjadi area komando teritorial timur dan area teritorial barat, dengan Jakarta sebagai markas besar dari armada barat dan Surabaya sebagai markas besar dari armada timur. Alasan peletakan markas besar di dua kota yang padat penduduknya, dan bukannya di lokasi tapal batas Indonesia padahal Indonesia adalah negara kepulauan, kemungkinan berkaitan dengan alasan pertahanan terhadap dua kota ini, meskipun tentunya faktor ketersediaan infrastruktur yang lebih maju di kedua kota ini tidak dapat dikesampingkan.



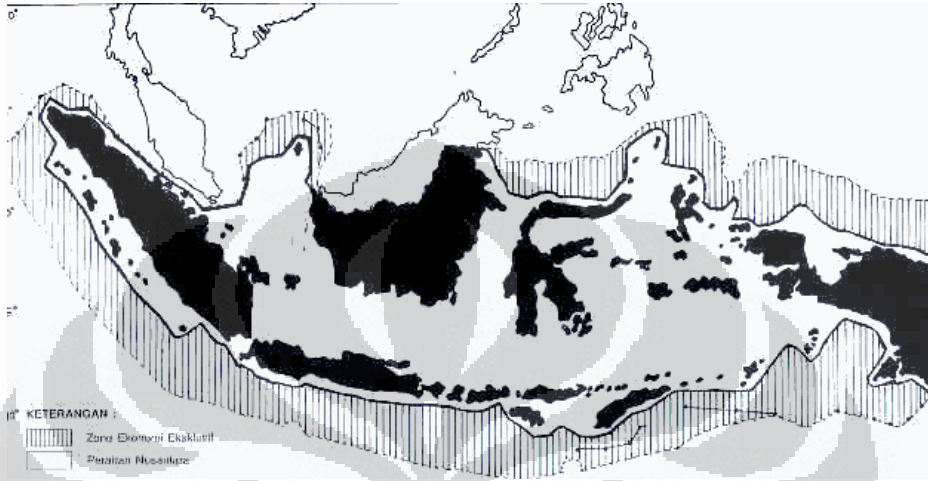
Gambar 3.37 Komando Teritorial TNI-AL

Sumber: <http://www.fas.org/irp/world/indonesia/alri.htm>, 23.12.2011

Pertahanan laut Indonesia semakin mendapat tantangan dengan ditetapkannya Zona Ekonomi Eksklusif, 200 mil dari perairan nusantara dengan penetapan Undang-Undang no. 5 tahun 1983. Penjelasan mengenai Zona Ekonomi Eksklusif dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 5 tahun 1983:

“Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.”

Dengan keberadaan Zona Ekonomi Eksklusif ini, Indonesia memiliki luas perairan yang lebih luas dari sebelumnya untuk diawasi, untuk mencegah ancaman dari luar, baik berupa ancaman pertahanan negara lewat serangan militer maupun ancaman lainnya, misalnya melakukan eksploitasi sumber alam di Zona Ekonomi Eksklusif yang melanggar hak Yuridiksi Indonesia.



Gambar 3.38 Perairan Nusantara dan Zona Ekonomi Eksklusif

Sumber: <http://www.fas.org/irp/world/indonesia/alri.htm>, 23.12.2011

Pertahanan darat Indonesia merupakan tanggung Jawab Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD). Pembagian teritorial dari daerah teritorial TNI-AD ini dibagi menjadi Komando Daerah Militer (kodam) seperti yang dapat dilihat di gambar 3.39. Seperti yang terlihat di gambar, lagi-lagi jakarta memiliki markas besar. Di pulau Jawa terdapat empat kodam, Sumatera terdiri dari tiga kodam, sementara Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Kepulauan Halmahera memiliki masing-masing satu kodam.



Gambar 3.39 Letak Komando Daerah Militer di Indonesia

Sumber: <http://www.fas.org/irp/world/indonesia/alri.htm>, 23.12.2011

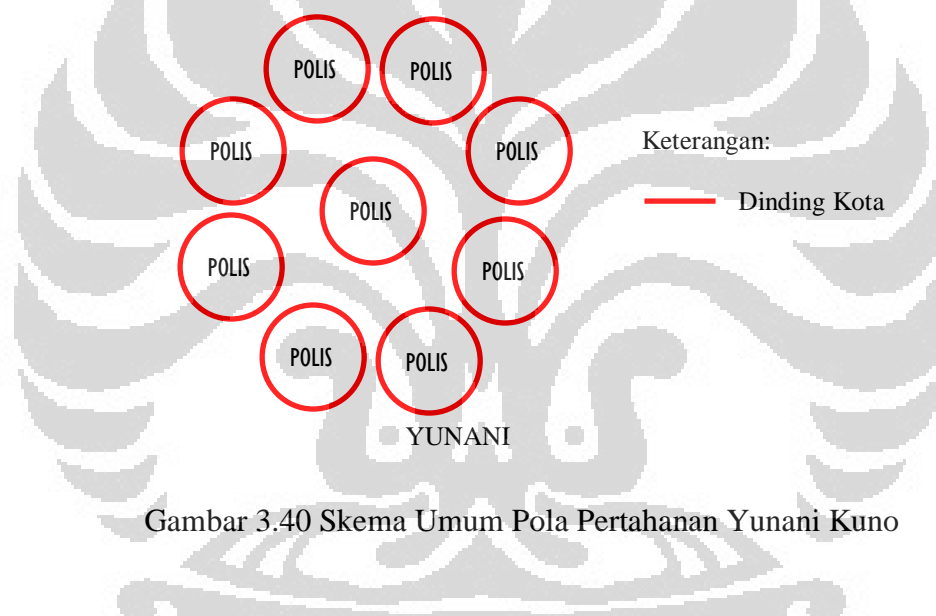
Menurut Azmi (2011) Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia, memerlukan kekuatan pertahanan pantai (*coastal defense*) karena Indonesia memiliki resiko musuh lebih mudah melakukan proyeksi kekuatannya ke daratan Indonesia daripada ke negara kontinen dikarenakan opsi titik pendaratan yang luas di sepanjang garis pantai tersebut. Hal ini memunculkan masalah karena ternyata masalah pertahanan pantai masih diperdebatkan apakah hal itu menjadi tugas TNI AD atau Marinir TNI AL. Menurut Azmi (2011), hal ini seharusnya menjadi bagian tugas TNI AD, hal ini dikarenakan tugas Marinir TNI AL adalah proyeksi kekuatan laut ke darat, yang merupakan pasukan pendarat, karena secara terminologi, Artileri Pertahanan Pantai bertugas melumpuhkan kekuatan laut lawan dari darat.

Dua hal pada pertahanan Indonesia dan tidak ditemukan pada dua negara sebelumnya adalah ketiadaan kebutuhan pertahanan pantai dan pertahanan udara. Kebutuhan akan kedua pertahanan ini timbul karena faktor geografis dan faktor perkembangan teknologi yang telah dijelaskan dalam subbab sebelumnya. Penempatan markas besar dari TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU yang terpusat di pulau Jawa, terutama Jakarta menunjukkan bagaimana Pulau Jawa menjadi pulau paling penting dibandingkan pulau lain di Indonesia, dan Jakarta menjadi pulau paling penting di Indonesia. Hal ini tidak mengherankan melihat Jakarta adalah Ibukota negara Indonesia dan pulau Jawa adalah pulau terletaknya Jakarta. Keberadaan Ibu kota pada suatu pulau tentunya membuat pulau tersebut memiliki kelebihan dalam hal perkembangan infrastruktur, sehingga banyak kota dalam pulau tersebut yang memiliki fungsi penting dalam kelangsungan negara.

3.5.4 Rangkuman

Pola pertahanan negara-kota di Yunani Kuno sangat tergantung dari faktor geografis dan faktor politik yang terdapat di *polis* tersebut. Keberadaan pegunungan dan perbukitan di daratan Yunani membuat tipe geopolitik yang berkembang adalah negara-kota, dengan kondisi alam seperti pegunungan atau sungai sebagai tapal batas alami masing-masing negara. Keadaan tersebut membuat masing-masing negara di Yunani terdiri dari penduduk rata-rata 5.000

orang, yang mendorong keberadaan demokrasi untuk berkembang. Keberadaan berbagai tipe pemerintahan juga membuat *polis* Yunani memiliki sistem pertahanan yang berbeda. Pada sistem monarki, bagian *polis* yang difortifikasi hanyalah acropolis yang dianggap sebagai bagian paling penting dan suci dari kota. Sementara, pada sistem demokrasi, keseluruhan *polis* difortifikasi seperti di Athens. Hal berbeda terjadi di Sparta yang merupakan negara-kota di daratan Yunani. Di Sparta tidak terdapat dinding pertahanan. Hal ini dikarenakan Sparta tergantung dari *hoplites* untuk urusan keamanan negara. Ekspansinya ke daerah sekitar dan keberadaan lokasinya yang berada di sekitar pegunungan cenderung membuat Sparta aman dari ekspansi negara lain. Secara umum, pola pertahanan negara-kota di Yunani seperti gambar 3.40.



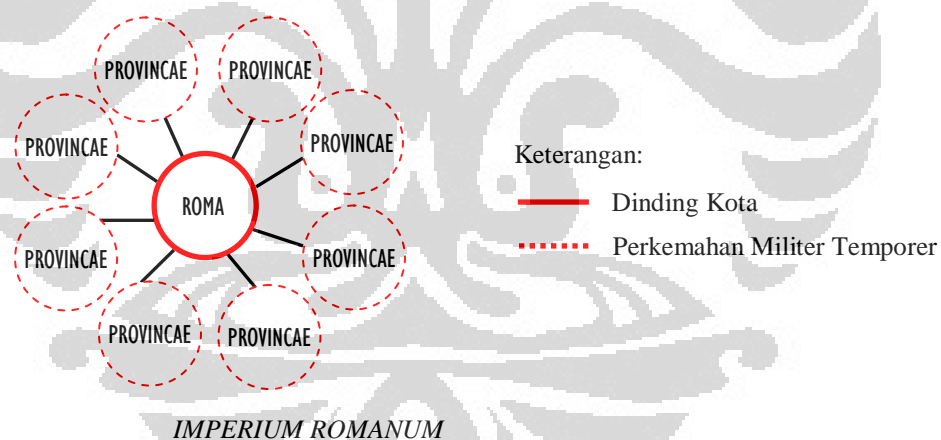
Gambar 3.40 Skema Umum Pola Pertahanan Yunani Kuno

Dari skema di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum pertahanan negara di Yunani Kuno adalah pertahanan dari masing-masing negara kota yang dikelilingi dinding pertahanan. Perbedaan ciri geografis di Yunani Kuno berpengaruh pada seperti apa ciri pertahanan dari tiap *polis*, contoh paling nyata adalah perbedaan pertahanan Athens dan Sparta, yang masing-masing adalah negara yang lebih berpusat pada maritim, dan yang satu lebih berpusat pada pertahanan darat.

Pola pertahanan *Imperium Romanum* sebagai negara-imperialis menunjukkan bahwa negara yang dapat terus meluas kekuasaannya cenderung tidak memiliki tapal batas yang jelas. Pada *Imperium Romanum*, hanya kota Roma yang memiliki dinding pertahanan. Sehingga, untuk menggantikan dinding kokoh

sebagai pertahanan, *Imperium Romanum* menggunakan sistem *castra* sebagai perkemahan militer temporer untuk memastikan kekuasaan di daerah yang baru ditaklukkannya. Daerah kekuasaan *Imperium Romanum* yang terlalu besar mengalami kesulitan untuk memerintah sehingga dipisahkan menjadi dua bagian kekaisaran. Hal ini memperlihatkan bahwa daerah kekuasaan yang terlalu besar menyulitkan negara tersebut untuk memastikan kekuasaannya keseluruhan wilayahnya. Hal ini dikarenakan daerah kekuasaan dari *Imperium Romanum* kebanyakan didapatkan dengan paksaan, sehingga meskipun *Imperium Romanum* telah melakukan berbagai cara untuk mencegah pemberontakan, jauhnya pusat pemerintahan dengan daerah kekuasaannya menjadi masalah.

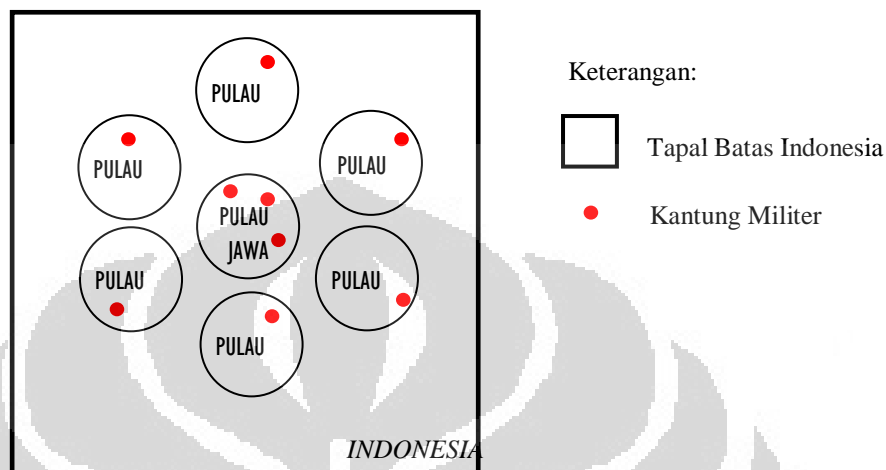
Imperium Romanum yang sebelumnya tidak menggunakan dinding pertahanan selain di kota Roma, pada akhirnya menggunakan dinding pertahanan sebagai tapal batas negara. Hal ini dapat dilihat pada keberadaan Hadrian's Wall di pulau Inggris, yang berfungsi menangkal serangan Skotlandia. Skema umum dari pertahanan negara *Imperium Romanum* dapat dilihat pada gambar 3.41.



Gambar 3.41 Skema Umum Pola Pertahanan *Imperium Romanum*

Dua hal pada pertahanan Indonesia yang tidak ditemukan pada dua negara sebelumnya adalah kebutuhan akan pertahanan pantai dan pertahanan udara. Kebutuhan akan kedua pertahanan ini timbul karena faktor geografis dan faktor perkembangan teknologi. Pola pertahanan Indonesia sebagai negara kepulauan membuatnya harus memiliki kantung militer di setiap pulau besar. Pulau Jawa dapat dikatakan sebagai pulau terpenting di Indonesia, terbukti dengan banyaknya

kantung militer di pulau Jawa, baik untuk pertahanan udara, laut maupun darat bila dibandingkan dengan pulau lain di Indonesia, dikarenakan Jakarta sebagai Ibukota Indonesia terletak di pulau Jawa. Pola umum dari pertahanan negara Indonesia dapat dilihat pada gambar 3.42.



Gambar 3.42 Skema Umum Pola Pertahanan Indonesia

Berdasarkan tiga negara yang menjadi contoh dari masing-masing tipe geopolitik, dapat diambil kesimpulan bahwa keadaan geografi dan politik dari tiap negara mempengaruhi bentuk pertahanan negara masing-masing. Yunani sebagai contoh tipe geopolitik memiliki ciri umum masing-masing *polis* memiliki dinding pertahanan kota, terutama setelah era demokrasi. *Imperium Romanum* memiliki ciri tidak adanya dinding pertahanan di tapal batas negara, sehingga fungsinya digantikan oleh *castra*, perkemahan militer sementara. Sementara Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki ciri kantong militer terpusat di kota Jawa, yang mengindikasikan sebagai pulau terpenting di Indonesia.

BAB 4

KESIMPULAN

Negara yang selama ini dapat dilihat pola spasialnya melalui garis tapal batas yang terdapat di peta, ternyata dapat dilihat lebih jauh pola spasialnya misalnya dalam hal pertahanan negara. Kaitan antara arsitektur dengan pertahanan negara dapat dilacak dari sejak zaman dahulu. Tanggung jawab arsitek yang semula meliputi *architectura militaris* dan *architectura civilis* berkurang hingga sebatas *architectura civilis* di sekitar abad ke-16. Hal ini menyebabkan dunia perang dan militer terlihat tidak ada kaitannya dengan dunia arsitektur di masa sekarang ini. Dapat disimpulkan bahwa arsitektur sempat terbentuk dan berkembang karena faktor pertahanan negara. Meskipun terlihat peran arsitektur dalam *architectura militaris* tidak sebesar pada masa dahulu, sesungguhnya arsitektur tidak pernah benar-benar lepas dari *architectura militaris*. Hal ini dibuktikan dari penggunaan elemen arsitektural pada pertahanan negara hingga saat ini.

Penggunaan militer untuk mempertahankan negara serta bentuk pertahanan negara baik berupa dinding pertahanan maupun dinding tidak terlihat seperti yang diciptakan radar tidak dapat dilepaskan dari faktor geografis dan faktor politik suatu negara. Faktor geografis dan politik sangat berpengaruh pada pertahanan suatu negara, dimana perbedaan sistem politik pada negara-negara yang memiliki karakter geografis serupa dapat menghasilkan pola spasial pertahanan yang berbeda, begitu juga sebaliknya. Pembahasan pola spasial pertahanan negara berdasarkan tipe geopolitik dalam tulisan ini memperlihatkan bahwa tipe geopolitik yang berbeda menghasilkan pola spasial yang berbeda. Hal ini tergambar jelas dari pola spasial pertahanan negara Yunani Kuno dibandingkan dengan pola spasial pertahanan negara *Imperium Romanum* yang sangat berbeda meskipun berada pada periode yang hampir bersamaan. Tipe geopolitik negara-kota memiliki kecenderungan pola spasial pertahanan negara dengan dinding pertahanan yang mengelilingi keseluruhan kota. Pada tipe geopolitik negara-imperialis kecenderungan pola spasialnya adalah dinding pertahanan terdapat di kota pusat pemerintahan dan tidak memiliki dinding pertahanan di tapal batas negara karena karakteristik negara-imperialis yang

daerah kekuasaannya terus membesar. Pada tipe geopolitik negara-bangsa, kecenderungan pola spasial pertahanan negaranya adalah penempatan kantung-kantung militer di lokasi yang penting bagi keberlangsungan negaranya, misalnya ibu kota negara.

Dalam tulisan ini, terdapat satu benang merah dalam pertahanan negara, terlepas dari perbedaan tipe geopolitik dari masing-masing negara, yaitu kenyataan bahwa bagian vital dari suatu negara, baik berupa suatu kota, area religius maupun keseluruhan negara itu sendiri dapat diketahui dengan melihat pertahanan negara yang diberlakukan negara tersebut, dimana hal ini juga menunjukkan nilai-nilai yang dimiliki negara tersebut. Hal ini misalnya dapat dilihat dari penggunaan dinding kota di Yunani Kuno yang sebelumnya hanya mengelilingi acropolis, akhirnya mengelilingi keseluruhan kota setelah sistem demokrasi muncul, seperti yang terjadi pada kota Athens.

Pola spasial pertahanan negara tidak hanya memperlihatkan bagaimana bentuk pertahanan yang diadopsi oleh suatu negara. Pola yang terbentuk dari keberadaan dinding pertahanan maupun kantung-kantung militer menjadi bukti bisu yang memberitahukan dimanakah area vital pada suatu negara, seperti apa sistem politik yang digunakan pemerintah negara untuk mempertahankan kuasanya, sejauh apa bentuk geografis suatu negara mempengaruhi langkah-langkah pertahanan negara, hingga nilai-nilai apa saja yang dianggap sakral bagi negara tersebut.

DAFTAR REFERENSI

Anggoro, Kusnanto. (2003). Threat perceptions: pertahanan dan keamanan negara pada millenium ketiga. *Jurnal luar negeri*, 49, 49-68.

Ardrey, R. (1967). *The territorial imperative: a personal inquiry into the animal origins of property and nations*. London: Collins.

Azmi, Khairil. (2011, June 18). *Angkatan darat Negara kepulauan: bagaimanakah postur idealnya?* December 29, 2011. Think and Act For National Defence. <http://www.tandef.net/angkatan-darat-negara-kepulauan-bagaimanakah-postur-idealnya>.

Barker, R. G. (1968). *Ecological psychology: concept and methods for studying the environment of human behaviour*. Oxford: Oxford University Press.

Cohen, Raymond. (1979). *Threat perception in international crisis*. Wisconsin: The University of Wisconsin Press.

DDU, Discovering Democracy Unit. (n.d.). *Focus question 2: what are the main types of government?* December 23, 2011. <http://www1.curriculum.edu.au/ddunits/units/ls1fq2acts.htm>.

Felluga, Dino. (2002). "Modules on Foucault: On Power". *Introductory Guide to Critical Theory*. October 3, 2011. Purdue U. <http://www.purdue.edu/guidetotheory/newhistoricism/modules/foucaultpower.html>.

Finoki, Bryan. (2008, January 30). *A small death in the nomadic fortress' bosom*. Subtopia, A Field Guide to Military Urbanism. <http://subtopia.blogspot.com/>

Foucault, Michel. (1977). *Discipline and punish: the birth of prison*. (Alan

Sheridan, Translator). England: Penguin Books.

Foucault, Michel. (1980). *Power/knowledge: selected interviews and other writings 1972-1977*. (Colin Gordon, Editor. Colin Gordon, Leo Marshall, John Mepham & Kate Soper, Translator). New York: Pantheon Books.

Freelang Dictionary: Latin-English. (1997). <http://freelang.net>.

Goffman, E. (1959). *The presentation of self in everyday life*. London: Penguin Books.

Harjoko, Triatno Yudo. (2003). *Urban kampung: its genesis and transformation into metropolis, with particular reference to penggilingan in jakarta*.

Horsman, H & Marshall, A. (1994). *After the nation-state*. London.

Kanani, Anuja. (n.d.). *The city assembled by spiro kostof: the city edge*.

Kostof, Spiro. (1991). *The city shaped: urban pattern and meanings through history*. London: Thames and Hudson.

Kostof, Spiro. (1992). *The city assembled: the elements of urban form through history*. London: MIT Press.

Lawson, Bryan. (2001). *Language of space*. Oxford: Architectural Press.

Maslow, A. H. (1943). *A theory of human motivation*.

Morris, A. E. J. (1994). *History of urban form: before the industrial revolutions* (3rd Edition.). Hampshire: Longman Scientific & Technical.

Mühlmann, Heiner. HeinerMühlmann: Foreword. (2008). In Stephan Trüby. *Exit-*

architecture: design between war and peace (pp. 1-10). New York: Springer
Wien.

Mumford, Lewis. (1938). *The culture of cities*. New York.

Mumford, Lewis. (1975). *The city in history*. London

National Capital Authority.(2003). *Urban design guidelines for perimeter security
in national capital*. <http://www.nationalcapital.gov.au>.

National Capital Planning Commission. (2002). *The national capital urban design
and security plan*. <http://www.ncpc.gov>.

Orum, M. Anthony & Xiangming Chen. (2003). *The world of cities: places in
comparative and historical perspective*. Blackwell Publishing.

Parker, Geoffrey. (1988). *The geopolitics of domination*. London.

Parker, Geoffrey. (2004). *Sovereign city: the city-state ancient and modern*.
London: Reaktion Books.

Pennings, Marco. (2011, 29 December). *Indonesian air arms overview: tentara
nasional indonesia-angkatan udara/ laut/ darat*. 29 December 2011. Scramble,
Dutch Aviation Society. <http://www.scramble.nl/id.htm>

Pike, John. (2000, September 2). *ALRI navy of the republic of indonesia*. 23
December 2011. FAS, Intelligence Resource Program.
<http://www.fas.org/irp/world/indonesia/alri.htm>.

Pohl, Walter & Wood, Ian & Reimitz, Helmut. (2001). *The transformation of
frontiers: from late antiquity to the carolingians*. Leiden, Boston: Martinus
Nijhoff Publishers and VSP.

Portal Nasional RI. (2010). *Bentuk negara*. 29 December 2011. <http://indonesia.go.id/in/sekilas-indonesia/lambang-dan-bentuk-negara/bentuk-negara.html>.

Portal Nasional RI. (2010). *Geografi indonesia*. 29 December 2011. <http://indonesia.go.id/in/sekilas-indonesia/geografi-indonesia.html>.

Portal Nasional RI. (2010). *Politik dan pemerintahan*. 29 December 2011. <http://indonesia.go.id/in/sekilas-indonesia/politik-dan-pemerintahan.html>.

Trüby, Stephan. (2008). *Exit-architecture: design between war and peace* (Robert Payne, Translator). New York: Springer Wien.

Undang-Undang No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Universitas Indonesia. (2008). *Pedoman teknis penulisan tugas akhir mahasiswa universitas indonesia*.

Weber, Max. (1958). *The city* (Don Martindale & Getrud Neuwirth, Translator, Editor). New York: Free Press.

Webster's ninth new collegiate dictionary. (1991). Springfield, Massachusetts: Merriam-Webster.

LATAR BELAKANG



PERTANYAAN SKRIPSI

SEPERTI APAKAH POLA SPASIAL PERTAHANAN NEGARA BERDASARKAN TIPOLOGI GEOPOLITIK?

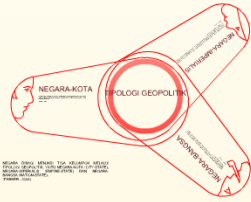
METODE

MELIHAT POLA PERTAHANAN NEGARA YANG MERUPAKAN CONTOH DARI NEGARA-KOTA, NEGARA-IMPERIALIS DAN NEGARA-BANGSA

STUDI KASUS

MELIHAT POLA PERTAHANAN NEGARA YANG MERUPAKAN CONTOH DARI NEGARA-KOTA, NEGARA-IMPERIALIS DAN NEGARA-BANGSA

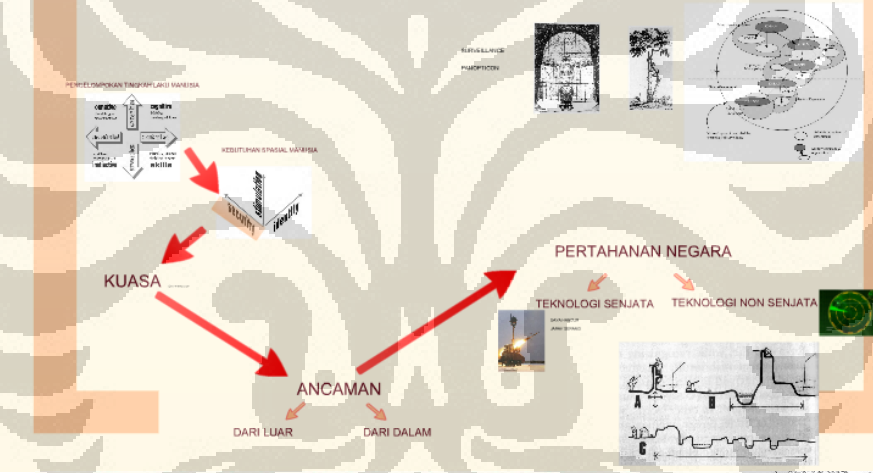
TEORI



NEGARA KOTA CIVILIZATION



POLA SPASIAL PERTAHANAN NEGARA



YUNANI KUNO



CHORA-ASTY → SYNOIKISMOS



ASPEK GEOGRAFIS

ATHENS → DINDING PERTAHANAN DAN 'WOODEN WALL'

SPARTA → HOPLITES

IMPERIUM ROMANUM



INDONESIA



KESIMPULAN

